



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DOLAR AMERIKA SERIKAT SEBAGAI ALAT HEGEMONI  
(1944 – 2000):  
TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG EKONOMI POLITIK GLOBAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
Humaniora**

**KRISNA BUDIMAN  
0704160314**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI FILSAFAT  
DEPOK  
JANUARI 2010**

### **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

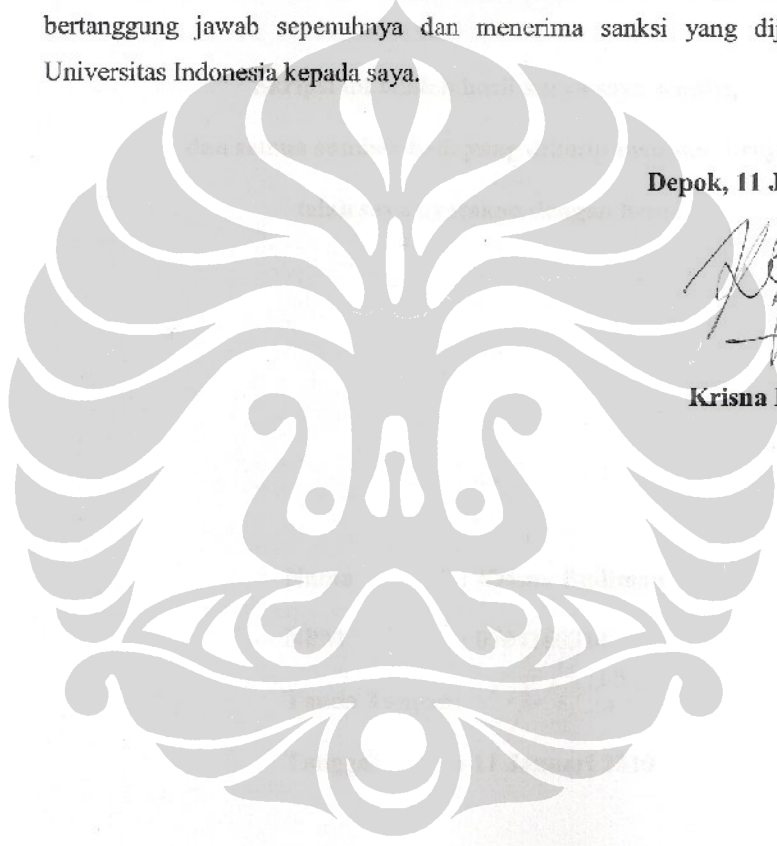
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa Skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Depok, 11 Januari 2010**



**Krisna Budiman**



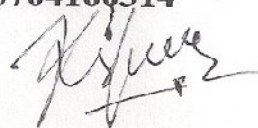
## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Krisna Budiman**

**NPM : 0704160314**

**Tanda Tangan:**



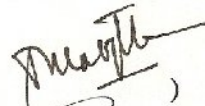
**Tanggal : 11 Januari 2010**


## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :  
 Nama : Krisna Budiman  
 NPM : 0704160314  
 Program Studi : Filsafat  
 Judul Skripsi : Dolar Amerika Serikat Sebagai Alat Hegemoni  
 (1944 – 2000): Tinjauan Filosofis Tentang Ekonomi  
 Politik Global

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Dr. Selu Margaretha Kushendrawati, S.S., M.Hum (  )

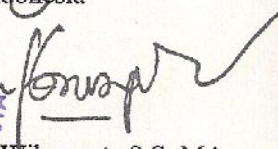
Penguji : Dr. Naupal, M.Hum (  )

Penguji : Dr. Donny Gahril Ahdian (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Januari 2010

Disahkan  
 Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
 Universitas Indonesia

  
 Dr. Bambang Wibawarta S.S., MA  
 NIP. 131 882 265

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Budiman  
NPM : 0704160314  
Program studi : Filsafat  
Departemen : Filsafat  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**DOLAR AMERIKA SERIKAT SEBAGAI ALAT HEGEMONI  
(1944 – 2000):**

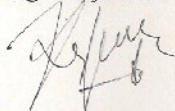
**TINJAUAN FILOSOFIS EKONOMI POLITIK GLOBAL**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 11 Januari 2010

Yang Menyatakan



Krisna Budiman

## KATA PENGANTAR

Manusia adalah makhluk yang takkan pernah dapat hidup sendiri di atas bumi ini. Sejak lahir hingga kita kembali dalam pusara debu bumi, tangan-tangan lain pastiya banyak berkontribusi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sudah selayaknya jika manusia menghaturkan terima kasih kepada setiap mereka yang memberikan kontribusi penting bagi kehidupannya.

Manusia tanpa manusia lain hanyalah akan menjadi sesosok makhluk tak berdaya dan tak berharga. Manusia tanpa kehadiran dan kasih dari yang Maha Esa, hanyalah menjadi debu pasir tak bernilai apa-apa. Berangkat dari sebuah kerendahan hati dan kesadaran penuh akan posisi manusia di hadapan Yang Maha Esa, maka penulis memunajatkan syukur pada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kesadaran penuh, saya menyadari tanpa bantuan banyak pihak, skripsi ini mungkin takkan pernah bisa terselesaikan. Oleh karena itu dengan penghormatan tertinggi saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam segala bentuknya. Semoga suatu saat nanti saya mampu membalas kebaikan-kebaikan tersebut dengan jauh lebih baik.

Ucapan terima kasih terutama saya haturkan kepada sosok perempuan yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga mencapai tingkat pendidikan seperti saat ini. Seorang ibu yang mampu bertahan dalam kerasnya hidup dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh pengorbanan. Terima kasih yang mendalam juga saya haturkan kepada Ibu Margaretha yang amat berperan dalam kelulusan dan terselesainya skripsi ini dengan hasil yang cukup memuaskan.

Dengan penuh takzim pula saya haturkan terima kasih kepada Pak Naufal, Pak Donny, Pak Budi dan Mas Fahru atas peran-perannya dalam skripsi ini. Tanpa mereka semua, mungkin skripsi ini hanya menjadi sampah yang tak layak dalam dunia akademis. Untuk sahabat-sahabat di Filsafat angkatan 2004, terima kasih atas hangatnya persahabatannya yang kalian berikan. Untuk Sahabat-sahabat tercinta, Windo, Ali, Zaki, Ucup, Munib, Yus, Widi, Danang, Hafiz, Jaenal, Rijal, Faun, Ryan, dan lainnya yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga patut saya haturkan kepada teman-teman diluar FIB yang banyak memberikan bantuan hingga skripsi ini bisa diselesaikan. Kepada Ambar dan Lily selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, Rengganik, sosok wanita cerdas nan cantik yang banyak memberi cakrawala baru dalam berfikir, teman-teman MPM UI yang telah mengantarkan saya pada kedewasaan berpikir dan berpolitik, teman-teman HMI UI yang menjadi surga untuk mengembangkan daya intelektual dengan diskusi-diskusi santai nan berbobot dan tak lupa pula untuk teman-teman Anggi Foundation (khususnya Rizka yang sering meminjamkan kartu perpustakaan) yang memberikan persahabatan yang hangat.

Tak lengkap pula jika tak menyebut nama sahabat lama yang hingga kini masih setia menemani. Untuk Rijal Kuncoro, Ningrum, Hani Abrianto serta nama-nama lama cukup sulit untuk mengingatnya kembali. Semua orang yang saya sebut disini adalah manusia istimewa dalam hati saya. Semoga kebaikan mereka mendapatkan balasan yang lebih baik.

Terakhir kami ucapkan terima kasih yang amat sangat kepada orang-orang yang memberikan saya motivasi, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, namun juga untuk kehidupan yang besar ini. Kepada Pak Gumilar yang akhirnya menjadi Rektor, terima kasih atas wejangannya atas peran penting kekuatan pemuda untuk bangsa ini. Terima kasih kepada senior, sahabat dan guru saya, KhairulRijal yang mengilhami saya untuk selalu menjadi mutiara yang kan selalu menjadi mutiara dimanapun ia berada, pun dalam lumpur terpekat sekalipun.

Maaf beribu maaf untuk orang-orang yang tak lagi disebutkan. Saya hanyalah manusia fana yang mampu lupa dan khilaf. Akhir kata semoga skripsi ini mampu bermanfaat bagi sebanyak-banyak makhluk di alam semesta ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada manusia-manusia yang tergerak hatinya untuk menjadi *agen of change* dimanapun ia berada.

Semoga skripsi ini mampu membawa kebaikan pada banyak pihak. Amin.

**Depok, 11 Januari 2010**  
**Penulis**

**Krisna Budiman**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>Bab 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	14
1.5 Kerangka Teori	15
1.6 <i>Thesis Statement</i>	22
1.7 Metode Penulisan	22
1.8 Sistematika Penulisan	23
<b>Bab 2 ORIENTASI PEMIKIRAN GRAMSCI</b>	
2.1 Pengantar	24
2.2 Riwayat Hidup	25
2.3 Latar Belakang Pemikiran Gramsci	27
2.4 Marx dan Alur Pemikiran Gramsci	30
2.5 Pemikiran Gramsci dan Kontekstualisasinya	33
2.6 Pemikiran Gramsci Mengenai Hegemoni	38
2.7 Kesimpulan	47
<b>Bab 3 DOLAR SEBAGAI ALAT HEGEMONI AMERIKA SERIKAT</b>	
3.1 Pengantar	49
3.2 Hegemoni Amerika Serikat	49
3.2.1 Perjalanan AS menjadi Hegemon	50
3.2.2 Hegemoni melalui sistem kapitalisme finansial	53
3.3 Dolar Sebagai Ekspresi Hegemonik	60
3.3.1 Perjalanan Dolar dari masa ke masa	60
3.3.2 Lahirnya Dolar sebagai mata uang hegemon	62
3.3.3 Bretton Woods Sebagai momen pembentukan Hegemoni	70
3.3.4 Dolar dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Politik Global	84
3.4 Kesimpulan	86
<b>Bab 4 ANALISIS KEMUNCULAN EURO</b>	
4.1 Pengantar	88
4.2 Euro Sebagai Counter Hegemoni	89
4.3 Kemunduran Dolar dan berakhirnya Hegemoni AS	92
4.4 Kesimpulan	96
<b>Bab 5 PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Relevansi Penulisan	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>102</b>



## ABSTRAK

**Nama : Krisna Budiman**  
**Program Studi : Filsafat**  
**Judul : Dolar Sebagai Alat Hegemoni (1944 – 2000): Tinjauan Filosofis Tentang Ekonomi Politik Global**

**Skripsi ini membahas mengenai Hegemoni Dolar yang dibedah melalui pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci. Tulisan ini mengantarkan pembaca ke dalam sebuah pemahaman bahwa Dolar menjadi elemen hegemoni yang mengantarkan Amerika Serikat sebagai negara hegemon dalam kancah ekonomi politik global. Skripsi ini menjelaskan tentang berkembangnya fungsi mata uang yang melampaui fungsi asasinya. Dolar bukan lagi sekedar alat tukar, melainkan menjadi sebuah alat dan simbol bagi proses Hegemoni Amerika Serikat. Dolar kini menjadi sebuah hiperealitas murni yang abstrak dan menjadi elemen vital dalam dinamika ekonomi politik global. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Dolar menjadi alat hegemoni karena persetujuan yang diberikan negara-negara lain kepada Amerika Serikat atas penetapan Dolar sebagai mata uang hegemon dalam kesepakatan Bretton Woods 1944.**

**Kata kunci: Hegemoni Gramsci, Ekonomi Politik, Dolar.**

## ABSTRACT

**Name : Krisna Budiman**  
**Study Program : Philosophy**  
**Title : Dollar As The Hegemony Tool (1944 - 2000) : Philosophical Reviews About The Global Political Economy**

**This study discuss about the hegemony of the dollar which is described by Antonio Gramsci Hegemony thoughts. This paper bring readers into an understanding that the dollar became a hegemony element which deliver the United States as a hegemon country in the global political economy arena. This study explain about the development of the currency function beyond its basic function. The dollar is no longer just a medium of exchange, but became a tool and symbol of the United States Hegemony. Dollar has become a pure abstract hyper reality and became a vital element in the dynamics of the global political economy. This study concluded that the dollar became the instrument of hegemony because of the approval given by other countries to the United States for the determination of Dollar as a hegemon currency in the Bretton Woods Agreement in 1944.**

**Key Words : Gramsci Hegemony, Political Economy, Dollar**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah peradaban manusia adalah sejarah yang banyak diisi oleh cerita dominasi dan hegemoni. Penjajahan, penguasaan, intervensi, dan *anaxatie* menjadi narasi yang mewarnai perjalanan peradaban. Konsep yang terkuat dia yang menang menjadi hukum alam yang ada sejak jaman purba hingga abad kontemporer ini. Pemenang hampir dapat dipastikan datang dari mereka yang memiliki kekuatan lebih. Pecundang adalah mereka yang hanya bisa meratapi hidup akibat “permainan” sang pemenang. Pecundang menjadi hamba bagi pemenang. Hegemoni dan dominasi pun akhirnya memainkan peran sebagai alat kontrol tatkala pemenang telah menguasai pecundang dengan sempurna

Perjalanan kehidupan manusia merupakan kumpulan realita mengenai praksis dominasi dan hegemoni dalam kehidupannya. Praksis tersebut dilakukan secara eksploitatif, legal, dan sinis oleh sebagian kecil komunitas manusia kepada komunitas manusia lainnya. Praksis dominasi dan hegemoni kian dikuatkan dengan metode hipokrit dan kamuflatif pada ragam bentuk dan karakternya. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan penyempurnaan dalam ruang relasi antar masyarakat-negara-global yang semakin kompleks.

Suatu keironisan dalam realitas kehidupan tatkala manusia telah ter subordinasi oleh realitas ketergantungannya. Lebih ironis lagi ketika realitas ketergantungan tersebut terkait erat dengan pihak yang menghegemoni, baik secara ide, sistem maupun modal. Bentuk keironisan lainnya adalah ketika terjadi suatu bentuk kesadaran sebagian masyarakat terhadap ide, sistem, modal yang mengkondisikan suatu ketergantungan ekstrim dibawah dominasi mapan yang dipraktikkan secara sarkasme-fundamental.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena krisis nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar pada tahun 1998. Krisis tersebut pada akhirnya membawa Indonesia pada sebuah krisis multidimensi yang berkepanjangan. Macan Asia yang dahulu disegani negara-negara lain, berhenti mengaum bak kehilangan taringnya. Kehancuran ekonomi, kekacauan politik, kemerosotan nilai-

nilai sosial dan dekadensi moral pada akhirnya menjadi sesuatu yang harus terjadi di negeri ini.

Pada tanggal 6 Oktober 1997 nilai tukar Rupiah masih berada pada Rp. 3.845 per Dolar. Meskipun mendapat pukulan berat, Rupiah masih berada dalam batas toleransi. Namun sejak saat itu ternyata nilai Rupiah terus melemah hingga akhirnya jatuh pada titik terendah di kisaran Rp. 17.000 per Dolar AS pada 22 Januari 1998. Rupiah menjadi tidak terkendali sehingga melahirkan krisis nilai tukar yang kemudian menjadi bola salju dan selanjutnya menciptakan krisis-krisis lainnya.

Rupiah sebagai mata uang kebanggaan negeri ini pada akhirnya menjadi secerik kertas yang nilainya terpangkas tak berdaya. Sebaliknya, Dolar yang datang dari benua lain menjadi barang berharga yang semakin sulit dicari. Hutang luar negeri menjadi berlipat-lipat. Inflasi tak mampu lagi dielakkan lagi. Indonesia berada dalam masa-masa tergenting yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah berdirinya republik ini.

Fenomena krisis nilai tukar yang kemudian melahirkan krisis multi dimensi tersebut membawa saya kepada sebuah pemikiran bahwa mata uang menjadi elemen penting bagi kelangsungan hidup sebuah negara. Mata uang menjadi semakin bernilai ketika ia menjadi "mata uang dominan" yang menjadi perebutan banyak negara layaknya Dolar AS. Uang dominan tersebut kemudian menjadi "monster" yang membawa negara lain pada jurang kehancuran seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 tersebut.

Ketergantungan akut terhadap Dolar semakin menjadikan mata uang tersebut sebagai "tuhan" yang memberikan nyawa pada negara-negara lain untuk tetap hidup. Tengok saja bagaimana Indonesia hancur lebur akibat kelangkaan Dolar, di sisi lain negeri ini membutuhkan begitu banyak uang tersebut untuk membiayai utang, transaksi ekspor import, pendanaan proyek-proyek krusial, yang semuanya di denominasi dalam bentuk Dolar.

Krisis multidimensi 1998 telah menginspirasi saya untuk membuat sebuah skripsi yang mengangkat peran mata uang hegemon terhadap kelangsungan hidup sebuah negara. Dolar sebagai mata uang hegemon telah menjadi topik yang mendorong saya untuk mengkajinya lebih mendalam. Pada akhirnya, perjalanan

refleksi terhadap topik ini membawa saya kepada latar belakang lain dimana masih kentalnya sepak terjang dominasi dan hegemoni AS dalam dinamika ekonomi politik dunia di tengah-tengah munculnya negara-negara kuat di dunia. Hal ini tentunya juga menjadi topik yang sangat menarik mengingat AS telah menjalankan praktek hegemoninya dalam waktu yang amat lama.

Dengan kekuasaannya yang besar, AS mampu mengintervensi negara-negara lain untuk menyelaraskan kebijakan negara tersebut dengan kebijakan negara superpower tersebut. Contoh bentuk hegemoni AS tersebut adalah saat banyak negara di Asia mengalami krisis keuangan, salah satunya Indonesia. Negara-negara tersebut kemudian membutuhkan dana segar untuk pembiayaan rutin (utang beserta bunga utang sebelumnya). IMF datang dengan dana segar tersebut namun membawa segepok *conditionalities* (syarat-syarat).

*Structural Adjustments Programmes* (SAPs) atau Program Penyesuaian Struktural yang diadopsi oleh sekitar seratusan negara-negara penghutang pun kemudian mulai diterapkan (Chossudovsky, 1997: 35). Padahal SAPs tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Bagi memberi resep yang salah pada pasien yang sakit parah, maka SAPs bukannya menjadi solusi, malah akhirnya membawa problem baru tersendiri. Di sanalah AS memainkan peran pentingnya sebagai pihak yang mengemudikan kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, kekuatan AS akan semakin digdaya berkat intervensinya dalam menentukan nasib-nasib negara lain.

Amerika juga memiliki peran penting dalam dinamika ekonomi politik global. AS menjadi salah satu negara maju yang paling berpengaruh di dunia. Realitas yang ada menunjukkan bahwa kondisi dinamika ekonomi politik global diwarnai dengan berbagai kisah hegemoni dan dominasi. Dunia ekonomi politik dibelah menjadi dua kubu, yakni kubu dominan dan kubu yang terrepresi. Kelompok dominan berisi segelintir negara maju yang menguasai semua elemen pendukung “new kolonialisme”. Sebaliknya, negara-negara berkembang dan miskin menjadi objek yang dikuasai melalui jalur-jalur diplomasi, hegemoni, khususnya dalam bidang ekonomi politik (Majid Tehranian, 1999: 12).

Amerika Serikat adalah negara maju yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai penyebar new kolonialisme. Pasca perang dunia II, negara tersebut

menjelma menjadi kekuatan adidaya yang membuat gentar hampir semua negara. Berbekal kemampuan ekonomi dan militer, AS melancarkan agitasi mendikte dunia dengan segala macam motifnya. Keunggulan militer dan kapital membuat negara ini berdiri sendiri di puncak dominasi. Hegemoni pun akhirnya menjadi implikasi logis dari fenomena tersebut.

Selain menggunakan jalan militer, kekuatan ekonomi menjadi salah satu elemen strategis negara tersebut dalam menjalankan hegemoninya. Pasca kehancuran Uni Soviyet, AS mulai mengganti kebijakan *hard power* (militer) yang dahulu kerap digunakan untuk menggempur negara-negara lain menjadi *soft power* (ekonomi) yang tampak jauh lebih lunak. Amerika seringkali menggunakan lembaga-lembaga ekonomi internasional guna melancarkan pencapaian tujuan kepentingannya. Negara tersebut menggunakan lembaga internasional sebagai perpanjangan tangan dalam menjalankan praktik hegemoninya. Setidak-tidaknya terdapat tiga lembaga yang menunjang praktik hegemoni dan dominasi AS (Bambang Nuroso, 1999: 45). Ketiga lembaga tersebut yaitu *Internasional Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *World Trade Organization* (WTO).

Amerika menghegemoni dunia dengan cara mengintervensi dan mengemudikan tiga lembaga di atas melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang merupakan produk lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, AS mampu membuat tatanan sistem global yang sesuai dengan kehendaknya. Dengan tatanan sistem ekonomi global yang sesuai maka AS dengan leluasa mengartikulasikan formulasi hegemoni ekonominya dengan lebih mudah. Kekuatan ekonomi dijadikan alat efektif dan efisien dalam upaya pembentukan masyarakat global dengan AS sebagai pimpinannya (Theodore H. Cohn, 2003: Hal.160).

AS menghegemoni lembaga-lembaga internasional melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat lembaga tersebut. Keputusan-keputusan yang dibuat di dewan keamanan PBB, IMF, World Bank dan WTO seringkali merupakan cermin kepentingan Amerika yang disajikan kepada dunia sebagai keputusan yang mencerminkan kepentingan masyarakat dunia. Ungkapan “masyarakat dunia” telah menjadi kata benda kolektif yang eufemistik (menggantikan “dunia bebas”) untuk memberikan legitimasi global bagi tindakan-tindakan yang mencerminkan kepentingan AS dan negara barat lainnya.

IMF dan institusi ekonomi internasional lainnya itu digunakan Amerika untuk mempromosikan kepentingan ekonominya serta memaksakan kebijakan ekonomi yang dianggapnya tepat. Dalam setiap jajak pendapat yang digelar di masyarakat non-barat, dapat dipastikan IMF akan meraih dukungan dari para menteri keuangan dan beberapa orang lainnya, namun mereka memperoleh nilai kurang baik dari hampir semua masyarakat, yang lebih setuju dengan karakteristik Georgy Arbatov yang menyebut para petinggi IMF sebagai “kaum non Bolshevik” yang suka mengambil alih uang orang lain, memaksakan peraturan ekonomi dan panduan politik yang asing dan tidak demokratis, serta mencekik kebebasan ekonomi (Samuel P. Huntington, et.al, 2005: 73-74).

Amerika memiliki posisi yang sangat kuat dalam setiap pembentukan kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga ekonomi dunia. Tidak seperti di PBB yang menerapkan sistem *one nation one vote* dalam pengambilan keputusan, IMF menggunakan sistem *Power Voting* tertimbang. Hal itu berarti tiap negara mendapat jatah suara 250 Votes, ditambah 1 suara untuk setiap SDR 100.000 dari quotanya. SDR (*Special Drawing Rights*) adalah unit nilai tukar yang dipergunakan IMF, juga untuk menyatukan transaksi dan account IMF. Hingga saat ini, AS adalah negara pemegang *Voting Power* terbesar di IMF, yang juga berarti AS merupakan pemegang kendali atas keuangan dunia (Indra Ismawan, 2002: 59).

Dominasi kekuasaan moneter AS atas perekonomian dunia dapat dilihat dari posisi AS terhadap dua institusi keuangan terbesar dunia yaitu IMF dan *World Bank*. Badan ini terbentuk atas prakarsa AS dengan dana sebesar US\$ 58,8 milyar, dengan posisi sebagai penyumbang terbesar yakni sekitar 25% (Henry Velmeyer dan James, 2002: 110). Inilah yang kemudian membuat AS begitu mudah menyetir setiap kebijakan yang keluar dari lembaga tersebut.

AS sejatinya merupakan raksasa ekonomi yang digdaya. Begitu digdayanya kekuatan ekonomi AS hingga akhirnya kita sulit untuk memetakan apa sebenarnya yang menjadi elemen utama yang menopang kekuatan ekonomi AS tersebut. Disinilah saya melihat kondisi riil dimana mata uang Dolar AS menjadi elemen paling vital dalam sistem ekonomi global (Chossudovsky, 1997: 162). Dolar dijadikan AS sebagai elemen hegemoni dalam upaya “menguasai”

dunia, khususnya pada negara-negara dunia ketiga. AS telah memenuhi syarat sebagai negara hegemon dengan senjata mata uang Dolarnya.

Menurut Francois Perroux, karakteristik negara hegemon dalam ekonomi dapat diukur dari jumlah barang yang dihasilkan dalam transaksi perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi yang progresif, tingkat konsumsi yang tinggi, tingkat tenaga kerja yang seimbang, dan juga mampu memperluas pengaruhnya dalam transaksi internasional. Ia menyebutkan Amerika sebagai contoh negara yang mampu menjadi hegemon dalam ekonomi global (Mihaly Simai, 1990: 79).

Dalam banyak hal Dolar merupakan alat hegemoni AS sekaligus instrumen imperialisme modern AS atas dunia. Dolar digunakan oleh lebih dari 60% penduduk dunia untuk berbagai kepentingan perdagangan internasional (Burmali Ilyas, 2006: 108). Dolar –sebelum kelahiran mata uang EURO– memang tidak pernah ada pesaingnya. Direktur *Institute for International Economics*, C. Fred Bergsten, menuturkan bahwa lebih dari separuh abad Amerika menggerakkan roda ekonomi. Selama ini pula tidak sebuah negara pun yang ukuran “kue” ekonomi menyamai Amerika (M. Lutfi Hamidi, 2003: 9).

Gary Hufbauer dari lembaga nonpartisan *Peterson Institute for International Economics* berpendapat bahwa AS “lebih kaya satu triliun Dolar setiap tahun dikarenakan perdagangan yang terglobalisasi”. Itu senilai hampir 10% produk domestik bruto, atau market sebesar 10 ribu Dolar per rumah tangga (David M. Smick, 2009: 31). Hal ini membuktikan bahwa AS mendapatkan keuntungan yang amat besar, dan semua itu tak dapat dilepaskan dari andil Dolar.

Peranan Dolar sebagai mata uang internasional dimulai saat poundsterling mulai kehilangan kekuatannya sebagai mata uang internasional. Pada tahun 1914, AS berubah dari pengutang (*net debtor*) menjadi kreditor dan Inggris berada pada posisi sebaliknya. Hal ini disebabkan Inggris berhutang dari AS selama perang dunia I dan II. Dolar kemudian menggantikan Poundsterling sebagai mata uang dunia.

Dolar menjadi mata uang yang paling dicari di seluruh dunia. Semua memburunya untuk dijadikan investasi dan juga alat perdagangan. Ketergantungan mereka pada mata uang Dolar sangat kuat hingga akhirnya

fluktuasi nilai mata uang menjadi salah satu faktor penentu bagi transaksi ekonomi mereka. Ironisnya, fluktuasi Dolar terjadi dengan begitu dinamisnya dan teramat sensitif oleh isu-isu politis. Ketergantungan inilah yang menjadikan Amerika secara tak langsung menjadi hegemon melalui mata uangnya.

Dengan adanya relasi ketergantungan, bahkan terkadang dalam tingkat yang akut, Amerika Serikat memiliki power yang luar biasa besar untuk mempengaruhi negara-negara pengguna Dolar. Negara-negara yang menjadi subordinat Amerika Serikat tersebut hanya sekedar menjadi penerima akibat dan implikasi dari semua sepak terjang AS. Negara-negara tersebut pun akan menjadi selalu berada di bawah bayang-bayang rezim hegemon AS. Hal ini sesuai dengan definisi ketergantungan dari Theotoniados Santos:

*“...yang dimaksud dengan ketergantungan adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu yang dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dan kehidupan ekonomi negara lain, dimana negara tertentu itu hanya berpean sebagai penerima akibat saja. Hubungan saling tergantung antara dua sistem ekonomi atau lebih, dan hubungan antara sistem-sistem ekonomi ini dengan perdagangan dunia menjadi ketergantungan apabila ekonomi beberapa negara (yang dominan) bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara lainnya (yang tergantung) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif.”*  
(Theotoniados Santos, 2002: 231)

Contoh lain yang menjadi bukti betapa Amerika Serikat memainkan peran penting dengan Dolarnya adalah tatkala AS didera resesi hebat pada awal tahun 80-an. Pada bulan Oktober 1979, gubernur bank sentral Amerika Serikat, Paul Volcker, mengumumkan perubahan mendadak atas kebijakan moneter AS yang dimaksudkan untuk memerangi inflasi domestik dan mengukuhkan kembali pemantapan nilai Dolar. Kampanye kepresidenan Ronald Reagan pada bulan November 1980 yang juga melantangkan niat atau program pengurangan inflasi turut mendorong meningkatnya nilai Dolar.

Pada akhir 1979 hingga 1981, Dolar mengalami apresiasi terhadap DM sebesar 23,3%. Suku bunga di AS juga meningkat tajam di akhir 1979. Awal-awal tahun 1981, suku bunga jangka pendek di AS naik hampir dua kali lipat dibandingkan suku bunga tahun 1978. Kenaikan suku bunga akhirnya mendorong



para investor memprediksi bahwa nilai Dolar akan semakin menguat pada periode berikutnya. Akhirnya, apresiasi Dolar terjadi seketika.

Apresiasi Dolar membawa berkah bagi AS, namun tidak bagi negara lain. Meningkatnya nilai Dolar malah mempersulit upaya negara-negara lain untuk memerangi inflasi. Kenaikan Dolar membuat harga impor semakin mahal dan merangsang pekerja untuk menuntut kenaikan upah. Sedangkan bagi AS, naiknya Dolar membuat inflasi lebih terkendalikan. Kebijakan moneter ketat AS, dengan demikian menimbulkan efek pengalihan beban makroekonomi terhadap perekonomian negara lain. Inflasi AS memang menurun, namun inflasi negara lain terangsang naik. Jadi, dengan bahasa sederhana, AS telah berhasil mengekspor inflasinya tersebut ke negara-negara lain (Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, 1994: 353).

Dolar membuat banyak negara di dunia menjadi dependen dengan AS. Ketergantungan banyak negara di dunia kepada AS memberikan negara adidaya tersebut banyak keuntungan untuk menaikkan posisi tawar dalam lebih tinggi dalam percaturan sistem ekonomi politik global. Keuntungan lainnya adalah Amerika dapat menikmati pendapatan yang luar biasa besar dari penciptaan uang yang dikenal dengan istilah *seigniorage*.

*Seigniorage* merupakan keuntungan negara pencipta uang yang dihasilkan dari selisih bahan pencipta uang dengan nilai nominal yang tercantum pada uang tersebut. *Seigniorage* merupakan keuntungan yang didapat dari banyaknya perbedaan antara nilai intrinsik dan nilai nominal dalam sebuah mata uang (Theodore H. Cohn, 2003: 162). Dolar adalah mata uang terbanyak yang beredar di dunia, maka AS tentunya menjadi pengambil keuntungan *seigniorage* terbesar di dunia

Mata uang Dolar telah menjadi mata uang kuat (*hard currency*) dunia yang digunakan sebagai standar nilai dan alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Mata uang lainnya, terlebih mata uang negara berkembang, dianggap tidak layak untuk transaksi internasional. Mata uang mereka dianggap *volatile*. *Volatile* disini dapat disejajarkan dengan tidak stabil, rentan fluktuasi, atau nilainya gampang naik turun secara relatif dibandingkan dengan mata uang lainnya. Itu artinya semua mata uang dunia harus berkiblat pada Dolar sebagai

patokan. Maka dari itu tepatlah apabila beberapa penulis dan ekonom menyebut sistem mata uang saat ini berubah dari *Gold Standar* menjadi *Dolar Standar* mengingat Dolar menjadi koefisien penentu bagi nilai mata uang negara lainnya.

Hingga sekarang Dolar masih memainkan peran penting dalam ekonomi internasional. Krisis finansial global yang kini sedang terjadi disinyalir banyak pihak ada keterkaitannya dengan volume Dolar yang melampaui batas. Dolar telah memenuhi devisa negara-negara industri besar seperti Cina, Jepang dan Korsel dimana negara-negara tersebut mengalami tingkat ekspor yang jauh melebihi impor. Akhirnya, negara-negara tersebut mengalami surplus devisa dalam bentuk Dolar.

Menurut Prof. Kundjoro Jakti, Dolar menjadi penyebab krisis finansial sudah menjadi pengetahuan umum. Pada sebuah seminar diskusi “Peran AS dalam Ekonomi Internasional” yang diselenggarakan oleh jurusan HI FISIP UI pada 5 Mei 2009 ia menjelaskan secara gamblang bagaimana krisis finansial 2008 terjadi. Krisis tersebut tak lain merupakan akibat sirkulasi Dolar yang bermasalah.

Ia memberi sebuah contoh, jika volume devisa Cina dalam bentuk Dolar telah mencapai dua triliun. Surplus tersebut kemudian dialirkan kembali ke negeri asalnya (AS) dalam bentuk investasi (melalui obligasi). Dengan banyaknya Dolar yang “pulang kampung”, maka volume Dolar di AS semakin menumpuk. Bank-bank akhirnya berada posisi untuk memutar kembali uang tersebut. Akhirnya terjadi pelanggaran syarat pengajuan kredit yang mendorong pihak-pihak tak layak mendapatkan kredit. Inilah yang kemudian di sinyalir sebagai awal kasus *subprime mortgade*.

Pemaparan diatas membuktikan bahwa Dolar merupakan elemen hegemoni yang sangat ampuh bagi AS. Dengan *Dolar Standard*, maka semua mata uang asing akan dependen terhadap Dolar. Semua hal yang mempengaruhi nilai Dolar secara otomatis pula akan berpengaruh pula pada semua mata uang dunia. Dengan Dolar pula, AS mampu mendikte banyak negara serta ikut campur dalam masalah internal sebuah negara. Dolar pulalah yang mampu mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Inilah yang kemudian menjadi minat saya untuk mendalami fenomena hegemoni AS melalui Dolar.

Penulis mengambil teori hegemoni dari perspektif Gramscian karena dianggap paling sesuai untuk menjelaskan hubungan hegemonik antara Amerika dengan keadaan ekonomi dunia. Gramsci membedakan antara konsep dominasi dengan hegemoni. Dominasi menurut Gramsci adalah upaya mempengaruhi melalui bidang kekerasan seperti melalui militer. Sedangkan hegemoni lebih bersifat soft power dimana kekuatan diplomasi, ekonomi dan budaya bekerja dalam ranah infiltrasi kesadaran yang dihegemoni.

Sepak terjang AS saat ini mirip sekali dengan perkataan Gramsci mengenai "Misi orang-orang Italia", yakni mengembalikan kosmopolitanisme ala Roma dan abad pertengahan, tetapi dengan bentuknya yang paling modern dan maju (Gramsci, 1972: 247). AS seakan berambisi untuk membuat sebuah imperium yang mengulang kejayaan bangsa Romawi pada masa lampau, namun dalam bentuk imperium yang jauh lebih modern dan kosmopolit dengan AS sebagai "pusat kekaisaran"

Di sisi lain, hegemoni kultural juga disebarkan lewat aktor neoliberalisme, yang membuat Negara terhegemon tertidur lelap terbius teori-teori yang dibangun para ekonom dan pakar politik neoliberalisme. Dalam konteks pemikiran hegemoni Gramsci, ekspansi neoimperialisme dan neoliberalisme dewasa ini tampak sebagai pembentukan hegemoni melalui kekuatan ide. Dalam hal ini, sesungguhnya teori-teori tersebut menjadi bagian dari alat hegemoni karena berbagai teori tersebut menjadi paradigma untuk melanggengkan dan melegitimasi ketergantungan yang terhegemon dan penghegemon. Dengan kata lain, terjadi perubahan bentuk dari dominasi, tidak lagi terjadi secara fisik melainkan melalui hegemoni yakni dominasi cara pandang dan ideologi (Mansour Fakih, 2004: 24-25).

Dalam konteks pemikiran Gramsci, menghadapi hegemoni neo-imperialisme yang disebarkan oleh kekuasaan "kerajaan korporasi" itu harus dibangun kontra-hegemoni (*counter hegemony*) dalam bentuk resistensi demokrasi berbasis budaya lokal. Namun, untuk membangun konsep demokrasi dalam konteks budaya lokal sebagai manifestasi dari kontra-hegemoni (*counter hegemony*) dibutuhkan kepemimpinan moral dan intelektual (*intelektual organik*). Artinya, perlu dibangun sebuah kesadaran dari terhegemon untuk menyadari

keadaan yang terjadi bahwa dirinya sedang dihegemoni dan sesegera mungkin untuk melancarkan *counter-nya*.

Gramsci juga melihat adanya ketidaksetaraan posisi antara penghegemon dan yang terhegemon. Terhegemon berada dalam posisi subordinat, namun ia juga berada dalam posisi *powerless* untuk melawan si hegemon. Saya melihat ada sebuah relevansi pemikiran Gramsci tersebut dengan kondisi kekinian dimana terjadi ketidaksetaraan posisi dalam hubungan ekonomi internasional antara AS dengan negara-negara lainnya.

Penulis melihat adanya ketidakseimbangan hubungan yang seharusnya tidak terjadi dalam hubungan yang ideal. Sebagai negara yang sama-sama berdaulat, saling memerlukan, sepatutnya hubungan yang ada adalah hubungan setara dan tidak berat sebelah. Dalam hal ini penulis merasa perlu ada sebuah upaya untuk mendudukkan kembali negara-negara di dunia dalam posisi yang setara dan adil, tanpa ada yang penghegemoni tunggal.

Penulis merasa perlu adanya kontekstualisasi teori-teori hegemoni yang ada. Beranjak dari Gramsci, penulis akan mencoba mengkritisi teori-teori hegemoni yang ada dan mengkontekstualisasikan dengan keadaan yang relevan dengan situasi saat ini. Saya akan mencoba mengkritisi fenomena yang ada dengan menggunakan pemikiran Gramsci sebagai alat bedah permasalahan yang penulis tawarkan.

Ujung perjalanan pemikiran mengenai hegemoni mata uang ini akan berakhir pada sebuah kesimpulan bahwa Dolar menjadi salah satu elemen pendukung AS untuk menjalankan *new imperialism* dan kolonialisme yang dari lama memang telah dijalankan. Dolar menjadi alat untuk mendukung penjajahan AS terhadap negara-negara lemah di dunia dan menjadikan mereka bertekuk lutut dan menghamba pada segala kepentingan AS.

Penulis menyadari betapa pentingnya tema hegemoni ini untuk diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah. Beberapa fenomena global seperti krisis finansial yang kini sedang terjadi, menurut hemat penulis merupakan salah satu efek dari hegemoni AS dalam bidang ekonomi politik. Namun sayangnya semua pihak melihat fenomena tersebut hanya sebatas permasalahan-permasalahan teknis

ekonomi moneter saja, hanya sedikit pihak yang membahas hingga dalam ranah konseptual.

Para pemikir dan ekonom lebih banyak berkuat pada masalah-masalah teknis mekanik ekonomis yang tak menyentuh ranah arkaik. Mereka terjebak pada variabel-variabel konsep ekonomi dan menafikkan unsur-unsur di balik variabel-variabel tersebut. Variabel-variabel tersebut adalah sesuatu yang tetap sehingga apapun yang terjadi pasti akan berkuat pada wilayah yang sempit. Kini sudah saatnya untuk menengok semua hal yang ada di balik variabel-variabel tetap tersebut.

Layaknya fungsi filsafat, pembahasan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tak tampak dari sistem kapitalisme yang menjadi wadah subur terjadinya proses hegemoni. Sudah terlalu banyak pandangan yang melihat kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang menjanjikan kehidupan lebih baik bagi umat manusia. Dan kini saatnya melihat "monster-monster" seram di balik kapitalisme tersebut.

Ketidakadilan, neo-imprealisme, penjajahan gaya baru, *hiperpower* adalah contoh tema-tema yang terselubung dibalik kedigjayaan sistem kapitalisme. Sayangnya, hanya sedikit pemikir yang menyusuri wilayah-wilayah yang tak kasat mata tersebut. Wilayah-wilayah tersebut tersembunyi dibalik ekspansi pendukung kapitalisme yang mempropogandakan secara hiperbolik bahwa kapitalisme adalah sistem paling ideal bagi kemakmuran umat manusia.

Berpijak pada kenyataan yang ada, penulis menyadari bahwa perlu adanya sebuah pembahasan filosofis mengenai tema hegemoni tersebut. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap akan bisa menambah sudut pandang dalam melihat fenomena kekinian yang ada, khususnya dalam bidang ekonomi politik global. Penulis berharap skripsi ini mampu memperkaya pemikiran dan analisa mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi politik global yang ada.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mata uang Dolar telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mata uang tersebut telah menghegemoni mata-mata uang internasional lainnya dan menjadi elemen penting dalam pengukuhan dominasi Amerika terhadap sistem ekonomi

politik global. Dolar menjadi alat utama Amerika Serikat untuk melancarkan penjajahan terhadap negara lain dalam bentuk yang baru. AS telah melancarkan bentuk imperialisme paling modern dalam bentuk penjajahan ekonomi.

Imperialisme menurut Kamus Politik adalah Sistem Politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Imperialisme dapat dicirikan adanya hubungan superior-inferior dengan keadaan yang menggambarkan wilayah dan rakyatnya tunduk terhadap negara asing (B.N.Marbun, 2003: 218).

Dengan adanya Dolar, kedudukan AS menjadi lebih superior dibandingkan negara-negara lainnya. Dolar menjadikan AS memiliki kekuatan yang lebih signifikan dalam percaturan ekonomi internasional. Pada akhirnya, dengan kekuatan yang ada, AS tampil sebagai hegemon dan memegang kendali terhadap dinamika ekonomi internasional. Dolar menjadikan AS begitu *powerfull* dalam upayanya melancarkan kapitalisme finansial.

Dolar telah menjadi mata uang hegemon. Pertanyaan besar yang kemudian menjadi titik tolak penulisan ini adalah: Apa penyebab Dolar mampu menjadi mata uang hegemon? Bagaimana Dolar mampu menjadi hegemon dan alat hegemoni bagi AS? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya akan terjawab ketika penulis telah mampu menjawab pertanyaan: Apa yang dimaksud hegemoni Dolar?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penyusunan skripsi ini mengambil batasan masalah seputar relasi hegemoni antara Amerika Serikat sebagai pencipta Dolar dan kaitannya dengan negara-negara pengguna Dolar. Fokus penyusunan skripsi ini adalah menelusuri perubahan esensi mata uang dari fungsinya utamanya sebagai alat satuan hitung dan alat tukar, menjadi elemen utama hegemoni dan penjajahan dalam bentuk baru.

Terminologi Dolar yang penulis pergunakan dalam skripsi ini merupakan Dolar yang telah melampaui fungsi uang semestinya, yakni sebagai alat tukar dan satuan hitung belaka. Penulis menggunakan terminologi Dolar dalam pemaknaan Dolar sebagai alat dalam sistem finansial global dimana AS menjadi aktor penting

di dalamnya. Oleh karena itu, pembahasan skripsi ini sedikit banyak akan mengulas perihal sistem kapitalisme finansial yang sejatinya menjadi surga bagi Dolar untuk menjadi hegemon.

Skripsi ini lebih menitikberatkan pembahasan mengenai proses persetujuan yang ada di sekitar sistem finansial yang tak lain menurut hemat penulis merupakan sebuah proses pembentukan hegemoni ala Gramsci. Penulis akan mengulas perihal pembentukan dan pengelolaan hegemoni tersebut serta counter hegemoni yang tentunya melahirkan pertanyaan besar akan keberlangsungan proses hegemoni tersebut.

Pembahasan skripsi ini dibatasi ruang lingkup waktu dari momentum kesepakatan Bretton Woods 1944 yang menurut hemat penulis merupakan bentuk deklarasi resmi hegemoni Dolar AS. Penulis melihat momentum tersebut sebagai resminya pergantian hegemoni mata uang Poundsterling menuju hegemoni Dolar AS. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk persetujuan moral dan intelektual yang oleh Gramsci disebut sebagai kunci pokok hegemoni.

Penulis mengambil momentum kemunculan EURO pada tahun 2000 sebagai batas akhir masalah skripsi ini. Penulis melihat bahwa pasca kemunculan mata uang bersama Uni Eropa tersebut, hegemoni Dolar AS perlu dipertanyakan kembali. Bagi sebagian pemikir ekonomi, kemunculan uang tersebut menjadi titik awal pudarnya hegemoni Dolar AS dan perannya dalam ekonomi politik global. Euro menjadi cunter hegemoni yang berpeluang besar menggantikan Dolar sebagai mata uang hegemon.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Ketiga pertanyaan pada perumusan masalah akan menjadi inti pembahasan skripsi ini. penulis tentunya memiliki maksud tersendiri sebagai alasan mengambil tema diatas. Ketiga pertanyaan pokok diatas tersebut akan penulis coba untuk dijawab melalui penelaahan filosofis analitik-reflektif dan kritis yang bertujuan untuk:

1. Membahas secara mendalam makna hegemoni dikaitkan dengan praktek kapitalisme finansial yang merupakan fakta kekinian dalam era globalisasi.

2. Mengembangkan pemikiran mengenai filsafat uang yang saat ini masih sedikit dibandingkan dengan minat pemikiran filsafat lainnya.
3. Salah satu upaya mengkontekstualisasikan pemikiran filsafat dengan keadaan faktual yang terjadi sehingga filsafat dapat menjadi alat praktis yang mampu memberikan solusi terhadap problem kontemporer yang ada.
4. Melakukan refleksi kritis filosofis penyimpulan tematik mendalam kasus ketergantungan negara-negara dunia ketiga terhadap AS.
5. Memberikan sumbangsih terhadap dunia akademik, khususnya dalam bidang hubungan internasional, sosial, politik dan ekonomi.
6. Sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana di program studi Filsafat FIB UI.

### 1.5 Kerangka Teori

Penyusunan skripsi ini menggunakan teori-teori hegemoni dan dominasi. Teori utama yang dijadikan pijakan adalah teori hegemoni yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci. Dalam penulisan skripsi ini penulis memisahkan konsep hegemoni dan dominasi dalam ruang terpisah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan analisa yang bersih dan tajam.

Setidaknya ada tiga corak interpretasi pokok terhadap pemikiran Gramsci. Pertama, pemikiran ortodoks atau *Leninist school*, yang melihat Gramsci sebagai seorang pengikut Lenin yang kemudian menerjemahkan pengalaman Bolshevik di Rusia kepada kondisi yang terjadi di Italia. Konsekuensi dari interpretasi ini adalah bahwa mereka melihat *hegemoni* sebagai konsep kediktatoran Lenin di kelas proletariat. Kelompok kedua melihat bahwa teori hegemoni Gramsci sebagai tipikal pemikiran totalitarian Marxist, penafsir yang termasuk ke dalam kelompok ini pada dasarnya adalah penulis yang anti-Marxist. Dan kelompok ketiga, yang menjadi pijakan saya, berada di posisi tengah diantara dua penafsir diatas, yaitu melihat Gramsci dalam konteks pentingnya moment persetujuan dan kepemimpinan moral dan intelektual (Benedetto Fontana, 1993: 2)

Meminjam konsep perspektif gramscian, pengertian hegemoni merujuk kepada dua kata kunci, yakni persetujuan (*consent*) dan pemaksaan (*coercion*). Sebuah tatanan yang hegemonik, dalam perspektif Gramscian adalah suatu



kondisi dimana hubungan antar kelas, antara negara dan masyarakat sipil dicirikan oleh persetujuan (*consent*) alih-alih paksaan (*coercion*) (Robert Boccock, 2007: 26-28).

Dalam kaitannya dengan hegemoni AS, kita dapat mengambil penjelasan dari pemikir yang juga dipengaruhi oleh Gramsci, yakni Robert Cox. Ia menyatakan bahwa *Pax Britannica* abad kesembilan belas dan *Pax Americana* abad kedua puluh efektif karena keduanya menciptakan tata ekonomi internasional yang bersifat liberal, dimana jenis-jenis hubungan ekonomi tertentu lebih diutamakan daripada yang lain dari ketentuan-ketentuan dan pranata internasional yang bersifat liberal diterima secara luas.

Berdasarkan wawasan dari Antonio Gramsci, Robert W. Cox (1987) dalam bukunya *Production, Power, and World Order* menyatakan bahwa segi paling kritis bagi negara yang dominan adalah kemampuannya untuk mendapatkan tingkat persetujuan secara luas mengenai prinsip-prinsip yang berlaku umum –prinsip-prinsip yang menjamin supremasi dari negara yang terkemuka dan kelas-kelas sosial yang dominan- dan pada waktu yang sama menawarkan prospek yang memuaskan pada negara yang berkuasa. Cox mengidentifikasi Inggris dari tahun 1845 hingga tahun 1875 dan Amerika Serikat dari tahun 1945 hingga 1967 sebagai negara seperti itu.

Meskipun mungkin kita tidak dapat menyetujui istilah atau segala yang dijanjikannya, namun Cox telah menyinggung suatu masalah pokok: kekuatan ko-optif yang lunak sama pentingnya dengan kekuasaan komando yang keras. Jika sebuah negara dapat memperlihatkan memiliki kekuasaan di mata negara-negara lain, maka kemajuan yang dikehendakinya akan sedikit saja mendapatkan perlawanan. Jika sebuah kebudayaan dan ideologinya menarik, maka negara-negara lain akan lebih suka mencontohnya.

Jika Negara tersebut dapat menciptakan norma-norma internasional yang sesuai dengan masyarakatnya, maka akan kecil kemungkinannya untuk berubah. Jika negara tersebut dapat mendukung pranata-pranata yang mendorong negara-negara lain untuk menyalurkan atau membatasi aktivitas mereka menurut cara-cara yang diutamakan oleh negara yang dominan, maka negara tersebut tidak akan memerlukan banyak tindakan yang bersifat paksaan yang harus dilaksanakan

dengan biaya mahal ataupun kekuatan paksa dalam situasi-situasi yang memerlukan persetujuan. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep-konsep gagasan yang ditawarkan Gramsci.

Berbeda dengan keyakinan marxisme tradisional, Gramsci melihat bahwa faktor ekonomi bukanlah satu-satunya keniscayaan prasyarat revolusi, melainkan hanya sebagai salah satu kondisi dan terdapat kompleksitas lain termasuk masalah kultural, intelektual, dan moral yang perlu dianalisis. Maka, Gramsci memikirkan secara ulang gagasan *civil society* yang berbeda dengan pendahulunya, Hegel dan Marx bukan sekedar sebagai ranah ekonomis, tetapi sebagai ajang konstelasi dan perjuangan memenangkan hegemoni (Robert Bocoock, 2007: Hal 44).

Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi yang menguasai, yang pertama tidak saja harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma-norma yang diusung oleh yang kedua, tetapi juga lebih dari itu. Mereka harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka. inilah yang oleh Gramsci dinamakan “kepemimpinan moral dan intelektual”. Dalam hal ini Gramsci membedakan antara dominasi dan hegemoni. Dominasi menekankan kepada aspek paksaan (*coercion*), sementara hegemoni menekankan aspek persetujuan (*concent*). Meningkatnya paksaan berimplikasi pada semakin melemahnya hegemoni dan semakin dominannya kondisi dominasi.

Gramsci menekankan bahwa hegemoni berhasil ketika kelas penguasa berhasil menyingkirkan kekuatan oposisi, dan memenangkan persetujuan –baik secara aktif maupun pasif– dari para sekutunya (Gramsci, 1972: 104-105). Gramsci mengemukakan konsep tersebut dalam konteks negara. Menurutnya, negara meliputi kompleksitas aktivitas teoritis dan praksis, dengannya kelas yang berkuasa tidak hanya membenarkan dan memelihara dominasinya, tetapi juga mengatur untuk memenangkan persetujuan aktif dari kelas-kelas yang dipimpin (Gramsci, 1972: 244).

Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa hegemoni dalam pemahaman Gramsci adalah mengorganisir persetujuan, yakni proses yang dilakukan melalui bentuk-bentuk kesadaran yang ter subordinasi dikonstruksi tanpa harus melalui jalan kekerasan atau koersi. Blok penguasa ini tidak hanya beroperasi di tataran masyarakat politik (*political society*), tetapi juga di seluruh masyarakat.

Dalam hal ini kemudian hegemoni bisa dikaitkan dengan kapitalisme yang saat ini menjadi sesuatu yang sangat lazim. Dalam kapitalisme mengandung sebuah hegemoni dalam bidang ekonomi. Kapitalisme menciptakan kelompok-kelompok hegemoni dan yang terhegemoni dalam tataran sistem ekonomi global yang ada. Maka, kapitalisme dapat dijadikan salah satu contoh bentuk hegemoni dalam bidang ekonomi.

Kapitalisme hingga kini masih bertahan karena buruh menerima keadaan umum ini. Dominasi budaya borjuasi membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian jalan pembebasan dari kondisi ini adalah massa harus dibebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni budaya kelas kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap negara yang menindas itu bisa terjadi.

Dalam tataran ekonomi global, kapitalisme telah menciptakan beberapa negara menjadi penghegemon yang mempengaruhi negara-negara lainnya dalam berbagai hal. Salah satu negara yang muncul sebagai hegemon dalam era kapitalisme global saat ini adalah Amerika Serikat. Negara tersebut telah menjadi negara hegemon yang memiliki pengaruh besar bagi negara-negara lainnya.

Hegemoni adalah bagaimana elemen partikular mampu mengkonstruksi tuntutan mereka menjadi universal. Louis Althusser mengatakan bahwa proses seperti dominasi negara terhadap masyarakat berlangsung melalui aparat-aparat ideologis negara yang mengkonstruksi kesadaran palsu dalam masyarakat, dan membentengi masyarakat dari pembentukan pengetahuan akan adanya eksploitasi dan penindasan. Kesadaran palsu membentuk masyarakat menyetujui tindakan-tindakan yang diambil oleh negara, sekalipun tidak berkesesuaian dengan kepentingan mereka, proses ini yang disebutnya proses hegemonisasi yang membuat kelas yang menguasai negara dapat bertahan lama (Louis Althusser, 2001: 98-99)

Maka hegemoni bukanlah *hubungan dominasi* dengan menggunakan kekuasaan, melainkan *hubungan persetujuan* dengan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu *organisasi konsensus* (Roger Simon, 1999: 20).

*“...kelompok dominan dalam masyarakat dimana kelas penguasa menjadi bagian fundamental namun tidak eksklusif, mengelola dominasi mereka*

*dengan cara memenangkan 'konsensus spontan' terhadap kelompok subordinat, termasuk didalamnya kelas pekerja, melalui negoisasi politik dan konsensus ideologi antara kelompok yang mendominasi dan yang terdominasi" (Dominic Strinati, 1995: 165).*

Perlu dicatat bahwa "wilayah operasi" pemikiran Gramsci berkuat pada level negara. Artinya, dia berbicara tentang relasi-relasi sosial yang berlangsung di dalam suatu negara. Namun demikian, meski Gramsci tidak secara spesifik berbicara tentang hubungan internasional, secara tidak langsung dia mengatakan bahwa logika hubungan internasional tidak jauh berbeda dengan dengan logika yang berlaku pada level negara. Ini tampak dari kalimat:

*"...apakah hubungan internasional mendahului atau mengikuti (logikanya) hubungan sosial fundamental? Tak diragukan lagi jawabannya adalah mengikuti. Setiap inovasi organik dalam struktur sosial, melalui ekspresi teknis militernya, juga memodifikasi secara organik hubungan-hubungan absolut dan relatif dalam bidang internasional" (Gramsci, 1972: 176).*

Dari pernyataan ini, kita bisa mengatakan bahwa bagi Gramsci analisis situasi politik internasional bisa menggunakan perangkat yang sama dengan perangkat yang digunakan untuk melakukan analisis atas situasi nasional. Pemikiran Gramsci inilah yang saya gunakan sebagai dasar kerangka teori saya. Untuk memperoleh analisis yang jernih, saya membedakan konsep kekuasaan Marx dengan konsep hegemoni Gramsci.

Bagi Marx, ekonomi merupakan sumber kekuasaan. Kaum borjuis yang memiliki dan menguasai alat-alat produksi pada akhirnya mengantarkan kaum borjuis pada sebuah kekuasaan. Namun bagi Gramsci, pemikiran Marx tersebut dinilai terlalu menekankan determinasi ekonomi. Gramsci melampaui Marx dengan menyatakan bahwa ideologi yang oleh Marx ditempatkan dalam superstruktur, ternyata merupakan kunci lahirnya kekuasaan yang pada akhirnya melahirkan hegemoni. Ideologi itu pula yang nantinya melanggengkan kekuasaan tersebut.

Di sini sangat jelas bahwa Gramsci menolak determinasi ekonomi dalam pembentukan kekuasaan. Pemikiran keniscayaan sejarah akan tumbangnya kekuasaan kaum borjuis dan kapitalis yang diungkapkan Marx dengan lugas

ditolak oleh Gramsci. Baginya, tumbangya kekuasaan kaum kapitalis harus dimulai oleh kesadaran atas kaum proletar yang menurutnya sudah menjadi kapitalisme konsumen. Konsep hegemoni Gramsci tak lain merupakan modifikasi tingkat lanjut atas konsep kekuasaan yang dituturkan oleh Marx.

Skripsi ini merupakan tulisan mengenai relasi antar negara di dunia dan kaitannya dengan sistem finansial. Maka dari itu diperlukan sebuah teori hubungan internasional yang mampu menjelaskan mengenai sepaang terjang dominasi AS dalam kancan ekonomi politik global. Maka dari itu penulis mengambil salah satu perspektif besar dalam hubungan internasional. Penulis menggunakan perspektif realisme sebagai alat bantu untuk menganalisa hubungan internasional yang berkaitan dengan sistem finansial.

Perspektif realisme berakar dari asumsi dasar tentang pesimisme dan skeptisisme terhadap sifat dasar manusia. Pesimisme dan skeptisisme tersebut terutama tentang peluang yang sangat kecil dalam kemajuan politik internasional dan politik domestik, yang kemudian dapat disebut sebagai asumsi kedua. Asumsi dasar ketiga adalah bahwa dunia ini sebenarnya terdiri atas negara-negara berdaulat yang saling terlibat konflik anarkis. Peranglah yang kemudian menjadi penyelesaian dari konflik tersebut. Asumsi keempat adalah menjunjung tinggi keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara (Jackson & Sorensen 1999: 88).

Perbedaan kemajuan ekonomi antar negara-negara di dunia telah menciptakan sebuah stratifikasi sistem global yang makin menonjolkan proses hegemonik. Dunia dibagi-bagi menjadi berbagai macam klasifikasi dengan berbagai standar acuan. Namun, semua itu semakin menjelaskan hegemonisasi yang berjalan dalam sistem global. Johan Galtung seperti dikutip Marshall R Singer melukiskan dengan jelas tentang stratifikasi dalam sistem internasional ini (James N. Rosenau et.al., 1980: 275).

Galtung memaparkan bahwa sistem politik internasional mirip dengan sistem feodal yang terdiri dari negara besar alias "*top dog*", negara menengah dan regional serta negara berkembang atau negara "*underdog*" yang lebih kecil. Dalam konteks ini, ketidaksederajatan menjadi fokus utama. Negara berkembang eksis dalam tatanan dunia ini dicirikan dengan ketidaksederajatan antara negara dalam

level pembangunan sosial ekonomi, kemampuan militer dan stabilitas politik dan prestise. Pada akhirnya, ketidakseimbangan kemajuan tersebut menciptakan konflik yang tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi politik global.

Menurut realis, konflik adalah bagian tak terpisahkan dari hubungan antarnegara. Hubungan antarnegara, baik bilateral maupun multilateral, amat rentan terhadap konflik. Setiap negara pasti mengutamakan kepentingan nasionalnya dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Karena masing-masing mengutamakan kepentingan nasionalnya, maka tidak jarang terjadi benturan kepentingan antarnegara. Disinilah awal mula timbulnya konflik antarnegara.

Dalam menyorot persoalan dunia, realis melihatnya berdasarkan situasi aktual yang benar-benar nyata terjadi. Realis tidak menilainya dalam kerangka ideal, atau apa yang seharusnya terjadi. Karenanya, tradisi realis lebih mengutamakan metode induktif daripada hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penulis melihat perspektif realis adalah metode yang paling tepat untuk mengulas tema besar dalam skripsi ini.

### **1.6 Thesis Statement**

Penulis berkeyakinan bahwa *Dolar menjadi hegemon karena persetujuan terhadap AS melalui sistem kapitalisme finansial yang dibangun berdasarkan kekuatan sebagai negara super power.*

### **1.7 Metode Penulisan**

Metode yang penulis pergunakan untuk mencapai *thesis statement* adalah dengan melakukan penelusuran relasi teori hegemoni, teori kapitalisme finansial, moneter, dan politik global melalui studi pustaka dan literatur-literatur ilmiah lainnya. Dengan melakukan pengolahan teori-teori filsafat, ekonomi dan politik, penulis berharap dapat mencapai pembuktian *thesis statement* tersebut dengan sah, jernih, tajam dan logis.

Dalam melakukan pembahasan tema, penulis menggunakan model penelitian filsafat berupa gabungan antara penelitian historis-faktual, dalam hal ini akan diteliti tentang riwayat kesejarahan dari Antonio Gramsci, baik itu berupa riwayat hidup maupun pokok-pokok pikiran yang dikemukakannya. Penelitian

sistematis-reflektif, dalam hal ini penelitian akan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan mulai dari penelitian tentang hegemoni menurut Antonio Gramsci yang dikonfrontasikan dan dikomparasikan dengan pemikirannya yang lain dan kemudian menuju kesimpulan berupa refleksi dari hasil penelitian.

Gramsci hidup dalam era sebelum perang dunia kedua meletus. Hal ini tentunya menandakan bahwa Gramsci tidak mengalami momen-momen kemunculan hegemoni AS dengan Dolarinya yang muncul pasca perang dunia kedua. Pemikirannya berkuat pada ranah regional Itali-Eropa-Soviet. Maka dari itu, penulis menggunakan metode analogi sintesis kritis filsafat dimana pemikiran-pemikiran dari Gramsci akan dikontekstualisasikan dengan tema besar skripsi ini.

Penulis akan menggunakan buku *Selection from the Prison Notebook* yang merupakan kumpulan tulisan-tulisan Gramsci sebagai acuan pustaka utama. Selain itu, penulis akan mengacu pada sumber-sumber sekunder mengingat hanya *Selection from the Prison Notebook* merupakan satu-satunya buku yang menjadi jejak intelektualitas pemikiran Gramsci.

## **I.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tesis statement, metode dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi mengenai orientasi pemikiran Antonio Gramsci yang berisi tentang riwayat hidup serta latar belakang pemikirannya yang mempengaruhi karya-karyanya; dan berlanjut pada pengaruh dari karya-karya Gramsci kepada pemikir-pemikir lainnya. Pembahasan kemudian dilanjutkan pada upaya penulis untuk mengkontekstualisasikan pemikiran gramsci pada tema kontemporer melalui konsep hegemoninya yakni pembahasan Dolar sebagai alat hegemoni AS.

Bab tiga merupakan pemaparan perkembangan Dolar dan hegemoni AS. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai perjalanan AS menjadi hegemon dan bagaimana AS menjadi hegemon melalui sistem kapitalisme finansial. Penulis akan memaparkan fungsi Dolar sebagai ekspresi hegemonik dari AS. Penulis akan berupaya memaparkan perjalanan Dolar dari masa ke masa hingga lahirnya Dolar

sebagai mata uang hegemon yang dijadikan AS sebagai alat pendukung hegemoninya. Bab ini ditutup dengan pemaparan mengenai Dolar dan pengaruhnya terhadap ekonomi politik global. Semua penulisan dalam bab ini tentunya akan menggunakan kerangka teori hegemoni Gramsci.

Bab empat penulis akan memaparkan kelangsungan hegemoni Dolar pasca kemuculan mata uang Euro. Penulis akan menggunakan kerangka teori Gramsci mengenai counter hegemoni untuk menganalisis dalam penulisan bab ini. Euro merupakan awal merosotnya hegemoni AS dalam bidang kapitalisme finansial. Pertanyaan besarnya kemudian apakah kehadiran Euro akan serta merta menumbangkan Hegemoni AS atautkah akan ada sebuah counter hegemoni balasan untuk mengamankan posisi AS.

Bab lima adalah bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan. Bagian ini selain berisi ringkasan atas keseluruhan dari tulisan skripsi, juga nanti penulis mencoba menghadirkan relevansi penulisan terhadap konteks kekinian sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini bisa lebih bernilai dan bermanfaat.



## BAB 2

### ORIENTASI PEMIKIRAN GRAMSCI

Di dalam ranah teori-teori sosial, Antonio Gramsci dikenal atas penelusuran tentang "tanah tak bertuan" di antara paksaan di satu sisi, dan kesepakatan di sisi lain. Di tanah tak bertuan ini, paksaan tampak sama persis dengan kesepakatan. Paksaan hanya berlaku bagi orang-orang yang menolak, dan bukan bagi orang-orang yang menerimanya. Orang yang satu mengatakan itu adalah paksaan, orang lain yang religius akan mengatakan bahwa itu adalah peziarahan yang dilakukan dengan kehendak bebas.

#### 2.1 Pengantar

Konsep hegemoni adalah salah satu problematika yang luas pada era kontemporer. Konsep ini menjadi titik tolak baru dalam teori sosial pada periode kontemporer, walaupun sebenarnya gagasan tersebut berakar pada 1920-an. Hegemoni secara sederhana dapat diartikan sebagai "kepemimpinan moral dan filosofis". Kepemimpinan tersebut dicapai lewat persetujuan aktif kelompok-kelompok utama dalam suatu masyarakat.

Hegemoni juga bisa diartikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*). Salah satu tokoh pemikir yang terkenal dengan analisa hegemoninya adalah Antonio Gramsci.

Karya Antonio Gramsci, sang penganut Marxisme dari Italia, adalah penting bagi teori sosial yang dikembangkan oleh beberapa penganut Marxisme yang muncul akhir-akhir ini dan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri sebagai "penganut posmarxisme" (Robert Bocoock, 2007: 15). Konsep hegemoni adalah gagasan yang sentral dan paling orisinil dalam filsafat dan teori sosial Gramsci. Oleh karena itu adalah bermanfaat dan penting untuk menelusuri gagasan hegemoni seperti yang dikembangkan oleh Gramsci tersebut dan menempatkannya dalam kerangka marxisme.

Pengungkapan kembali konsep hegemoni dalam kerangka marxisme juga penting dalam menilai kritik yang diberikan oleh beberapa sosiolog tentang marxisme. Kritik-kritik tersebut diantaranya bahwa para penganut marxisme secara dibuat-buat telah mengisolasi landasan ekonomi dari budaya dan politik, menjadikan landasan ekonomi sebagai faktor yang mendeterminasi dalam berbagai hal yang berlangsung dalam berbagai lembaga politik dan lembaga sosial lainnya, dengan cara yang gagal memberikan otonomi yang memadai bagi bidang politik dan budaya.

## 2.2 Riwayat Hidup

Gramsci lahir di Ales, Cagliari, Sardinia pada tanggal 22 Januari 1891. Dia adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Pada tahun-tahun awal, kehidupan keluarganya tidaklah terlalu miskin. Ayahnya bernama Francesco, anak seorang colonel dari Naples (Nazar Patria & Andi Arief, 2003: 43). Seluruh keluarga Francesco sempat menyelesaikan pendidikan dan mendapat posisi yang baik dalam pekerjaan, kecuali Francesco. Ia kurang beruntung ketika ayahnya meninggal, studinya terpaksa putus di tengah jalan.

Francesco kemudian harus mencari pekerjaan sendiri dan ia menemukan pekerjaan yang tepat yaitu bekerja sebagai direktur Jawatan Registrasi di Ghilarza, sebuah kota kecil di tengah Sardinia. Francesco kemudian menikah dengan penduduk setempat dari keluarga yang cukup baik. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tujuh anak dimana salah satunya adalah Antonio Gramsci.

Sardinia sendiri adalah daerah yang miskin. Menurut data yang ada pada zaman itu, di Ghilarza hanya 200 dari 2000 penduduk setempat yang bisa membaca. Karena itu, orang tua Gramsci ingin menyekolahkan anak-anaknya agar bisa hidup lebih baik kelak. Namun ambisi itu runtuh, ketika ayahnya dipecat dari pekerjaan pada tahun 1897 tanpa diberi pesangon sepeser pun.

Ayahnya dipecat karena di curigai melakukan kecurangan “administrasi”. Meskipun sebenarnya kejadian yang menimpa ayahnya itu hanya imbas dari keberpihakan ayahnya terhadap salah satu partai politik ketika itu. Peristiwa itu cukup menghancurkan perekonomian keluarga besar Gramsci. Selama ayahnya

dipenjara, ibunya harus membanting tulang mencukupi kebutuhan keluarganya dengan bekerja sebagai tukang jahit.

Bagi Gramsci sendiri, kondisi ini sangat berpengaruh, karena selain memang mempunyai fisik yang cukup lemah, punggung yang bungkuk membuatnya sangat rapuh menghadapi kemiskinan. Dalam keadaan seperti itu, Gramsci kemudian dikirim oleh ibunya ke sekolah lokal dengan guru seadanya.

Untuk membantu perekonomian keluarganya, Gramsci dan kakaknya yang bernama Genaro bekerja di tempat ayahnya dulu bekerja, walaupun gaji yang diterima hanya cukup untuk membeli dua pound roti. Gramsci masih bisa meluangkan waktunya untuk mempelajari kembali pelajaran yang diterimanya di sekolah dan belajar bahasa latin sendiri. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya itu, ia mampu menjadi siswa yang berprestasi gemilang.

Dua tahun kemudian, setelah ayahnya bebas dari penjara dan ekonomi keluarga mulai membaik, Gramsci dikirim ke sebuah *gymnastium* di *Santu Lussurgiu*. Akan tetapi, faktor ekonomi pula yang menuntut ia keluar dari *gymnastium* (Nezar Patria & Andi Arief, 2003: 44.). Pada umur delapan belas tahun, Gramsci kembali meninggalkan tempat kelahirannya untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di luar kota, tepatnya di Cagilari. Ia tinggal bersama kakaknya, Genaro, dimana kakaknya adalah seorang pemimpin lokal kelompok Sosialis di sana. Dan di tempat kakaknya inilah, ia mulai mengenal bacaan-bacaan dan aktifitas politik.

Di kota Cagilari, situasi politik mulai memanas. Gerakan-gerakan protes mulai melanda seluruh kota dan merambat ke seluruh pulau. Tindakan eksploitatif oleh penguasa Italia, melalui para pengusaha tambang mineral, telah membangkitkan semangat otonomi Sardinia. Ketika situasi itu semakin memburuk dan gerakan mulai merambat ke seluruh pulau, Gramsci mulai menyadari sejarah masyarakat pada masa itu. Ia mulai rajin membaca sejarah dan pamflet-pamflet sosialis untuk mendapat suatu perspektif baru dari situasi itu.

Pada tahun 1911, Gramsci memenangkan beasiswa untuk masuk ke universitas di Turin. Ia diterima di fakultas sastra. Maka kepindahannya ke Turin ini menjadi tonggak awal perubahan hidupnya. Ia ditemani oleh mahasiswa lainnya yang mendapatkan beasiswa serupa yang bernama Palmiro Togliati.

Namun, beasiswa itu sangat kecil, sehingga Gramsci tetap hidup dalam kekurangan. Oleh karena itu, tidak heran ia sering terjangkit penyakit.

Kehidupannya di lingkungan kampus membawa hikmah yang lain. Ia berteman dekat dengan sejumlah profesor penting seperti Mateo Bartoli yang merupakan seorang sejarawan dan ahli linguistic, Luigi Einaudi yang merupakan seorang ekonom dan juga Umberto Cosmo, seorang sastrawan dan sarjana ahli Dante. Gramsci juga mulai bertualang dalam pergolakan pemikiran intelektual Italia yang mempunyai hubungan dekat dengan gerakan sosialis. Ia bertemu dengan para filsuf ternama kala itu seperti: Annibale Pastore, Antonio Labriola, Rodolfo Mondolfo, dan Benedetto Croce. Keempat tokoh inilah yang memberikan wawasan tentang teori-teori Marxis dan Hegel sehingga membuka matanya terhadap dunia. Ia mulai menilai kondisi nyata di Italia dan pada Eropa pada umumnya.

Pada tahun 1921 dia menjadi salah satu dari pendiri partai komunis Italia. Gramsci menjadi salah satu dari para pemimpin utama partai tersebut. Ia menghabiskan waktunya di Moskow dan Wina untuk bekerja bagi Internasional ketiga dan kembali kepada Italia pada tahun 1924 setelah dia terpilih sebagai anggota dewan perwakilan.

Di Moskow dia kemudian bertemu dengan Julia Schucht yang menjadi istrinya dan memberinya dua anak. Pada tahun 1926 dia ditangkap dan dua tahun kemudian dihukum pengadilan khusus untuk pembelaan negara yang bersifat fasis selama lebih dari dua puluh tahun penjara. Ia meninggal dunia di Roma pada tanggal 27 April 1937 setelah lama dipenjarakan (Pozzoloni, 2005: 1-3).

### **2.3 Latar Belakang Pemikiran Gramsci**

Kedatangan Gramsci di Turin menandai perjumpaan pertamanya dengan kehidupan kota industri modern. Kemewahan kota dan juga dangkalnya pertunjukan-pertunjukan budaya membuat Gramsci (sebagai seorang mahasiswa jurusan sastra) sering menulis banyak kritik teater. Semua ini juga membuka matanya akan kontras tajam antara kehidupan kota dan desa, interaksi keduanya, dan hubungan politik antar kelas buruh di kota dan petani di desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup Gramsci di Sardinia sangat mendalam,

bukan hanya pengalamannya yang terlalu dini akan kemiskinan dan ketidakadilan sosial di daerahnya tetapi juga minatnya terhadap budaya di sana.

Ada empat tahap periode perkembangan dalam hidup berpolitik dan pemikiran Antonio Gramsci. Periode pertama merentang antara tahun 1914-1919 yang merupakan tahun-tahun pembentukan wawasan politik dan intelektual. Dalam periode ini meskipun Gramsci adalah seorang sosialis muda yang bersemangat dan revolusioner, orientasi filsafatnya lebih idealis daripada praktis marxistis.

Periode kedua berlangsung antara tahun 1919-1920, suatu kurun waktu dimana Italia banyak dilanda keributan pabrik maupun aksi-aksi mogok. Dalam masa ini, Gramsci dengan beberapa kawannya aktif dalam pembentukan “Dewan Pabrik” (*Factory Council*) dengan semangat anti sentralismenya. Pemikiran Gramsci bergeser dari idealisme filosofis ke arah marxisme yang lebih kongkrit. Ada dua konsep perubahan yang sangat penting, yakni konsep Gramsci tentang *Self Education* (pendidikan pribadi dari diri sendiri) kaum buruh dan komitmennya terhadap organisasi politik secara nyata.

Periode ketiga antara 1921-1926 diawali dengan pembentukan Partai Komunis Italia (*Partito Comunista Italiano*) tahun 1921 sampai masuknya Gramsci ke beberapa tahanan fasis dibawah Mussolini. Pengalaman pahit hancurnya Dewan Pabrik memberikan kejelasan bagi Gramsci bahwa aktivitas otonom massa tidaklah mencukupi untuk menggulingkan kapitalisme. Pada periode ketiga ini boleh dikatakan Gramsci adalah seorang Bolshevik yang loyal dan kritis. Ini berarti bahwa Gramsci semakin menempatkan pemikirannya dalam konteks marxisme internasional.

Periode keempat boleh dikatakan sebagai periode terakhir mulai dari tahun 1926. Pada tahun 1928 Gramsci dijatuhi hukuman penjara oleh Benitto Mussolini selama 20 tahun sampai meninggal 1937 karena perdarahan otak. Dalam masa ini Gramsci merencanakan suatu penyelidikan yang mendalam terhadap pengalaman-pengalaman politiknya dalam kerangka historis maupun filosofis yang lebih luas. Antara tahun 1929-1935 ia menyelesaikan 32 catatannya yang berjumlah sekitar 3000 halaman. Tulisan-tulisan inilah yang disebut *Quaderni (Notebook Prison)*. Dalam tulisan-tulisannya tersebut, Gramsci menyusun tema-tema, kepentingan-

kepentingan, prinsip-prinsip maupun konsepnya. Dalam tulisan itu Gramsci berupaya “mengadaptasikan senjata kritis” marxisme (*keniscayaan revolusi*) ke dalam kondisi kapitalisme Italia.

Gramsci membangun pemikiran komprehensif mengenai hegemoni, negara, dan *civil society*, dengan menggunakan metode analogi dalam menganalisis struktur sosial-politik di Barat (Western Europe). Titik tolak pemikirannya berpijak pada sebuah pertanyaan: mengapa revolusi proletariat terjadi di Timur (Rusia) dan mengapa tidak di Barat? Mengapa fasisme dan bukan komunisme atau sosialisme yang berkuasa? Beranjak dari pertanyaan inilah Gramsci kemudian membangun teorinya (Robert Bocoock, 2007: 34-38).

Pertanyaan tersebut dilatarbelakangi refleksi mendalam terhadap situasi dan kondisi di zamannya. Ia hidup di belahan selatan Italia, daerah pedesaan agraris yang secara ekonomi tergolong miskin dan secara kultural menjadi subordinat dari Italia Utara. Pada kurun 1800-an, terjadi peristiwa *Risorgimento* di Italia, yaitu penyatuan Utara dan Selatan. Penyatuan ini pada akhirnya membagi Italia menjadi apa yang disebut “*legal Italy*” dan “*real Italy*”.

Italia secara legal adalah Italia yang bersatu, namun secara riil Italia terbagi dan terpecah dalam dua kubu besar: Selatan yang miskin, lembek, terbelakang secara pendidikan, dan utara yang mendominasi. Gramsci jelas berangkat dari pemihakannya pada Selatan, tempat dia berasal. Hal inilah yang di kemudian hari dilihatnya mirip dengan *Civil society* di timur (Rusia) yang lembek dan mendorongnya lebih mempelajari revolusi Bolshevik di bawah Lenin. Namun ia tetap menimbang kenyataan di Italia bahwa revolusi yang berlangsung cepat akan menuntun ke kediktatoran, sesuatu yang ingin dihindarinya.

Refleksi Gramsci juga banyak didorong fakta hadir dan berkuasanya fasisme di Italia. Lemahnya penentangan masyarakat pada fasisme, bahkan diterimanya fasisme merupakan hal yang merisaukan Gramsci. Ia menganggap hal ini disebabkan oleh lemahnya kesadaran kelas, dan tepatlah anggapannya tentang adanya subordinasi bahkan hegemoni, secara kultural dan moral.

Maka, berbeda dengan keyakinan marxisme tradisional, Gramsci melihat bahwa faktor ekonomi bukannya satu-satunya keniscayaan prasyarat revolusi, melainkan hanya sebagai salah satu kondisi dan terdapat kompleksitas lain

termasuk masalah kultural, intelektual, dan moral yang perlu dianalisis. Maka, Gramsci memikirkan secara ulang gagasan *Civil society* yang berbeda dengan sebelumnya, Hegel dan Marx bukan sekedar sebagai ranah ekonomis, tetapi sebagai ajang kontestasi dan perjuangan memenangkan hegemoni (Robert Bocoock, 2007: 44).

#### 2.4 Marx dan Alur Pemikiran Gramsci

Memahami teori Gramsci mengharuskan kita untuk mengerti argumen-argumen dan asumsi-asumsi dasar Marxist. Buah pikir Gramsci dipengaruhi oleh dasar pemikiran Karl Marx mengenai determinasi ekonomi. Bagi Marx, segala sesuatu dalam kehidupan ditentukan oleh kapital. Perputaran uang mempengaruhi hubungan manusia dengan orang-orang di sekelilingnya, alam dan juga dunia. Pikiran dan tujuan manusia adalah produk dari stuktur properti. Setiap aktivitas kultural diturunkan pada konten ekonomi yang mengontrol atau yang mendahului secara langsung atau tidak langsung.

Kedinamisan masyarakat hanya dapat dimengerti dalam sistem dimana ide-ide yang mendominasi diformulasikan oleh kelas yang memerintah untuk mengamankan kontrol kelas pekerja. Kemudian kedinamisan ini tentunya akan mencoba untuk mengubah situasi ini (melalui revolusi). Mereka akan memproduksi ide-ide mereka sendiri seperti industri dan organisasi politik mereka sendiri.

Konsep determinasi ekonomi Marx membagi masyarakat menjadi 2 lapisan: “*base*” dan “*superstructure*”. Lapisan “*base*” mempunyai komposisi produksi material, uang, objek, hubungan dengan produksi dan kekuatan produktif. Dunia nyata, ditambah dengan hubungan ekonomi yang membangkitkan kapital. Lapisan kedua, “*superstructure*”, ditentukan oleh institusi politis ideologis, hubungan sosial kita, seperangkat ide, budaya, harapan, mimpi dan semangat kita. Dunia jiwa dibentuk oleh kapital.

Menurut Marx, kita dapat mengerti “super strusktur” melalu tiga pengertian: (1) ekspresi legal dan politis yang mengekspose hubungan produksi yang nyata ada, (2) bentuk kesadaran yang mengekspresikan pandangan kelas

tertentu tentang dunia, (3) proses dimana masyarakat menjadi sadar akan konflik ekonomi fundamental dan melawannya.

Secara umum, Marx dipercaya telah memproposisikan hubungan “satu arah” antara ekonomi (bawah) dan ide-ide (atas) sebagai sistem yang kaku dan kejam. Hal inilah yang kemudian melahirkan kritik Gramsci kepada Marx. Gramsci mengkritik ekonomisme Marx yang didasarkan pada materialisme sejarah. Menurut Gramsci, pembagian struktur kehidupan pada bangunan atas dan bangunan bawah mengakibatkan kegagalan Partai Sosialis Italia dalam mengobarkan semangat revolusi 1912-1920. Gambaran struktur Marx itu pula yang menyebabkan gerakan buruh melemah dan buruh tunduk pada struktur penindasan kapitalis dan fasisme (Roger Simon, 2000: 6).

Gramsci menolak paham ekonomistis Marx. Bagi Gramsci, perubahan ke arah masyarakat sosialis bukan semata-mata bercorak ekonomistis, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya dan ideologi. Oleh karena itu, hegemoni menjadi tema sentral dalam pemikiran Gramsci sebagai upaya mewujudkan cita-cita masyarakat sosialisnya.

Gramsci juga menolak pemikiran Marx mengenai revolusi yang akan mengganti secara total negara dengan masyarakat tanpa kelas. Bagi Gramsci, perubahan ke arah sosialisme harus dilakukan dengan memanfaatkan jalur-jalur yang tersedia. Bertolak dari kondisi yang sudah ada itu, buruh membuat jaringan dan aliansi-aliansi baru dengan kelompok-kelompok sosial yang ada melalui hegemoni (Roger Simon, 2000: 11).

Orisinalitas konsep Gramsci tentang hegemoni terutama berasal dari keterpisahannya dengan dari pendekatan marxisme dogmatis seperti yang diuraikan di atas. Pendekatan dogmatis yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang melihat marxisme hanya sebagai suatu teori tentang kelas-kelas yang ditentukan secara ekonomi dan tindakan-tindakan mereka.

Menurut Gramsci, usaha kelompok dogmatis untuk mengubah marxisme menjadi suatu skema ilmiah yang mekanistik, determinis, dan positivistik menyebabkan suatu penekanan yang berlebihan terhadap bidang ekonomi dan analisis kelas yang diderivasi dalam bidang tersebut yang berkaitan dengan “hubungan dengan sarana produksi”. Bentuk marxisme ini mengasumsikan bahwa



begitu perubahan dalam kepemilikan sarana ekonomis bagi produksi, distribusi, dan pertukaran telah tercapai, tidak akan ada lagi hambatan-hambatan yang berat bagi suatu masyarakat yang benar-benar demokratis dan bebas (Robert Bocock, 2007: 37).

Menurut Gramsci, asumsi ini keliru karena hal itu mengabaikan bidang-bidang pokok lain dalam masyarakat, yakni negara dan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan menentang ekonomisme, Gramsci berusaha menekankan aspek politik dari marxisme. Sikap ini tidak bermaksud untuk menentang bidang ekonomi atau kelas-kelas ekonomi, melainkan untuk memasukkan negara dan masyarakat sipil sebagai wilayah-wilayah yang didalamnya kekuasaan diterapkan dan hakikat bentuk.

Konsep negara bangsa menjadi hal yang penting bagi konsep Gramsci karena konsep negara bangsa tersebut adalah konsep sentral dalam hal perjuangan untuk mendapatkan hegemoni. Hal ini merujuk pada pengertian hegemoni tersebut dimana berarti kepemimpinan orang-orang dari semua kelas dalam negara-bangsa tertentu. Menurut Gramsci, hal ini tidak akan pernah dapat dicapai oleh tindakan-tindakan koorperasi-ekonomi yang sempit dari orang-orang yang berkuasa dari sistem negara tersebut.

Secara historis, konsep hegemoni pertama kali diproduksi di Rusia pada 1885 oleh para marxis Rusia, terutama oleh Georgi Valentinovich Plekhanov, salah seorang murid Karl Heindrich Marx dan Frederick Engels. Gagasan ini dikembangkan sebagai bagian dari strategi untuk menggulingkan Tsarisme. Istilah tersebut menunjukkan kepemimpinan hegemoni yang harus dibentuk oleh kaum proletar dan wakil-wakilnya dalam suatu aliansi dengan kelompok-kelompok yang lain, termasuk kritikus borjuis, petani, dan intelektual yang berusaha mengakhiri negara polis Tsaris (Robert Bocock, 2007: 22).

Menurut Plekhanov, untuk mengungkap hubungan basis (*base* atau *infrastruktur*) dengan bangunan atas (*superstruktur*) diperlukan formula Monistik. Formula itu bertujuan untuk mengetahui keadaan tenaga kerja produktif, hubungan ekonomis, sistem sosio-politis yang berdasar pada basis ekonomi tertentu, mentalitas masyarakat, dan sistem ideologi.

Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin juga merumuskan hal yang senada dengan Plekhanov. Lenin merumuskan gagasan-gagasan yang muncul dalam *What is to be Done?* pada 1902. Gagasan Lenin yang lain adalah negara. Dalam karya Lenin, *State and Revolution* pada 1918, negara dilihat sebagai instrumen aturan kelompok hasil dan perwujudan dari tidak terdamaikannya pertentangan kelompok (Robert Boccock, 2007: 22). Melalui hal tersebut, Gramsci mengembangkannya, bahkan menonjolkan hegemoni sebagai sebuah gagasan sentral.

Menarik bahwa selama hidupnya, Gramsci pernah mempelajari masyarakat dari perspektif perkembangannya dan tertarik dengan pemikiran Croce. Meski demikian, ia juga menjadi pengkritik Croce karena Croce tidak berani sampai pada tataran praksis dalam menguji kebenaran teorinya. Di sinilah Gramsci mencuat dengan gerakan revolusionernya. Gerakan revolusioner Gramsci yang dimaksud yaitu bahwa ia berani untuk tidak berhenti pada pemikiran demokrat-liberal teoritis seperti Croce.

Gramsci berani menarik konsekuensi buat praksis revolusioner. Bagi Gramsci, hanya kelas buruhlah yang mamiliki keutamaan-keutamaan moral yang perlu untuk pembaharuan masyarakat. Pengaruh Georges Sorel terhadap Gramsci juga cukup besar terutama dalam kesatuan ide ini. Tidak mengherankan, ia juga terlibat dalam usaha pendidikan kaum buruh.

## **2.5 Pemikiran Gramsci dan Kontekstualisasinya**

*Civil society* merupakan salah satu konsep penting dalam pemikiran Gramsci. *Civil society* erat kaitannya dengan konsep kekuasaan Marx yang nantinya mengilhami lahirnya konsep hegemoni. Dalam konsepsi Gramsci, definisi *Civil society* merujuk kepada mode produksi (*mode of production*) yang paling dominan dalam masyarakat (kapitalis) dan ini meliputi teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas sosial (kelas buruh dengan kelas pemilik modal) dalam arti kepemilikan alat-alat produksi.

Berbeda dengan Marx, Gramsci membagi tiga jenis hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis, yakni, (1) ekonomi; (2) *civil society*; dan (3) *political*

*society*. Tapi satu hal yang harus ditegaskan di sini bahwa Gramsci sendiri tetap mempertahankan pembagian dunia sosial-politik menjadi dua, yakni basis ekonomi (struktur) dan ideology politik (suprastruktur). Gramsci tidak melihat hubungan keduanya tersebut sebagai linier, kausal, atau mekanis. Baginya, suprastruktur tidak semata-mata hanya refleksi dari struktur. Ia justru menegaskan bahwa suprastruktur adalah sebuah realitas, objektif, dan operatif.

Gramsci memasukkan masyarakat sipil dalam bangunan atas (*super structure*) Marx bersama dengan negara. Dalam masyarakat sipil, terjadi proses hegemoni oleh kelompok-kelompok dominan, sedangkan negara melakukan dominasi langsung kepada masyarakat sipil melalui hukum dan masyarakat politik. Gramsci sendiri mengakui bahwa sejatinya masyarakat sipil telah terhegemoni.

Pemahaman *Civil society* mencakup seluruh apparatus transmisi yang lazim disebut sebagai swasta (*private*) seperti universitas, LSM, media massa, gereja, sekolah, serikat dagang, partai politik, dan asosiasi budaya yang berbeda dari proses produksi dan aparat negara. Namun, mengingat apparatus-aparatus tersebut memiliki posisi dan peran yang sangat menentukan dalam membentuk kesadaran massa, maka kemampuan kelompok-kelompok yang berkuasa dalam mempertahankan atau melanggengkan kontrol sosial-politik atas kelompok-kelompok masyarakat lainnya sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengontrol apparatus-aparatus tadi.

Sementara itu, yang dimaksud dengan *political society* adalah semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan perintah atau hubungan-hubungan koersif yang terwujud dalam berbagai lembaga negara seperti angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum dan penjara bersama-sama dengan semua departemen administrasi yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan sosial, dan lain sebagainya.

Namun menurut Gramsci, baik di tingkat analisis maupun empiris, ketiga hubungan sosial ini bisa saling tumpang tindih atau melengkapi. Terhadap konsep *civil society* dan *political society*, Gramsci menganggap bahwa dua struktur utama di tingkat *suprastruktur* tersebut merepresentasikan dua wilayah yang berbeda tapi

berkaitan, yakni wilayah adanya kekuatan (*force*) dalam *political society* dan wilayah adanya persetujuan (*consent*) dalam *civil society*.

Jika yang pertama merujuk kepada keunggulan sebuah kelompok sosial melalui cara dominasi alias pemaksaan kehendak, maka yang belakangan dibangun melalui apa yang disebut sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Bentuk terakhir ini yang oleh Gramsci kemudian disebut sebagai hegemoni. Kedua struktur utama tersebut dalam konsepsi Gramsci mengenai negara yang lebih luas (disebut sebagai negara integral) merupakan gabungan dari *civil society* dan *political society*, atau sebagai hegemoni yang dilindungi oleh tameng koersif.

Gramsci memang dengan tegas menarik perbedaan konsep antara dominasi dan hegemoni. Namun, menurutnya dua hal tersebut bisa dilakukan bersamaan oleh sebuah kelompok (negara) yang dominan. Satu kelompok mendominasi dalam dua cara. “Kepemimpinan dan dominansi” Ia menjadi pimpinan kelompok yang dianggap sekutu, dan mendominasi kepada mereka yang dianggap musuh (Gramsci, 1971: 80).

Pikiran-pikiran Gramsci sejatinya dituangkan dalam kaitan untuk memahami fenomena domestik, politik Italia pada tahun 1920-1930-an. Maka wajar bila Gramsci tidak banyak membahas bagaimana hubungan kekuasaan antarnegara sebagai konsekuensi globalisasi yang saat ini berjalan. Meskipun demikian, pernyataannya dalam *Prison Notebooks* menyiratkan bahwa konsep-konsep hubungan kekuasaan dapat diterapkan untuk konteks relasi yang terjadi saat ini dalam konteks internasional lintas batas negara.

Dalam tulisannya ia mengungkapkan bahwa konfigurasi kekuasaan baik ekonomi politik atau militer dalam hubungan internasional atau tatanan dunia dapat dikaitkan dengan berbagai relasi sosial. Hal ini berarti bahwa perubahan mendasar pada relasi-relasi sosial itu niscaya akan mengakibatkan perubahan fundamental pada konfigurasi tersebut. Ketika mengkaitkan konfigurasi kekuasaan dalam relasi hubungan internasional (relasi kekuasaan antar negara dalam konteks globalisasi) tentu saja Gramsci tidak mengecilkan arti pentingnya negara. Konsepsi negara Gramsci jelas mencangkup basis sosialnya. Negara dipahami dalam konteks “masyarakat sipil internasional” dan dengan demikian konteks pentingnya kekuatan sosial transnasional.

Berbasis pada pemikiran Gramsci awal tentang relasi hubungan internasional, pemikir-pemikir lain yang masuk sebagai aliran Gramscian menyingkapkan berbagai pemikiran menerapkan ide-ide Gramsci tentang perluasan bentuk negara, hegemoni, dan formasi blok historis dalam skala dunia. Pemikir-pemikir tersebut membahasakan ulang pemikiran Gramsci dalam konteks yang lebih luas, yakni dalam konteks relasi negara global atau dalam perspektif hubungan internasional.

Robert Cox (1987), Stephen Gill (1990) merupakan dua tokoh yang menggunakan ide-ide Gramsci untuk menyumbangkan bagi perkembangan teori materialistis histori hubungan internasional. Selain itu, Gill juga mengembangkan konsep tentang kekuatan *capital transnasional*. Tokoh Gramscian lainnya adalah Enrico Augelli dan Craig Murphy (1988) yang memusatkan perhatiannya pada ide-ide Gramsci tentang “ideologi” dan “supremasi” untuk memahami hubungan Amerika Serikat dengan dunia ketiga. Pada akhirnya, ide-ide Gramsci menjadi sebuah pemikiran yang menjadi teori penting dalam kajian hubungan internasional.

Dalam konteks tulisan ini, saya ingin menempatkan ide Gramsci dalam hubungannya dengan produksi ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah demokrasi, kapitalisme, liberalisme sebagai bagian bentuk ide-ide pembangunan yang diberlakukan oleh negara hegemon melalui berbagai kebijakan ekonomi politiknya ke negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia di dalamnya.

Gramsci tidak sedikit pun menyinggung tentang sekelompok negara yang kemudian hari dikenal dengan sebutan negara-negara berkembang (maupun masyarakat lokal), tetapi Gramsci beberapa kali membicarakan tentang adanya ketimpangan hubungan antar negara. Dalam hal ini pandangannya menyerupai pandangan para pemikir dependensi. Gramsci mencatat bahwa proses pembuatan keputusan di negara-negara kecil sangat dipengaruhi, kalau tidak ditentukan, oleh negara besar.

Sementara negara-negara besar memiliki lebih banyak kebebasan dalam merumuskan berbagai kebijakannya yang sejalan dengan kepentingan domestik dan hubungan domestiknya, ruang gerak negara-negara kecil amatlah terbatas. Pengaruh kekuatan-kekuatan besar atas yang kecil ini terlihat jelas dalam

lapangan perekonomian yang berdampak secara politik dan sosial dimana negara-negara besar menembus jauh ke dalam dan mencaplok perekonomian negara kecil dalam hubungan yang timpang.

Dalam hal ini kemudian hegemoni bisa dikaitkan dengan kapitalisme yang saat ini menjadi sesuatu yang sangat lazim. Dalam kapitalisme mengandung sebuah hegemoni dalam bidang ekonomi. Kapitalisme menciptakan kelompok-kelompok hegemoni dan yang terhegemoni dalam tataran sistem ekonomi global yang ada. Maka, kapitalisme dapat dijadikan salah satu contoh bentuk hegemoni dalam bidang ekonomi.

Kapitalisme hingga kini masih bertahan karena buruh menerima keadaan umum ini. Dominasi budaya borjuasi membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian jalan pembebasan dari kondisi ini adalah massa harus dibebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni budaya kelas kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap negara yang menindas itu bisa terjadi.

Dalam tataran ekonomi global, kapitalisme telah menciptakan beberapa negara menjadi penghegemon yang mempengaruhi negara-negara lainnya dalam berbagai hal. Salah satu negara yang muncul sebagai hegemon dalam era kapitalisme global saat ini adalah Amerika Serikat. Negara tersebut telah menjadi negara hegemon yang memiliki pengaruh besar bagi negara-negara lainnya.

Dengan berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990-an, dunia akhirnya mengalami perubahan mendasar, yakni struktur bipolar berubah menjadi struktur unipolar. Amerika Serikat (AS) kemudian memantapkan posisinya sebagai satu-satunya negara adidaya dengan “rentang kepentingan” (*range of interests*) berdimensi global tanpa harus dibayang-bayangi oleh kekuatan komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet.

AS menjadi negara hegemonik yang menjadi pemimpin bagi negara-negara lain di dunia. Negara adidaya tersebut menggantikan peran dan posisi Inggris sebagai penguasa dunia sebelum berakhirnya peran dunia kedua. Namun, permasalahan-permasalahan kronik yang timbul pasca perang dunia kedua menyebabkan pengaruh kekuatan Inggris perlahan-lahan surut dan akhirnya digantikan posisinya oleh AS. Praktis, tahun 1950-an adalah momentum puncak

saat dominasi Inggris digantikan AS sebagai kekuatan utama yang menghegemoni dunia (Robert Boccock, 2007: 168).

AS telah menjadi kekuatan hegemonik yang memimpin dunia dan menjadi "imam" dalam proses kapitalisasi global. Hingga detik ini belum ada yang mampu menggantikan posisi AS sebagai kekuatan utama dunia. Fenomena yang ada kini membuktikan betapa isu-isu dan permasalahan global tak mampu menyurutkan pengaruh AS kepada dinamika ekonomi politik internasional. Oleh karena itu sangatlah menarik dan tepat jika kita memandang fenomena tersebut dalam kerangka dan konteks pemikiran hegemoni Gramsci.

## 2.6 Pemikiran Gramsci Mengenai Hegemoni

Kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno, 'eugemonia', seperti telah dinyatakan oleh *Encyclopedia Britannica* dalam praktiknya di Yunani. Kata *eugemonia* diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis* atau *citystates*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Nezar Patria & Andi Arief, 2003: 115).

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam catatannya terhadap karya Machiavelli, *The Prince* (sang penguasa), Gramsci menggunakan centaur mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia sebagai simbol dari perspektif ganda suatu tindakan politik, kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.

Dasar-dasar konsep hegemoni diletakkan oleh Lenin dengan menyempurnakan upaya yang telah dikerjakan oleh para pendiri gerakan buruh Rusia. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Perry Anderson, istilah hegemoni pertama kali dipakai oleh Plekhanov dan pengikut Marxisme Rusia lainnya pada tahun 1880-an untuk menunjukkan perlunya kelas pekerja untuk membangun aliansi dengan petani dengan tujuan meruntuhkan gerakan Tsarisme. Kelas

pekerja harus mengembangkan kekuatan nasional, berjuang untuk membebaskan semua kelas atau kelompok yang tertindas. Ini dikembangkan oleh Lenin. Dalam aliansinya dengan para petani, kelas pekerja Rusia harus bertindak sebagai kekuatan utama (hegemonik) dalam revolusi demokratis borjuis untuk menggulingkan kekuasaan bangsa Tsar. Dengan cara ini, kelas pekerja, yang pada masa lampau merupakan kelompok minoritas, mampu memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk (Roger Simon, 2000: 20-21).

Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan dari mayoritas. Gramsci menambah dimensi baru dalam masalah ini dengan memperluas pengertiannya sehingga hegemoni juga mencakup peran kapitalis beserta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh. Catatan pertama mengenai sejarah Italia, ditulis pada bab pertama dari 29 bab *Prison Notebook*, diberi judul “kepemimpinan politik kelas sebelum dan sesudah meraih kekuasaan pemerintahan”. Gramsci membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan moral dan intelektual:

*“Suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan ini pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaannya tetap berada di tangan kelompok, maka mereka harus tetap “memimpin” (Gramsci, 1971: 57-68).*

Jadi Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana menurut Lenin) menjadi sebuah konsep yang sama seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas, dan negara, tujuan untuk mengubahnya. Ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam konsepnya tentang hegemoni.

Hegemoni merupakan hubungan antar kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik atau kelompok kelas hegemonik adalah kelas yang mendapatkan persetujuan aktif dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan menciptakan dan



mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis. Konsep ideologi dibangun dengan memasukkan beberapa konsep Lenin yang berkaitan dengannya. Itulah sebabnya mengapa definisi yang singkat mengenai tidak pernah memadai.

Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Dalam beberapa paragraf dari karyanya *Prison Notebooks*, Gramsci menggunakan kata *direzione* (kepemimpinan, pengarahan) secara bergantian dengan *egemonia* (hegemoni) dan berlawanan dengan *dominazione* (dominasi). Penggunaan kata hegemoni dalam pengertian Gramsci harus dibedakan dari makna asalnya dalam bahasa Yunani, yaitu penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Ada beberapa bagian dalam *prison notebook* dimana Gramsci menggunakan hegemoni dalam pengertiannya yang umum, yakni untuk penguasaan antar bangsa dan antara kota dan desa (Roger Simon, 2000: 20).

Gramsci mengkaitkan konsensus dengan spontanitas yang bersifat psikologis mencakup berbagai penerimaan aturan sosio-politis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Hal tersebut dikarenakan hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalitarianisme dalam arti ketat, tatanan hegemonis tidak perlu masuk ke dalam lembaga ataupun praktik liberal (Nezar Patria & Andi Arief, 2003: 125).

Kelas yang lebih rendah hanya dapat menjadi kelas hegemonik dengan cara memperkuat kemampuan untuk memperoleh dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelas yang lebih rendah harus mulai melampaui aktivitas korporasi dalam lingkup setempat, yaitu aktivitas ketika mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri yang bersifat sesaat, dan harus bergerak maju menuju fase hegemonik dengan memperhatikan juga kepentingan kelas dan kelompok lain.

Catatan penting Gramsci mengenai hubungan kekuasaan merupakan salah satu dari bagian penting dalam *prison notebooks* (Gramsci, 1971: 180-183). Ia berangkat dari pernyataan bahwa tingkat perkembangan suatu kekuasaan material produksi menjadi dasar bagi munculnya berbagai kelas sosial, yang masing-masing mempunyai kedudukan khusus dalam produksi.

Sejauh ini Gramsci hanya memberikan definisi Marxis klasik terhadap lahirnya sebuah kelas. Sumbangannya yang nyata terlihat pada analisisnya mengenai hubungan berbagai kekuatan politik. Ia mengambil contoh munculnya kelas kapitalis dan membedakan tiga fase perkembangan kesadaran kolektif dan organisasi. Dua fase pertama adalah fase ekonomi-korporasi (sering disingkat korporasi), sedang yang ketiga adalah fase hegemonik (Roger Simon, 2000: 34).

Fase pertama dan paling awal terjadi ketika seseorang pedagang merasa perlu berdiri sejajar dengan pedagang lain, seseorang pengusaha dengan pengusaha lain, dan sebagainya, namun pedagang belum merasakan timbulnya solidaritas dari pengusaha. Anggota kelompok profesional sadar akan kepentingan bersama mereka dan perlunya mereka bersatu, namun belum menyadari kebutuhan untuk bergabung dengan kelompok lain ke dalam kelas yang sama.

Fase kedua yang lebih maju telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama semua kelas, namun masih dalam bidang ekonomi. Pada tahapan ini masalah negara sudah diperhatikan, namun hanya sebatas untuk memperoleh persamaan politik dan hukum dengan kelompok yang berkuasa: hak untuk ikut serta dalam penetapan undang-undang dan administrasi, bahkan untuk mengubahnya memang diakui, namun harus tetap berada dalam struktur dasar yang ada.

Fase ketiga adalah fase hegemoni dimana orang menjadi sadar bahwa kepentingan perusahaannya, dalam perkembangan di masa sekarang dan masa mendatang, melampaui batas-batas korporasi kelas yang bersifat ekonomi, dan kepentingan itu dapat dan harus menjadi kepentingan dari kelompok yang lebih rendah. Ini adalah tahap yang murni politik. Ini adalah fase dimana ideologi-ideologi yang sebelumnya terpecah-pecah sekarang bersaing sampai salah satunya atau gabungan dari ideologi-ideologi itu menang. Kemenangan itu akan menyatukan tujuan-tujuan ekonomi, politik, intelektual, dan moral serta mampu menghadapi semua persoalan sehingga perjuangan tidak berlangsung dalam dataran korporasi namun dalam dataran “universal” yang pada akhirnya terciptalah hegemoni suatu kelompok sosial yang kuat terhadap kelompok lain yang lebih rendah.

Dalam perspektif Gramsci, konsep organisasi gerakan sosial dikategorikan sebagai masyarakat sipil yang terorganisasi. Konsep tersebut didasarkan pada analisis tentang kepentingan konfliktual dan dialektika atau kesatuan dalam keberbedaan (*antitesis*) antara 'negara' (*state*) dengan 'masyarakat sipil' (*civil society*) (Nezar Patria & Andi Arief, 2003: 134).

Masyarakat sipil terdiri atas berbagai bentuk masyarakat yang rela (*volunter*) dan merupakan dunia politik utama, tempat semuanya berada dalam aktivitas ideologi dan intelektual yang dinamis maupun konstruksi hegemoni. Masyarakat sipil merupakan konteks seseorang menjadi sadar dan ikut serta dalam aksi politik. Dengan demikian, masyarakat sipil adalah suatu agregasi atau percampuran kepentingan. Dengan kata lain, kepentingan sempit ditransformasikan menjadi pandangan yang lebih universal sebagai ideologi dan kemudian dipakai atau diubah.

Selanjutnya, untuk menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat, hegemoni harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual. Hal itu menyebabkan kelompok hegemonik harus menyebarkan pandangan dan kepentingannya. Selain itu, kelompok hegemonik harus memadukan kepemimpinan dari suatu kekuatan dalam masyarakat sipil dengan bidang produksi (Roger Simon, 2000: 29).

Hubungan keterpaduan semua dimensi kehidupan kelompok sosial ini adalah blok historis (*historic bloc*). Dengan kata lain, blok historis akan tercipta atau berhasil diciptakan bila sebuah negara integral telah mengatasi fase korporatif-ekonomisnya sehingga terjadi keseragaman antara basis dan superstruktur (Nezar Patria & Andi Arief, 2003: 154).

Dengan demikian, negara sebagai suatu instrumen dari sebuah kelompok sosial menciptakan kondisi-kondisi yang di bawah kelompok tertentu dapat berkembang secara penuh. Selain itu, negara kelompok sosial fundamental juga bertindak atas nama kepentingan universal dalam suatu lapangan yang secara konstan mengubah ekuilibrium antara kelompok dominan dan kelompok pinggiran (Nezar Patria & Andi Arief, 2003: 154). Tanggung jawab untuk membangun sebuah blok historis baru, menciptakan hegemoni, dan

menguniversalkan pandangan dunia kelompok revolusioner berada pada peran intelektual.

Analisa Gramsci sejatinya merupakan usaha perbaikan terhadap konsep determinisme ekonomi dan dialektika sejarah Karl Marx. Dalam dialektika sejarah Marx, sistem kapitalisme akan menghasilkan kelas buruh dalam jumlah yang besar dan terjadi resesi ekonomi. Pada akhirnya, akan terjadi revolusi kaum buruh (proletar) yang akan melahirkan sistem sosialisme. Dengan kata lain, kapitalisme akan melahirkan sosialisme. Namun ternyata hal ini tak pernah terjadi.

Gramsci berargumen bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh ideologi, nilai, kesadaran diri, dan organisasi kaum buruh tenggelam oleh hegemoni kaum borjuasi. Hegemoni ini terjadi melalui media massa, sekolah-sekolah, bahkan melalui khotbah atau dakwah kaum religius yang melakukan indoktrinasi sehingga menimbulkan kesadaran baru bagi kaum buruh.

Kaum buruh kemudian malah berpikir untuk meningkatkan statusnya ke kelas menengah, mampu mengikuti budaya populer, dan meniru perilaku atau gaya hidup kelas borjuis. Ini semua adalah ilusi yang diciptakan kaum penguasa agar kaum yang didominasi kehilangan ideologi serta jadiri sebagai manusia merdeka.

Gramsci merupakan tokoh Marxis Itali yang cenderung melihat masyarakat sebagai dasar perjuangan antar kepentingan melalui dominasi dari sebuah ideologi terhadap ideologi lainnya. Hegemoni bukan dorongan langsung dari aksi tindakan tetapi sesuai dengan kerangka dari seluruh persaingan kelas dominan dari kenyataan dimana kelas tersebut membawa seluruh alternatif dalam bentuk horizon.

Hegemoni menghendaki ideologi yang mempertahankan asumsi sosial budaya datang dari diri secara nyata. Dampak hegemoni menghasilkan persetujuan oleh rakyat pada pemerintahan, yakni berupa prinsip-prinsip, aturan, dan hukum. Mereka percaya pengoperasian dalam kepentingan mereka.

Hegemoni merupakan pusat manajemen ideologi negara komunis. Bentuk ini merupakan perkembangan sebuah negara. Hancurnya otoritas politik di wilayah timur dan Eropa, serta pembentuk Uni Soviet, membur dalam komunitas hegemoni ideologi. Penyerangan bukan satu-satunya media hegemoni dalam teks.

Hal itu diformulasikan dalam proses komunikasi, sirkulasi susila dan penggunaan media.

Pengaruh dari semangat ini berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama intelektual. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai klas diktator. Jadi hegemoni merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau klas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya (Vedi R. Hadiz, 1990: 185).

Dalam "Buku-buku Catatan dari Penjara" dia juga membedakan antara dua macam perang: "perang manuver" yang melibatkan pergerakan maju atau mundur yang cepat dan "perang posisi", sebuah perjuangan panjang di mana kedua belah pihak bergerak secara pelan-pelan, seperti di dalam parit-parit perlindungan selama Perang Dunia I. Rumusan-rumusan Gramsci tentang "perang posisi" bersangkutan dengan teorinya tentang mekanisme-mekanisme kekuasaan ideologis dalam masyarakat kapitalis.

Revolusi Rusia pada 1917 dianggap Gramsci sebagai suatu "perang manuver", yaitu sebuah "perang gerakan" dalam suatu masyarakat dengan berbagai institusi dan organisasi yang memiliki tingkat perkembangan rendah yang ditemukan dalam masyarakat sipil di negara-negara Eropa Timur, terutama di Inggris dan Perancis (Robert Bocoock, 2007: 24).

Gramsci beragumen bahwa negara Rusia dapat dikuasai oleh suatu serangan yang terus menerus terhadap ibukotanya, Saint Petersburg, dengan cara yang tidak mungkin dilakukan di Eropa Barat. Masyarakat sipil hampir tidak eksis di Rusia, khususnya pada periode perang dunia pertama. Begitu kekuasaan direbut oleh Bolshevik, mereka berusaha mempertahankan posisi mereka dengan menggunakan kekuatan-kekuatan koersif negara terhadap unsur-unsur aristokratik dan borjuis yang berusaha menumpas revolusi tersebut, baik di dalam Rusia maupun di luarnya. Hal itu dilakukan dengan cara memberlakukan perubahan-perubahan dalam pendidikan, di tempat kerja dan di pers. Proses ini adalah usaha untuk membangun hegemoni kaum proletar dalam sistem baru tersebut.

Gramsci lebih maju dibandingkan dengan Lenin karena ia mengembangkan suatu strategi untuk digunakan dalam masyarakat-masyarakat Eropa Barat, berdasarkan pembedaan yang ia buat di antara "perang gerakan"

yang dapat dilakukan di Rusia pada 1917 dan yang berdasar pada serangan langsung terhadap negara, dan perang posisi yang dapat diterapkan di Eropa Barat. Tujuan dari perang posisi tersebut adalah mencapai hegemoni bagi kaum proletar dalam masyarakat sipil sebelum perebutan kekuasaan negara oleh partai Komunis.

Kaum penguasa tidak hanya berkuasa melalui alat-alat represif (polisi, tentara, pengadilan). Sebenarnya alat-alat itu hanya bergerak dalam keadaan luar biasa, seperti kriminalitas, kerusuhan, demonstrasi atau pemberontakan. Sedangkan seorang buruh biasanya masuk tempat kerja setiap hari, menurut undang-undang yang ada, bahkan sering menghormati kaum penguasa kurang-lebih tanpa paksaan langsung.

Dia dipaksa oleh kebutuhan ekonomis, tetapi juga menerima ide-ide mendasar dari tatanan sosial yang ada, sehingga mematuhi undang-undangnya secara "sukarela". Gramsci mengembangkan sebuah analisis yang canggih tentang mekanisme-mekanisme "hegemonis" ini, yang memang lebih halus dan efektif di negeri-negeri maju. Sehingga "perang posisi" bisa saja berjalan selama bertahun-tahun.

Bagi Lenin, hegemoni terutama pada dipahami dalam pengertian aliansi antar kelas atau kelompok kelas. Gramsci menambahkan dimensi baru yang sangat penting dengan mengajukan konsep tentang nasional kerakyatan, suatu kelas tidak bisa meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya membatasi pada kepentingan mereka sendiri, mereka harus memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yakni yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi.

Hegemoni adalah suatu bentuk pengungkungan terhadap obyek tertentu dan terlembaga (Nezar Patria & Andi Arief, 2003: 140). Dan dalam hal hegemoni yang ditinjau dari hubungan antara Negara dan masyarakat sipil, Gramsci membagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, hegemoni yang menyangkut kebudayaan dan kepemimpinan moral, yang di laksanakan dalam masyarakat sipil. Contohnya, adalah demokrasi borjuis barat dan bentuk demokrasi parlementernya, hegemoni

dalam kasus ini berperan dalam membujuk klas pekerja untuk memilih wakil parlemen secara sukarela.

*Kedua*, hegemoni yang di gerakkan dalam Negara sebagaimana halnya yang digerakkan dalam masyarakat sipil. Pada titik ini, Gramsci melihat pentingnya peran pendidikan dan lembaga-lembaga hukum dalam menjalankan hegemoni. *Ketiga*, perbedaan antara negara dan masyarakat sipil dihilangkan secara bersamaan, atau dengan kata lain, mendefinisikan negara sebagai masyarakat politik ditambah masyarakat sipil.

Mempertahankan hegemoni setelah kekuasaan negara diperoleh juga menjadi salah satu bagian yang menjadi perhatian utama Gramsci. Sebagaimana yang dikatakan Gramsci, bahkan suatu kelompok sosial telah menjadi dominan dan mempertahankan dengan gigih kekuasaan yang ada dalam genggamannya dan mereka tetap harus terus “memimpin”. Hegemoni tidak pernah dapat diperoleh begitu saja, tetapi harus diperjuangkan terus menerus. Hal ini menuntut kegigihan untuk mempertahankan dan memperkuat otoritas sosial dari kelas yang berkuasa dalam semua kelompok masyarakat sipil, dan pembuatan kompromi-kompromi yang diperlukan untuk menyesuaikan sistem aliansi yang ada dengan kondisi yang senantiasa berubah serta aktivitas kekuatan oposisi (Roger Simon, 2000: 45-46).

Proses ini dapat dilihat secara jelas pada periode ketika hegemoni dan kekuatan politik yang memerintah sedang terancam dan mengalami perpecahan. Kemungkinan terdapat suatu periode ketidakstabilan dan transisi yang sangat panjang, sehingga sistem aliansi yang menjadi dasar hegemoni dari kelompok yang berkuasa harus melakukan perubahan-perubahan yang berskala luas dalam suatu proses restrukturisasi jika hegemoni itu hendak dipertahankan. Gramsci menegaskan pentingnya pembedaan antara perubahan-perubahan organik yang relatif permanen dengan perubahan yang bersifat sementara, langsung dan kebetulan:

*“kadang-kadang krisis terjadi selama beberapa puluh tahun. Jangka waktu yang sangat panjang ini menunjukkan bahwa kontradiksi struktural yang tak bisa didamaikan telah menunjukkan mereka (mencapai kematangan) dan bahwa, terlepas dari itu, kekuatan-kekuatan politik yang sedang berjuang untuk melestarikan dan melindungi struktur yang ada berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkannya dan dalam batas*

*tertentu, menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi itu. Berbagai usaha yang gigih dan tidak mengenal lelah ini....membentuk jalur “penghubung” dan diatas jalur inilah kekuatan oposisi di organisir (Gramsci, 1971: 178).*

Istilah penghubung (*conjuncture*) digunakan lebih luas di benua eropa daripada di inggris. Ini adalah istilah yang digunakan Lenin untuk menyebut “situasi masa kini” atau keseimbangan antara kekuatan politik yang ada pada masa kini yang kepadanya taktik politik harus diterapkan. Apa yang ingin ditekankan Gramsci adalah bahwa situasi sekarang harus dipahami, bukan hanya dari segi problem-problem ekonomi dan politik jangka pendek, melainkan juga dalam pengertian “usaha-usaha yang gigih dan tak kenal lelah” yang dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan sistem yang ada. Jika krisisnya parah (krisis organik) usaha-usaha ini tidak hanya cukup berupa pertahanan semata.

Usaha-usaha ini harus mencangkup perjuangan untuk menciptakan keseimbangan baru dari berbagai kekuatan politik, dan menuntut pembentukan kembali lembaga-lembaga negara seperti halnya pembentukan ideologi-ideologi baru. Jika kekuatan oposisi tidak cukup kuat untuk menggeser keseimbangan berbagai kekuatan dalam perjuangan mereka, maka kekuatan konservatif akan berhasil membangun sistem aliansi baru yang akan memperkokoh kembali hegemoni mereka. Dengan kejadian sehari-hari, perubahan struktural yang organik dan relatif permanen pasti akan berlangsung (Roger Simon, 2000: 47).

Kesimpulan yang diambil dari Gramsci dari penjelasan ini adalah bentuk sosial selalu mempunyai kemungkinan kecil dalam perkembangannya dan perbaikan organisasi pada masa berikutnya, dan terutama mereka hanya mengandalkan kelemahan relatif dari kekuatan progresif lawan sebagai akibat dari sifat khusus dan falsafah hidupnya. Adalah perlu bagi kekuatan sosial yang dominan untuk memelihara kelemahan ini (Gramsci, 1971: 222).

## **2.7 Kesimpulan**

Bisa kita teliti dari berbagai pemikirannya, hampir sama dengan konsep Karl Marx tetapi Gramsci titik tekannya pada superstrukturnya (tingkat kesadaran pola pikir) yang mana, ini dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan belaka. Menurutnnya, hal ini yang paling rentan dan membahayakan karena masyarakat



tidak akan sadar dengan apa yang ada di sekitarnya. Jika ini sudah terjadi maka, bersiaplah untuk menjadi boneka-boneka yang tidak pernah tahu akan keadaan sekitar dan bersiap untuk dijadikan bahan lelucon oleh mereka yang bisa melakukan konsep hegemoni.

Pemikiran hegemoni Gramsci memang selalu berkuat pada konteks negara bangsa. Namun, hal tersebut bukan berarti pemikiran hegemoni tersebut tidak bisa di tarik dalam konteks hubungan internasional. Justru upaya kontekstualisasi sangat dibutuhkan demi perkembangan konsep itu sendiri dan tetap menjaga agar tetap hidup dan relevan selaras keadaan zaman.

Konsep hegemoni dapat diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi, termasuk relasi hegemoni dalam konteks global. Pemikiran Gramsci tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan relasi hegemoni antara AS sebagai "pemimpin dunia" dengan negara-negara lain dalam hubungan internasional. Dengan konsep hegemoni ini, kita dapat membedah adanya fenomena ketidaksadaran terhadap penyetujuan AS sebagai pemimpin dunia.

## BAB 3

### DOLAR SEBAGAI ALAT HEGEMONI

#### 3.1 Pengantar

Bagi para ahli strategi Amerika, era globalisasi adalah sebuah dekade yang relatif mudah. Ekonomi dan militer AS begitu kuat dan telah menghasilkan sebuah struktur internasional satu kutub (*unipolar*) yang pada akhirnya memberikan fondasi siap pakai bagi stabilitas global. Hirarki dan tatanan telah berkembang secara alamiah karena perbedaan kekuatan sehingga membuat pemetaan lanskap internasional yang baru dan formulasi strategi besar yang baru jadi kurang penting (Samuel P. Huntington, et.al., 2005: 251).

Amerika telah menjadi negara yang mempengaruhi nasib bangsa lain di muka bumi ini. Struktur politik *unipolar* telah menempatkan AS sebagai satu-satunya negara yang berdiri di puncak kepemimpinan ekonomi politik global. Dengan kekuasaan dan pengaruhnya, negara adidaya tersebut dengan leluasa mengatur dan mempengaruhi segala aspek kehidupan bangsa lain. Ekonomi, politik, budaya, semuanya tak ada yang luput dari pengaruh negeri Paman Sam. Proses hegemoni dan dominasi pun akhirnya bekerja dengan efektif.

Amerika melancarkan praktek dominasi mulai saat perang dunia berlangsung. Namun, selama perang dingin, fokus AS beralih kepada cara hegemonik dimana ia mulai mempengaruhi banyak negara dengan bantuan-bantuan ekonominya dan mengendalikan lembaga-lembaga keuangan internasional sesuai dengan kepentingannya. Perlahan-lahan pula AS menggunakan Dolar sebagai senjata mengendalikan arah dinamika ekonomi internasional.

#### 3.2 Hegemoni Amerika Serikat

Pada tahun 1941 majalah *life* mengumumkan “abad amerika” (Henry R. Luce, 1941: 61-65). Amerika Serikat muncul dari perang dunia II dengan kemenangan pasukannya dan juga Dolar yang mantap. Ahli sejarah Arnold Toynbee mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menggantikan Inggris sebagai pemimpin dunia (William McNeill, 1988: 23). Presiden Truman menerima

tantangan itu pada tahun 1947, ketika Amerika Serikat menggantikan Inggris yang kekuatannya semakin menyusut untuk membantu Yunani dan Turki.

Pada pertengahan tahun 1960-an, wakil menteri luar negeri, Eugene Rostov (1967) mengatakan bahwa Amerika Serikat sekarang memegang peran sebagai pemimpin polisi bagi dunia bebas untuk selama kira-kira dua puluh tahun. Tugas tersebut memerlukan pelaksanaan diplomasi dan militer dalam serangkaian konflik yang panjang dari Iran, Lebanon, Turki, dan Yunani hingga Berlin, Korea, Kuba, dan Vietnam” (hal 992).

Pada waktu yang sama, profesor dari Harvard, Samuel Huntington (1967) mengatakan bahwa segi yang dominan mengenai politik internasional sepanjang tiga puluh tahun sesudah perang dunia II merupakan ekspansi kekuasaan Amerika (hlm 927). Artinya, tiga puluh tahun sesudah perang dunia II, sejarah dunia akan berisi sepak terjang AS dalam upaya mendominasi dan hegemoni dunia. Berbekal status sebagai negara pemenang perang, AS lalu kian semakin percaya diri dalam upaya melancarkan praktek hegemoninya.

### **3.2.1 Perjalanan AS menjadi Hegemon**

Perang dunia II menghasilkan dua kesepakatan pasca perang. Pertama, reaksi atas menurunnya hubungan dengan Uni Soviet, telah mengantarkan pada tatanan *containment* yang didasarkan pada perimbangan kekuatan, penangkalan nuklir, serta persaingan ideologi dan politik. Kedua, reaksi atas persaingan ekonomi dan kekacauan politik 1930-an serta perang dunia yang disebabkan, bisa disebut sebagai kelahiran tatanan demokrasi liberal.

Hal ini memuncak pada munculnya serangkaian lembaga-lembaga baru dari hubungan antara negara-negara demokrasi industri barat yang didasarkan pada keterbukaan ekonomi, ketergantungan politik dan manajemen multilateral sistem politik liberal yang dipimpin Amerika. Berbagai visi politik dan pendapat intelektual menyemarakkan kedua kesepakatan itu dan pada momen-momen penting presiden Amerika memberikan komentar mengenai keduanya.

Pada tanggal 12 maret 1947, presiden Trauman menyampaikan pidato dihadapan kongres mengumumkan bantuan kepada Yunani dan Turki yang

dibungkus komitmen Amerika untuk memberikan dukungan gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Deklarasi Doktrin Trauman merupakan tonggak dimulainya tatanan *containment* yang menyatukan warga Amerika menuju sebuah perjuangan besar baru, kali ini melawan hasrat Soviet komunis untuk mendominasi dunia. Truman berkata bahwa saat-saat yang menentukan telah tiba, dan warga dunia harus memilih antara dua jalan hidup. Ia mengingatkan bila AS gagal menjalankan kepemimpinan, “kita mungkin membahayakan perdamaian dunia” (Samuel P. Huntington, et.al., 2005: 152).

AS pun lalu memulai sepak terjangnya dengan mulai memberikan bantuan kepada negara-negara lain dengan dalih tanggung jawab sebagai pemimpin dunia. Tak hanya memberikan bantuan ekonomi, militer AS pun mulai masuk ke negara-negara lain dan menebarkan teror peperangan, lagi-lagi dengan alasan sebagai pemimpin perdamaian dunia. Pasukan tempur negara adidaya tersebut dengan gagahnya terjun dalam kancah konflik regional di wilayah-wilayah yang notabenejanya jauh dari lingkaran kekuasaannya.

Hebatnya, meskipun pasukan militer AS sangat aktif, ongkos manusia dan ekonomi dari segala kegiatan militer tersebut ternyata sangatlah rendah. Korban jiwa dalam perang teluk persia 1991 jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan. Angkatan udara AS yang telah berpatroli di zona larangan terbang di Irak dan melakukan serangan bom sporadis di sana selama hampir selama sepuluh tahun, tak kehilangan satu pesawatnya pun. Campur tangan AS berikutnya di Haiti, Somalia, Bosnia dan Kosovo mendatangkan korban jiwa tak lebih dari 50 orang AS. Catatan ini merupakan pencapaian militer yang mengesankan, namun hal ini memperkuat keyakinan bahwa AS bisa memerintah dunia tanpa terlalu banyak mengorbankan pasukannya diluar negeri (Samuel P. Huntington, et.al., 2005: 371).

Sejak awal 1990-an, para pemimpin AS telah bersikap seolah-olah AS bisa mengejar sasaran-sasaran kebijakan luar negeri yang ambisius tanpa harus membuat pengorbanan yang signifikan. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah (1) Meluaskan aliansi inti yang diciptakan selama perang dunia; (2) Menggelar perang singkat namun intens untuk membebaskan Kuwait setelah invasi Irak pada agustus 1990. (3) Memaksa Irak mau bekerja sama dengan

pengawas senjata PBB dengan cara gabungan sanksi ekonomi dan pengeboman, (4) Campur tangan dalam perang saudara di Haiti, Bosnia, Kosovo, dan Somalia.; (5) Mencoba menjadi penengah kesepakatan perdamaian final antara Israel dan Palestina dan (6) mencoba membangun sebuah ekonomi dunia yang lebih liberal dengan pembentukan organisasi dagang dunia dan perundingan asosiasi perdagangan bebas amerika utara.

Lembaga-lembaga internasional pun tak luput menjadi sasaran AS dalam menjalankan ambisinya, diantaranya adalah PBB. Pada kenyataannya PBB adalah organisasi internasional yang dipergunakan oleh lima anggota tetap dewan keamanannya sebagai alat perluasan kebijakan luar negeri mereka, termasuk AS. Hukum internasional sendiri pada kenyataannya tidaklah eksis, yang ada hanya norma-norma internasional. Sebab, jika kita ingin mengatakan bahwa hukum internasional eksis, maka penyelenggaraannya di tingkat global atau tingkat supranasional harus memungkinkan. Alhasil, kita hanya bisa melihat negara-bangsa tersebut sebagai pihak yang akan mencemooh aturan-aturan lembaga internasional ketika mereka memiliki power dan tidak sesuai dengan kepentingannya. Itulah yang terjadi pada Amerika.

Peta kekuasaan dunia memang telah berubah dengan runtuhnya Super Power Uni Soviet. Akibat paling kentara adalah berakhirnya perang dingin yang berkepanjangan antara blok Barat dan blok Timur yang selama ini menghantui dunia dan telah menimbulkan berbagai bentuk krisis. Kemungkinan perang nuklir yang menakutkan dunia tidak mungkin akan terjadi, karena pada hakikatnya kini Rusia sebagai pewaris persenjataan Uni Soviet telah bertekuk lutut pada kekuatan Barat dan mengikuti segala perintahnya.

Amerika dan sekutu-sekutu Baratnya telah merayakan kemenangan yang mereka nantikan selama ini. Penantian panjang mereka telah berakhir dengan kemenangan yang akan menobatkan mereka sebagai pengontrol dunia. Bersamaan dengan itu Amerika pun memproklamasikan dirinya sebagai satu-satunya Super Power dunia sekaligus sebagai Polisi dunia dengan mengemukakan konsep "*The New World Order*" (Orde Baru Dunia ) yang dicita-citakannya.

### 3.2.2 Hegemoni melalui sistem kapitalisme finansial

Ekonomi dunia kini lebih banyak ditentukan dinamika sektor finansial ketimbang sektor riil. Hegemoni sektor finansial kian merasuki tata ekonomi global. Fluktuasi ekonomi tak lagi ditentukan oleh kegiatan produksi riil, tetapi oleh gejolak sektor finansial. Rasanya, ekonomi telah bermetamorfosis menjadi entitas semu akibat proses "*finansialisasi*".

Sebelum krisis finansial di AS tahun 1929, ekonomi global sudah mengarah ke ekonomi liberal. Namun, krisis 1929 (*malaise*) telah mengubah pendulum ekonomi menuju "kompromi Keynesian". Artinya, pada masa itu dalil yang diakui paling ampuh memecahkan masalah ekonomi adalah menggunakan berbagai intervensi negara. Titik balik kembali terjadi saat negara-negara mengalami krisis, dipicu krisis minyak pada 1970-1980-an. Saat itu ekonomi bergerak ke arah ekonomi "neo-liberal". Di era inilah pasar finansial berkembang, eksistensinya mendominasi dinamika ekonomi seperti sekarang.

Kapitalisme kini memang telah menjadi faham ekonomi yang diterima dan dijalankan oleh hampir semua negara di dunia. Kapitalisme menjadi arah pijakan dalam membangun dan mengatur tatanan ekonomi dunia. Hampir semua masyarakat dunia menerima kapitalisme sebagai sebuah bentuk konsep ekonomi yang ideal. Maka kapitalisme pun menjadi hegemonik, yakni kapitalisme menjadi terlihat "alamiah" atau 'normal' bagi kebanyakan orang (Simon Tormey, 2005: 1). Hal ini diperkuat oleh dukungan lembaga-lembaga internasional seperti yang dijabarkan diatas. Lembaga-lembaga seperti IMF, World Bank atau *the Fed* tak ubahnya seperti mesin raksasa yang menjalankan kapitalisme.

Kapitalisme menjadi kata yang amat populer pada zaman ini. Banyak sekali definisi mengenai kapitalisme yang dikeluarkan oleh banyak ahli ekonomi. Namun, terdapat sebuah titik temu dimana tujuan dari kapitalisme menjadi inti dari gagasan konsep kapitalisme itu sendiri. Tujuan utama kapitalisme pada akhirnya adalah untuk mendapatkan laba atau uang ((Simon Tormey, 2005: 6). Kapital menjadi kunci dari sistem ekonomi kini telah menghegemoni dunia tersebut. Uang dan keuntungan, menjadi tujuan dari semua orang, semua negara, tak terkecuali AS.

Kapital telah menjadi barang rebutan oleh berbagai negara. Akhirnya kapital memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi global saat ini. Pergerakan kapital pun menemukan inovasinya dimana dunia virtual menjadi media sirkulasi yang efektif dan memudahkan semua orang untuk memainkan kapital yang ada. Inilah awal dari virtualisasi ekonomi, dimana ekonomi telah melampaui batas kemungkinannya dan akhirnya dikuasai oleh hasrat perputaran kapital itu sendiri. Kapital berkembang ke arah tingkat ekstrim, ke arah titik dimana ia tidak menemukan tujuannya lagi (Yasraf Amir Pilliang, 2004: 129).

Kapitalisme pun kemudian menemukan berbagai bentuk turunannya. Ada berbagai macam bentuk kapitalisme dimana salah satunya adalah kapitalisme keuangan. Kapitalisme Keuangan (*Financial Capitalism*) merupakan bentuk inovasi terbaru dari kapitalisme. Dalam Kapitalisme Keuangan, modal diinvestasikan bukan hanya ke dalam bentuk barang, tenaga kerja, atau pabrik. Uang diinvestasikan ke dalam selisih uang. Dan inilah bentuk kapitalisme yang modern, mutakhir dan mampu mengubah arah keuangan dunia dalam waktu sekejap.

Komoditas produksi kapitalisme keuangan adalah saham dan nilai tukar uang (valuta). Pasar dalam kegiatan kapitalisme keuangan adalah "bursa efek." Kapitalisme Keuangan inilah yang kerap menciptakan devaluasi (penurunan) nilai mata uang dunia. Inilah yang kemudian menyebabkan mata uang menjadi sesuatu yang sensitif dimana fluktuasi nilainya sangat mudah dipengaruhi oleh pemilik kapital yang paling besar.

Arus finansial global pun kini menjadi bergerak semakin "liar". Padahal, tidak semua negara memiliki daya saing dan daya tahan yang cukup untuk terlibat langsung dalam kancah lalu-lintas finansial global. Arus finansial tersebut tak lagi mengenal batas-batas teritorial negara dan cenderung semakin sulit untuk dikontrol oleh pemerintah sebuah negara yang berdaulat. Negara-negara lemah kemudian menjadi santapan empuk bagi negara-negara kuat hingga akhirnya menciptakan relasi hegemoni.

Amerika muncul sebagai negara adidaya yang memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi arus pergerakan finansial global. Sedikit saja negara tersebut bermasalah, maka goncanglah perekonomian dunia. Hingga pada satu

titik dimana negara-negara lemah tak mampu menahan imbasnya. Inilah salah satu bentuk contoh dimana negara adidaya tersebut mampu mempengaruhi hidup matinya sebuah negara. Maka dengan demikian terbentuklah relasi hegemoni dimana AS menjadi penghegemon dan negara-negara lemah tersebut menjadi negara yang terhegemoni.

Sebenarnya, sudah sekian lama para pemikir mengkhawatirkan bahwa globalisasi ekonomi atau kapitalisme akan memunculkan suatu bentuk eksploitasi baru, yaitu eksploitasi oleh *financial-driven economies* terhadap *good-producing economies*. Kelompok pertama memiliki keleluasaan yang sangat besar dalam merelaya bentuk-bentuk transaksi keuangan yang sifatnya "semu". Artinya, transaksi yang mereka lakukan sebenarnya tidak memberikan kontribusi produktif bagi peningkatan kesejahteraan riil masyarakat. Ini semua terjadi karena "uang" dan "aset finansial" lainnya saling diperdagangkan sebagaimana halnya sebuah komoditas (Michel Chossudovsky, 1997: 332).

Inilah yang terjadi saat ini. Amerika menjadi "pemain semu" transaksi keuangan dunia yang sangat aktif dan dominan. Amerika menjadi penggiat transaksi finansial semu dengan menjadikan Dolar sebagai komoditas dengan berbagai turunannya. Pergerakan ekonomi Amerika yang dibangun pada fondasi kapitalisme finansial mampu menjadi penentu bagi keadaan perekonomian negara lainnya.

Banyak ahli ekonomi yang sudah mengkhawatirkan bentuk transaksi perekonomian komoditas turunan dari uang, namun IMF sebagai lembaga keuangan internasional malah memupuk sistem transaksi tersebut dengan alasan menghindari ketidakstabilan sistem finansial global. Transaksi finansial yang tak berpijak pada sektor riil tersebutlah yang kemudian terbukti melahirkan krisis finansial global pada akhir tahun 2008 yang lalu. Bermula dari hancurnya sistem keuangan Amerika Serikat, krisis finansial kemudian menjalar hingga dalam skala global.

Jika dikaitkan dengan konsep hegemoni, maka keadaan ini menjadi sebuah relasi hegemonik baru dimana Amerika sebagai pemilik kapital yang besar mampu mempengaruhi negara-negara dengan kapital yang kecil. Hegemoni memang berkaitan dengan ideologi yang memiliki cakupan melebihi semua



bidang sosial, budaya, dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Hegemoni adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan wawasan dunia yang bertujuan membekukan dominasi suatu kelas ekonomi terhadap kelas yang lain.

Dalam konteks inilah, gagasan Gramsci tentang hegemoni budaya memiliki pengaruh yang sangat besar dewasa ini. Problematika yang diidentifikasi Gramsci adalah dominasi mutlak kapitalisme sebagai suatu sistem sosial dalam masyarakat yang gagal mengatasi berbagai permasalahan mendasar dalam hal ketidakseimbangan politik, ekonomi dan sosial. Hanya saja kita perlu menarik pemikirannya dalam konteks global agar lebih sesuai untuk menjelaskan relasi hegemoni dalam tataran global dimana AS menjadi salah satu pelakunya.

Penerapan kebijakan ekonomi dalam tatanan kerjasama ekonomi global sangatlah dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi negara hegemon. Jika kita mengkaitkan dengan teori hegemoni Antonio Gramsci, maka kita akan menemukan sebuah blok historis, sebuah kesatuan yang dibentuk oleh kekuatan kelas hegemon di bidang kekuatan sosial sipil dan bidang produksi.

Sebuah kelas yang ingin maju sebagai kekuatan hegemon harus menguasai kepemimpinan bidang produksi atau bisa juga disebut ekonomi. Meskipun Gramsci menganalisa di level nasional, pemikiran Gramsci juga dapat diterapkan dalam level internasional. Di era post-war, Amerika Serikat sebagai pemenang perang yang tidak mengalami kerusakan di dalam negerinya, tampil sebagai sebuah kekuatan hegemon dengan kekuatan finansial, politik, dan militernya. Perlahan namun pasti, Amerika meraih penguasaan atas kepemimpinan di bidang ekonomi.

Sebagai kekuatan hegemon, AS juga berusaha untuk menguasai ekonomi dunia dengan mengeksport berbagai kebijakan ekonominya ke negara lain dan menjadi pemberi kredit bagi negara-negara Eropa dan negara bekas kolonial. Negara tersebut mengajukan berbagai pandangan dan konsep ekonomi yang diklaim sebagai gagasan ideal untuk menciptakan tatanan ekonomi dunia yang baik. Inilah bentuk lain aplikasi intelektual-intelektual organik yang dikemukakan oleh Gramsci. Intelektual organik itu pula yang turut melancarkan praktek hegemonik AS (Gramsci, 1971: Hal 1).

Kaum intelektual, menyediakan basis pengetahuan bagi aktivitas kekuatan hegemon atau bisa disebut sebagai intelektual organik. Intelektual organik bisa berarti sekelompok orang yang dekat atau bisa jadi pelaksana kekuasaan itu sendiri. Pemikiran Gramsci ini dalam beberapa hal sangat mirip dengan konsep komunitas epistemik. Amerika sebagai negara yang memiliki komunitas epistemik yang kuat mampu melahirkan konsep-konsep segar dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kontekstual, termasuk permasalahan-permasalahan ekonomi.

Komunitas epistemik sedikit banyak juga turut mempengaruhi lahirnya Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik. Maka tepatlah jika dikatakan intelektual-intelektual yang mempengaruhi AS dalam perannya sebagai sebuah negara hegemon akan juga mempengaruhi tatanan ekonomi global. Segala perubahan konfigurasi ekonomi di AS akan berpengaruh pada perubahan konfigurasi ekonomi global. Disinilah konsep intelektual organik dari Gramsci mendapatkan relevansi kontekstualnya.

Melalui konsep kapitalisme finansial yang dilahirkan intelektual organiknya, Amerika sekali lagi telah berhasil meraih kepemimpinan moral dan intelektual dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, melalui kapitalisme finansial yang digulirkannya, Amerika telah berhasil membuat relasi hegemonik dimana ia menjadi pusat dan negara lain menjadi subordinatnya. Sebagai pemilik modal terbesar, Amerika mampu “memainkan” kapitalisme finansial tanpa ada hambatan yang berarti.

Pemaparan mengenai hegemoni AS dalam kancah politik global seperti yang diuraikan di atas amat sesuai dengan konsep realis dalam hubungan internasional. Hegemoni AS tak lain merupakan sebuah bentuk perpanjangan kebijakan luar negeri AS yang sejatinya merupakan upaya AS mencari keuntungan bagi negerinya sendiri. Dalam perspektif Realis hal ini dinilai wajar, mengingat semua negara pada akhirnya harus berjuang untuk mencapai tujuannya sendiri, meskipun terkadang merugikan negara lain.

Poin utama dalam memahami realisme adalah paham ini menilai hubungan antarnegara berdasarkan sistem internasional yang bersifat anarki. Sistem yang anarki tersebut pada gilirannya melahirkan perlombaan dalam peningkatan

kekuatan bersenjata demi mencapai kekuasaan politik di dunia. Sehingga, perang pun menjadi suatu yang niscaya terjadi dalam hubungan internasional.

Perspektif Realisme lahir dari kegagalan membendung Perang Dunia I dan II. Aliran ini semakin kuat setelah Perang Dunia II, terutama di Amerika Serikat. Pacuan senjata yang marak ketika perang dingin semakin mengukuhkan perspektif Realisme. Pandangan-pandangan yang jadi fondasi aliran ini posisinya berseberangan dengan mereka yang menganut idealisme. Misalnya, perspektif ini berkeyakinan bahwa manusia itu jahat, berambisi untuk berkuasa, berperang dan tidak mau kerja sama.

Realisme Lahir sebagai tanggapan terhadap liberalisme yang pada intinya menyangkal bahwa negara-negara berusaha untuk bekerja sama. Para Realis awal seperti E.H. Carr, Daniel Bernhard, dan Hans Morgenthau berargumen bahwa untuk maksud meningkatkan keamanan mereka, negara-negara adalah aktor-aktor rasional yang berusaha mencari kekuasaan dan tertarik kepada kepentingan diri sendiri (*self-interested*). Setiap kerja sama antara negara-negara dijelaskan sebagai benar-benar insidental.

Para realis melihat Perang Dunia II sebagai pembuktian terhadap teori mereka. Perlu diperhatikan bahwa para penulis klasik seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes sering disebut-sebut sebagai “bapak-bapak pendiri” realisme oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri sebagai Realis kontemporer. Namun, meskipun karya mereka dapat mendukung doktrin realis, ketiga orang tersebut tampaknya tidak mungkin menggolongkan diri mereka sendiri sebagai realis.

Perspektif Realis memiliki dua penekanan utama. Pertama, adanya pemaksaan politis yang didasari oleh egoisme manusia. Kedua, yaitu tidak adanya pemerintahan internasional yang menyebabkan anarki, sehingga kemudian membutuhkan keunggulan *power* dan keamanan. Dalam konteks ini, kaum realis menggunakan keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara sebagai dasar normatif penyebaran doktrin dan pengambilan kebijakan luar negerinya (Gilpin, 1986: 305).

Dari pemaparan tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa sepak terjang hegemoni AS sangat sesuai dengan konsep Realis. Amerika menjalankan sepak

terjang dominasinya bukan untuk menciptakan tatanan dunia yang menguntungkan semua pihak, melainkan semata-mata demi mengamankan tujuan negerinya sendiri. Hal ini terbukti dengan kondisi dimana kebijakan-kebijakan AS yang dipaksakan kepada negara-negara lain tak mampu berkontribusi banyak dalam menaikkan kesejahteraan negara-negara tersebut. Maka tak berlebihan jika kita menyimpulkan bahwa hegemoni AS tak lain merupakan bentuk Neo Imprealisme modern yang seringkali mengorbankan kepentingan negara-negara lain.

Sistem hegemoni AS juga bisa ditinjau dari sudut pandang Marx dimana para Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital). Dengan demikian, periode kolonialisme membawa masuk pelbagai sumber daya untuk bahan-bahan mentah dan pasar-pasar yang pasti (*captive markets*) untuk ekspor, sementara dekolonisasi membawa masuk pelbagai kesempatan baru dalam bentuk dependensi (ketergantungan).

Dependensi kemudian menjadi amat relevan dengan konsep Marxis tersebut. Teori dependensi yang berargumen bahwa negara-negara maju, dalam usaha mereka untuk mencapai kekuasaan, menembus negara-negara berkembang lewat penasihat politik, misionaris, pakar, dan perusahaan multinasional untuk mengintegrasikan negara-negara berkembang tersebut ke dalam sistem kapitalis terintegrasi untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam dan meningkatkan dependensi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.

Teori dependensi adalah teori yang paling lazim dikaitkan dengan Marxisme, yang menyatakan bahwa seperangkat negara inti mengeksploitasi kekayaan sekelompok “negara pinggiran” yang lebih lemah. Pelbagai versi teori ini mengemukakan bahwa hal ini merupakan keadaan yang tidak terelakkan atau menggunakan teori tersebut untuk menekankan keharusan untuk berubah.

Singkatnya, bahwa teori dependensi ini adalah penetrasi asing dan ketergantungan eksternal yang menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi suatu negara yang pada akhirnya menimbulkan konflik sosial dan mendorong timbulnya penindasan negara yang kuat terhadap negara yang lemah.

### 3.3 Dolar Sebagai Ekspresi Hegemonik

Berakhirnya Perang Dingin membuat keprihatinan terhadap penyebaran komunisme tidak lagi beralasan. Sehingga AS bisa leluasa pada negara-negara yang lemah, termasuk pada negara-negara calon pesaingnya. Kegototan AS pada pembukaan ‘pasar’ sebagai syarat mendapatkan pinjaman baru menggemakan tuntutan pasca perangnya. Ia menuntut pemberlakuan konvertibilitas di Eropa dan Jepang tanpa memperdulikan keberatan yang muncul di negara-negara tersebut. Meskipun menghadapi perlawanan terutama dari Perancis di bawah Jenderal de Gaulle pada tahun 1960-an dan munculnya tuntutan tata internasional ekonomi baru dari negara-negara dunia ketiga pada tahun 1970-an, AS mampu memaksakan pemberlakuan liberalisasi perdagangan dan keuangan dunia. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, ia berhasil mendesakkan deregulasi keuangan global secara menyeluruh (William K. Tabb, 2003: 76).

#### 3.3.1 Perjalanan Dolar dari masa ke masa

Kalau ada atribut ekonomi yang tak bisa ditinggalkan, maka uang adalah jawabannya. Uang menjadi alat tukar praktis bagi barang dan kebutuhan yang diinginkan. Uang memainkan peran sentral dalam transaksi ekonomi, termasuk Dolar. Dolar pada era kapitalisme modern kini dikelompokkan sebagai uang kertas (*fiat money*), sama dengan uang-uang negara lainnya. Hanya saja, Dolar AS dan mayoritas mata uang negara maju dapat dikelompokkan dalam jenis *hard currency*, sedangkan yang lainnya adalah *soft currency*.

Pengertian mengenai *hard currency* di sini adalah suatu mata uang yang permintaannya kuat tetapi penawarannya sedikit di pasar valuta asing. Sedangkan *soft currency* berarti suatu mata uang yang berada dalam tingkat permintaan yang lemah, tetapi dalam tingkat penawaran yang berlebihan pada pasar nilai tukar mata uang asing. (Christopher Pass dan Bryan Lowes, 2005: 272, 610).

Perjalanan sejarah Dolar adalah perjalanan sistem ekonomi AS. Pada awalnya negara tersebut menggunakan Wumpun, sejenis kulit kerang yang berharga. Saat kolonialis berdatangan, mereka juga menggunakan wumpun sebagai alat perdagangan. Pada tahun 1664, Stuyvesant (seorang kolonialis) menyiapkan mata uang wumpun senilai 5000 guilders untuk membayar upah

pekerja yang membangun benteng di tengah kota New York (Lutfi Hamidi, 2003: 5-7).

Kemunculan uang koin dimulai saat kolonialis asal Inggris berdatangan. Mereka mengenalkan koin yang dibedakan nilainya dalam pounds, shilling, dan pence. Pada tahun 1637, di Massachusetts, wumpun setara dengan satu shilling. Di kota itu juga untuk pertama kalinya diperkenalkan uang kertas (notes) pada tahun 1690. Notes atau disebut juga lembar tagihan kredit (*bills of credit*) diterbitkan untuk membayar gaji para tentara yang pulang dari ekspedisi Quebec.

Dolar pertama kali diperkenalkan sebagai satuan pengukur nilai dalam satuan moneter AS sejak tahun 1792. Saat itu, Thomas Jefferson merekomendasikan Dolar sebagai pecahan dalam bentuk koin. Ia meniru sistem ini dari Spanyol yang sudah menggunakan sebelumnya. Berdasarkan Coinage Act tahun 1792, ditetapkanlah nilai dari Dolar setara dengan 371,25 grain (satuan ukur berat di Inggris) perak atau 24,75 grain emas. Akan tetapi nilai Dolar terhadap emas tidak dapat dipertahankan. AS beberapa kali melakukan perubahan nilai Dolar diantaranya pada tahun 1873 dimana Dolar tidak lagi dinilai dengan perak. Selain itu pada tahun 1934 terjadi devaluasi yang besar yang berakibat nilai Dolar merosok terhadap emas.

Uang koin dinilai cukup berat sehingga menyulitkan dan tidak praktis. Maka kemudian lahirlah uang kertas yang mewakili koin-koin emas dan perak yang ada. Sejak tahun 1934, perputaran uang kertas di seluruh AS (termasuk koin) tidak lagi mendapatkan jaminan. Hal ini berarti semua uang yang beredar tidak lagi mencerminkan atau mewakili suatu nilai dari emas ataupun perak. Saat itu peredaran uang kertas mulai ditentukan oleh daya beli masyarakat. Akibatnya, praktis tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran.

Dengan tidak adanya lagi jaminan, nilai dari seluruh pembayaran domestik di AS dibuat dengan menerbitkan cek dari bank-bank konvensional. Dengan sistem ini, *The Fed* hanya bertugas mengatur kestabilan Dolar berdasarkan daya beli yang ada. Bank sentral memfokuskan pada pengaturan jumlah uang yang beredar, sedangkan departemen keuangan mengelola kebijakan fiskal.

Dolar pernah jatuh bangun akibat ketidakstabilan nilainya. Misalnya pada tahun 1940-1980 dimana daya beli Dolar turun hingga tinggal seperlima. Pada

tahun 1950 -1980, inflasi juga meroket hingga 300 persen. Namun, Dolar tetap saja mendominasi ekonomi dunia dan menempatnya sebagai mata uang hegemon (Lutfi Hamidi, 2003: 8).

Mata uang Dolar AS berhasil menggantikan mata uang pondsterling Inggris sebagai mata uang de facto dunia yang telah berjaya sejak abad 19 hingga berakhirnya perang dunia. Dominannya Dolar dalam sistem moneter internasional kemudian dikenal dengan sistem Bretton Woods, dimana Dolar dijadikan sebagai mata uang standar. Setelah ditetapkan nilai tukarnya maka apabila terjadi fluktuasi nilai tukar lebih dari 1% harus dikonsultasikan bersama (Sunarto, 1992: 123).

Nilai kurs tetap ini dipertahankan dengan campur tangan bank sentral negara tersebut dalam pasar valuta asing. Campur tangan ini dilakukan dalam bentuk pembelian dan penjualan Dolar oleh bank sentral di luar AS terhadap mata uangnya sendiri apabila kondisi permintaan dan penawaran di pasar menyebabkan kurs menyimpang dari nilai paritas yang telah disepakati. IMF selalu membantu menyediakan valuta asing yang dibutuhkan negara anggotanya untuk mempertahankan mata uang mereka (Walter Jones, 1993: 296).

Setiap Dolar yang dibutuhkan oleh otoritas moneter dalam proses intervensi tersebut kemudian dapat ditukar dengan emas yang ada di departemen keuangan AS pada harga konstan US \$35 per onsnya. Singkatnya Dolar AS menjadi mata uang cadangan (*reserve currency*) yang utama, hampir semua bank sentral menyimpan cadangan internasionalnya dalam bentuk deposito Dolar atau surat hutang departemen keuangan AS (*US treasury bills*) (Mudrajat Kuncoro, 1996: 23-24).

### 3.3.2 Lahirnya Dolar sebagai mata uang hegemon

Uang telah menjadi pembahasan banyak pemikir sepanjang masa. Salah satu pemikir yang menganalisa uang adalah Karl Marx. Marx menganalisa uang dalam kaitan dengan kritiknya terhadap kapitalisme. Bagi dia, uang adalah simbol keterasingan manusia. Dia menelusuri akar uang hingga ke kultur materialistis Yahudi. Maka bagi Marx uang adalah 'allah' Israel yang pencemburu, yang tidak menghendaki 'allah' lain di sampingnya. Karena itu, bagi dia uang adalah bentuk paling sempurna dari proses pembendaan (reifikasi) semua hal. Uang

mengkuantifikasi semua nilai dan mengasingkan manusia dari ekisistensinya yang paling murni.

Lantaran merangkum semua hal dan menghubungkan semua pelaku sosial dan ekonomis, uang dianalogikan seperti energi yang menggerakkan alam semesta ini. Pada kenyataannya, uang memang menjadi energi yang menggerakkan dinamika kehidupan hampir dalam semua dimensi kehidupan.

Sebagai alat pengukur nilai, bentuk uang terus mengalami evolusi. Mulai dari bahan komoditas yang bernilai seperti koin emas menjadi bahan kertas yang tidak bernilai. Bisa dikatakan uang menjadi simbol nilai tetapi dalam dirinya dia sendiri sudah tak bernilai.

Nilai uang tidak lagi dari karakteristik fisiknya, tapi lebih didasarkan pada kesepakatan sosial antara anggota masyarakat yang menggunakannya dan juga pemerintah yang mengaturnya. Di hadapan uang, nilai barang dan jasa lepas dari pengaruh pemilikinya. Dia semakin impersonal dan abstrak. Interaksi sosial yang hanya melihat spesifikasi nilai barang itulah yang menjadi dasar dan sumber perhitungan yang rasional dalam kehidupan modern.

Uang sering didefinisikan sebagai alat pertukaran, alat pembayaran yang “sah” dengan mana terjadi transfer nilai dari satu pihak ke pihak lain. Satu pihak menyerahkan produk berupa barang atau jasa, pihak lain (yang membayar) menukar “nilai” produk itu dalam bentuk uang. Pertukaran “nilai” itu bisa juga dalam bentuk barter, namun sesuai dengan perkembangan dalam sejarah manusia, lambat laun manusia belajar bahwa ternyata hal tersebut tidak praktis. Ada proses pertukaran yang lebih praktik, yakni menggunakan uang.

Uang bermutu tinggi ialah uang yang amat dipercayai nilainya sebagai alat tukar. Sejak zaman kuno, peranan pemerintah merupakan salah satu penentu dari terpeliharanya mutu tinggi dari suatu jenis mata uang. Aristoteles, dianggap sebagai perintis teori tentang pengelolaan uang oleh pemerintah. Dalam karyanya yang berjudul “*Ethica Nichomachea*”, ia menulis: “*Money has become by convention ‘money’ (nomina)—because it is exists not only by nature but by law (nomos) and it is in our power to change it and make it useless*”. Nilai uang itu tidak ditentukan secara kodrati, melainkan ditentukan oleh hukum yang dibuat oleh manusia sendiri. Nilai nominal uang ditentukan oleh pemerintah, terlepas



dari nilai intrinsiknya. Hukum pemerintah (*nomos*) memberi nama (*nomina*) kepada uang (*nomisma*). *Nomos* memberi nomina kepada *nomisma*.

Kini, uang mengisyarakan adanya bentuk baru perbudakan dan penjajahan yang bersifat hegemonik. Uang telah menjadi tuan dan manusia menjadi budaknya. Gejala-gejala pemberhalaan uang dapat dijelaskan saat manusia tidak dapat mengendalikan materi dan justru dikendalikan materi. Proposisi ini sesuai dengan ketajaman pemikiran Marx yang bisa kita baca secara meyakinkan dalam Kapital (I-III), dimana ia membedah bagaimana nilai pakai komoditi menjadi uang, kemudian uang berubah menjadi kapital, dan kapital menjadi kapitalisme.

Setiap proses perubahan status uang menurut Marx tersebut, ternyata penuh dengan penindasan, mulai dari nilai pakai komoditi menjadi nilai tukar (setelah melewati waktu kerja), kemudian pekerja itu sendiri tak mendapatkan bayaran setimpal sesuai waktu yang dihabiskannya untuk berproduksi akibat diambil begitu saja sebagai nilai lebih oleh kaum pemilik alat produksi (kaum borjuis). Kelak, nilai lebih ini terus berakumulasi menjadi kapital, dan kapital ini pun berakumulasi pula yang nilainya diambil oleh para pemilik kapital, atau kaum kapitalis. Karl Marx pun membedah dengan tajam bagaimana sistem akumulasi tadi melahirkan kelas-kelas dalam masyarakat. Hal ini membuat Marx maju beberapa langkah, karena mampu memasukkan pisau bedah tinjauan ekonomi-politik ke dalam perut stratifikasi sosial masyarakat melampaui teori-teori sosiologi yang pernah ada sebelumnya di zamannya dulu.

Uang bisa juga menjadi “setan” yang baik. Uang adalah alat tukar, mengatasi barter, “kartu joker” yang berguna dalam setumpuk kartu ekonomi, yang tidak akan punah seperti halnya alat tukar kuno seperti hasil bumi dan ternak. Uang juga berlaku seperti alat petunjuk (indikator) dan alat pengatur (regulator). Akumulasi uang memungkinkan suatu negara atau sekelompok manusia melakukan sesuatu di luar batas kemampuan orang-seorang; membangun jembatan, mendirikan pabrik dan membangun museum (Willem Hoogendjik, 1996: 13).

Tetapi uang telah pula menjadi alat kekuasaan yang melampaui alat kekuasaan kuno seperti rantai budak, pemilikan tanah serta ternak, tentara maupun lumbung jagung (Willem Hoogendjik, 1996: 13). Pada akhirnya fungsi uang yang

pada awalnya sebagai alat tukar dan satuan hitung bertambah menjadi sebagai alat hegemoni kekuasaan. Uang menjelma menjadi elemen untuk menguasai manusia, kelompok atau bahkan negara lainnya. Uang menjadi simbol yang menandai status “si lemah” dan “si kuat”. Simbol itu kemudian diejawantahkan menjadi penguasaan atas si lemah atas si kuat.

Uang kini menjadi alat hegemoni. Tentang ekonomi, Aristoteles secara jelas telah meramalkan penyebab keadaan yang buruk saat ini. Ia membedakan antara ekonomi (*oikonomia*; produksi untuk kebutuhan dan pertukaran), perdagangan dan menghasilkan uang (*chrematistike*). Ia melihat bahwa perdagangan yang semata-mata mencari untung dan sistem bunga akan bermuara pada usaha mengejar uang yang tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa menghasilkan uang dari uang, yaitu mengumpulkan kekayaan semata-mata adalah hal yang paling bertentangan dengan alam (Willem Hoogendjik, 1996: 57).

Pada masa sekarang, sistem “uang harus menghasilkan lebih banyak uang lagi” (*chrematistike*) mengisyaratkan semacam *kediktatoran terselubung* yang tidak terkenal: suatu virus totaliterisme penyebab tumor produktivisme yang merusak bumi kita (Willem Hoogendjik, 1996: 60). Hal inilah yang terjadi dengan sistem kapitalisme finansial saat ini. Dolar yang telah melampaui fungsi asasi uang telah menjadi komodifikasi *hiperrealis* pada kenyataannya sukses menjadi elemen utama dalam sistem kapitalisme finansial. Pada akhirnya, sistem kapitalisme finansial tersebut mengantarkan Dolar sebagai alat hegemoni. Dolar dan hegemoni AS pun lalu menjadi sebuah pertautan rumit dalam proses dominasi ekonomi politik global.

Perang Dunia II di tahun 1945 disusul oleh hasil pertarungan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mendudukan Amerika Serikat sebagai pemenang dan adikuasa. Oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat gencar melakukan ekspansi ekonomi ke seluruh negara berkembang yang dipandang potensial sebagai daerah eksploitasi dan perluasan pasar.

Mengikuti pedoman Piagam PBB, AS berkoordinasi dengan negara-negara Eropa melalui persetujuan Bretton Woods yang dibentuk pada tahun 1944, pemerintah Amerika Serikat membentuk Bank Dunia sebagai salah satu perangkat untuk melancarkan strategi hegemoninya ini (Eric Toussaint, 2005: 89). Salah

satu hasil keputusan forum tersebut juga adalah penetapan Dolar sebagai alat mata uang internasional resmi yang dikaitkan dengan 1 Ounce/ 28,35 gram emas sebanding dengan 35 Dolar AS

Sejak saat itu Dolar resmi berdiri gagah sebagai mata uang hegemonik yang menguasai pasar global. Dolar kian memainkan peran penting sebagai alat hegemoni saat sistem *bretton woods* diakhiri yang melepaskan kaitan emas dengan Dolar. Sejak diakhiri secara sepihak oleh AS pada Agustus 1971, maka Dolar AS berubah menjadi *fiat money*. Dan mulai saat itulah Dolar kian memainkan peran pentingnya sebagai mata uang jangkar internasional.

Sebagai mata uang yang konvertibel serta kedudukannya istimewa dalam sistem *bretton woods*, Dolar merupakan mata uang kunci dalam perekonomian dunia pasca 1945. Karena sangat konvertibel, Dolar AS paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Para importir dan eksportir paling suka menggunakan Dolar AS dalam berbagai transaksi mereka. Oleh karena itu, Dolar AS menjadi mata uang internasional. Ia menjadi alat pembayaran, satuan hitung, sekaligus sebagai sarana penyimpan kekayaan yang universal.

Faktor lain yang menunjang keunggulan Dolar AS adalah kehebatan ekonomi AS yang besar dan tak tertandingi oleh perekonomian manapun yang kebanyakan lumpuh akibat perang: Eropa dan Jepang saat itu. Selain itu AS ditopang oleh kekuatan militernya yang tak tertandingi. Dolar AS sangat atraktif karena bisa digunakan untuk membeli berbagai macam barang dan jasa yang sangat dibutuhkan negara lain. Bank-bank sentral merasa untung bila memiliki aset yang dinilai dalam Dolar, karena selain mantap juga menghasilkan bunga, berbeda dengan emas yang tidak menghasilkan bunga.

Sistem moneter internasional yang dibentuk di Bretton Woods dapat dikatakan berjalan baik sampai tahun 1971 dengan menggunakan sistem standar emas dan Dolar. Hal ini berarti bahwa departemen keuangan AS setiap saat dapat menjual emasnya yang berlimpah kepada para pemegang mata uang Dolar AS. Dengan jalan membeli emas tersebut berarti pembeli baik perusahaan bahkan individu dari luar negeri berkesempatan menyimpan Dolar, dengan begitu mereka dapat mengimpor barang dan jasa dari mana saja.

Kepercayaan yang diberikan kepada AS untuk mendukung kelancaran sistem moneter internasional pernah mengalami gangguan yang disebabkan faktor-faktor eksternal dan internal ekonomi AS. Amerika terkena dampak negatif dari adanya krisis besar yang mengancam struktur ekonomi internasional pasca perang. AS juga mengalami defisit neraca perdagangannya dalam persaingannya dengan Eropa Barat dan Jepang. Selain itu AS juga mengalami defisit dalam neraca pembayarannya karena perang di Indochina (Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe, 1990: 341).

Di samping banyak faktor-faktor di atas banyak perusahaan multinasional AS mengalihkan sebagian besar investasi modal mereka ke Eropa, Asia, dan benua lainnya karena pertimbangan upah buruh yang murah. Bantuan luar negeri seperti pinjaman luar negeri untuk Yunani dan Turki dalam Trauman Doktrin dan Marshal Plan untuk Eropa serta bantuan AS untuk negara miskin dan biaya militer AS di luar negeri turut memperbanyak outflow Dolar AS ke luar negeri.

Antara tahun 1949 dan 1959 cadangan emas dan Dolar AS turun dari US\$26 milyar menjadi US\$22 milyar (Joen Edelman Spero, 1985: 37-41). Terjadinya defisit neraca pembayaran AS tersebut menyebabkan Dolar AS banyak mengalir ke Asia, khususnya ke Jepang. Kalau antara periode 1945-1950 dunia kekurangan Dolar AS (*Dolar shortage*) terutama untuk membiayai negara yang hancur karena perang, maka setelah itu dunia seakan kelebihan Dolar AS (*Dolar glut*). Fenomena inilah yang kemudian memunculkan *Euro-Dolar* dan *euro currency* dalam sistem moneter internasional (Nurjaman Arsyad, 1992: Hal 26-27).

Dengan terakumulasinya Dolar AS di tangan asing dalam jumlah yang lebih besar dari yang diperlukan untuk perdagangan dan investasi, bank-bank sentral dan pelaku bisnis mulai mengembalikannya ke perbendaharaan AS untuk ditukar dengan emas. Karena khawatir AS akan mendevalusi mata uangnya guna mengurangi defisit neraca pembayarannya dan akan merugikan mereka, maka pengguna Dolar tersebut berlomba-lomba menukarkan Dolar AS mereka dengan mata uang kuat lainnya seperti DM Jerman, Franc Swis, Yen Jepang saat itu atau menukarnya dengan emas (Donald A. Ball dan Mc Culloh H, 2000: 224-225).

Sejak tahun 1958 sampai 1971, AS mengalami defisit akumulatif sebesar US\$ 58 Milyar, defisit ini dibiayai sebagian dengan menggunakan cadangan emas di Fort Knox yang menyusut dari US\$ 24,8 Milyar menjadi US\$ 12,2 Milyar. Sebaliknya Dolar yang beredar di luar negeri, yaitu di Eropa dan bank sentral luar negeri mencapai US\$62,2 Milyar. Pada tahun 1960 angka berkurang hingga hanya sekitar US\$ 13,6 Milyar. Oleh karena stock emas yang tersedia di Fort Knox lebih kecil daripada Dolar yang ada di luar negeri maka sekalipun cadangan emasnya dijual keluar negeri, uang Dolar AS yang berada di luar negeri tetap tidak bisa di tarik semuanya (Federal Reserve Buletin 1969).

Menghadapi overflow yang tidak terkontrol dan inflasi domestik yang tidak menentu, pemerintah AS memberlakukan kebijakan unilateral (*new economic policy*) pada agustus 1971 dengan menunda konvertibilitas Dolar terhadap emas, dan presiden Nixon juga memberlakukan 10% biaya tambahan atas impor dari seluruh negara maju kecuali Kanada. Dengan ditanggungkannya konvertibilitas Dolar AS terhadap emas, sistem dasar pengaturan kurs tetap (*fixed rates*) dibawah sistem Bretton Woods berakhir. Banyak negara lain berhenti menetapkan kurs mata uangnya sesuai paritas resmi dan sebagai gantinya membiarkan mata uangnya ditentukan oleh pasar (*floating exchange rates*). Kendati batas fluktuasi kurs diperluas menjadi 2,25% namun Dolar tetap tidak konvertibel terhadap emas.

AS kemudian menaikkan harga emas untuk kedua kalinya menjadi US\$ 42 per ons, tetapi AS kembali tidak dapat membendung arus Dolar yang keluar dan bagi negara eropa sulit mempertahankan nilai tukar mata uangnya terhadap Dolar AS. Pada awal 1973 sebagian besar negara di eropa mengundurkan diri dan ikut serta dalam sistem kurs dibawah persetujuan Smithsonian dan membentuk sebuah mekanisme nilai tukar mata uang negara-negara eropa dalam EMS (*european monetary sistem*) (Fransisco Batis Rivera dan Luis Batis Rivera, 1989: 16).

Pada tahun 1998-2000, defisit neraca transaksi berjalan AS melocat skitar 100 Miliar Dolar pertahunnya dan hingga akhir 2000 mendekati 400 miliar Dolar hingga 600 miliar Dolar lebih pada tahun 2005, jumlah ini hampir 5% dari GDP AS pada tahun 1997 (IMF, World Economic Outlook, September 2005). Pada saat yang sama AS juga mengalami kemerosotan investasi. Akhir tahun 2000,

investasi internasional bersih AS mencapai negatif 1,583 triliun Dolar AS. Setahun kemudian membengkak hingga mencapai minus 2,309 triliun Dolar AS (US Bureau of Economic Analysis, 2000. Hal 45). Dengan besarnya defisit tersebut, muncul pertanyaan dari mana defisit tersebut dibiayai? Salah satu skenarionya adalah dengan mengangkat surplus perdagangan dengan cara membiarkan Dolar terdepresiasi.

Melemahnya Dolar akan membuat produk AS lebih murah dan kompetitif hingga akan menjadi insentif meningkatnya ekspor. Akan tetapi strategi ini seperti pisau bermata dua, disatu sisi membantu ekspor AS namun disisi lain akan mengancam AS sendiri. Jika investor mengetahui melemahnya nilai tukar Dolar ini akan berlanjut maka mereka akan menarik aset-aset mereka yang ada dalam Dolar dan menggantinya dengan mata uang sendiri atau mata uang asing yang lebih aman seperti euro.

Fenomena Dolarisasi (*Dolarisation*) atau penggunaan Dolar yang meluas dalam masyarakat inilah yang menggambarkan peran Dolar AS yang superior dalam sistem moneter internasional. Hampir semua rumah tangga, perusahaan dan pemerintah menggunakan Dolar sebagai medium transaksi, unit hitung (*unit of account*) dan penyimpanan nilai (*store of value*). Negara-negara di Amerika Latin juga di Asia, Africa dan negara-negara bekas COMECON menggunakan Dolar AS sebagai mata uang nasional mereka. Dominannya Dolar dalam sistem moneter dan keuangan internasional memunculkan istilah Dolarisasi, (*Dolarization*) sebagai sinonim proses substitusi mata uang (*currency substitution*) yaitu penggunaan secara sukarela mata uang lain (*foreign currency*) selain mata uang nasional sebagai legal tender (Henric Muller, 1999: 86).

Sebagai sebuah negara besar dan kaya AS mempunyai dua kekuatan yang tidak tertandingi oleh kekuatan manapun yaitu kekuatan militer dan Dolarnya. Sejak hancurnya komunisme dan Uni Soviet, AS merupakan satu-satunya kekuatan nuklir terbesar di dunia saat ini. Sedangkan dengan Dolarnya AS menikmati banyak keuntungan ekonomi yang tidak dimiliki oleh negara lain.

### 3.3.3 Bretton Woods Sebagai momen pembentukan Hegemoni

Sistem ekonomi di dalam sistem sosial merupakan sebuah sistem komunikasi yang beroperasi berdasarkan medium uang. Moneter, maka merupakan sebuah media simbolik, suatu hal yang abstrak. Reproduksi komunikasi ekonomi tergantung sepenuhnya pada kesuksesan uang sebagai media untuk terus merangsang manusia melakukan aktivitas ekonomi (dalam hal ini terus mempergunakan uang/melakukan pembayaran) walaupun hasilnya di masa depan tidak dapat dipastikan (risiko).

Dahulu kala manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kini manusia bekerja dengan pengharapan pekerjaannya akan menghasilkan pembayaran yang akan digunakan olehnya untuk melakukan pembayaran berikutnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara ini sebenarnya memiliki risiko yang sangat tinggi, dalam arti belum tentu pekerjaan yang dilakukannya akan menghasilkan pembayaran yang ia inginkan. Seperti telah disebutkan di atas, subsistem ekonomi terdiri dari berbagai entitas ekonomi yang berdiri sendiri, memiliki operasi sendiri, dan semuanya mengharapkan pembayaran. Semuanya sebenarnya menghendaki hal yang berbeda. Artinya di dalam kerangka sistem yang swareferensial, mereka memiliki cara pandang masing-masing atas lingkungannya.

Contoh sederhana dalam perekonomian ialah masa barter, di mana satu pihak harus mencari pihak lain yang menghendaki barang yang ia miliki dan memiliki barang yang ia inginkan. Moneter memecahkan masalah ini, dengan menciptakan media komunikasi uang hingga pertukaran dapat terjadi lebih efektif. Uang efektif dalam arti kemampuannya untuk dipisahkan hingga kesatuan yang sekecil mungkin hingga dapat digunakan untuk transaksi apapun juga.

Bretton Woods menandakan pergeseran formasi sosial medium uang dari yang bergantung terhadap nilai intrinsik emas menjadi bergantung terhadap kebijakan politik. Kekuatan politik hadir sebagai sebuah imunisasi, untuk menghilangkan ketidakpastian dari subsistem ekonomi agar komunikasi ekonomi dapat terus berlangsung. Bretton Woods dalam kerangka sistemik merupakan sebuah pemrograman kembali subsistem ekonomi dengan memberikan kondisi

(*fixed exchange rates*, kontrol kapital) dan tujuan (perdagangan bebas) agar sistem tidak terus terjebak dalam stagnansi.

Sementara itu, secara alami Dolar Amerika Serikat muncul sebagai *point of reference* yang baru dalam komunikasi ekonomi, disebabkan oleh faktor ekonomi nasional AS sebagai satu-satunya dari negara-negara industri lainnya yang masih berjalan. Karena setiap barang modal dan bahan kebutuhan lainnya hanya dapat didapat melalui perdagangan dengan Amerika Serikat. Implikasi dari peran politik Amerika Serikat sebagai penjaga konvensi atas nilai moneter ialah kemandirian sistem komunikasi perekonomian harus dikorbankan. Subsystem ekonomi tidak dapat sepenuhnya swareferensial, penutupan operasional dan diferensiasi internalnya dibatasi oleh kekuatan politik. Pergerakan finansial, reproduksi pembayaran di dalam sistem akan bergantung pada karakter referensi eksternalnya. Dalam hal ini tergantung pada kebijakan politik Pemerintah Amerika Serikat, pada khususnya, dan pemerintah-pemerintah negara lain pada umumnya.

Dolar pun menjadi sesuatu yang jauh lebih abstrak dibandingkan fungsi asalnya. Dolar menjadi segalanya dalam dunia kontemporer. Mata uang negeri Paman Sam ini telah melewati batas-batas realitas dan menjadikan dirinya hiperrealitas murni yang membawanya semakin mendekati ranah abstrak. Dolar telah melangkah jauh menjadi sebuah elemen hegemoni negara superpower. Mungkin inilah yang dimaksud sang pengelana dunia Marcopolo saat mengunjungi dinasti Cina.

Saat sang pengelana tersebut mengunjungi dinasti Cina, ia menyaksikan penggunaan uang kertas untuk menggantikan fungsi logam mulia sebagai alat transaksi. Dalam catatannya ia menulis bahwa dengan selembar kertas memungkinkan seorang penguasa bisa mendapatkan semua yang berharga tanpa modal apa-apa. Ia kemudian mencatat bahwa alat itu (uang kertas) suatu saat bisa menjelma sebagai ilusi yang berbahaya (Bomber Gascoigne, *The Dynasties of Cina*. Hal 114).

Kini apa yang dipikirkan oleh Marcopolo tersebut menjadi kenyataan. Dolar sebagai uang kertas yang hanya berlandaskan “stempel pengakuan” dari *the fed* telah menjelma menjadi alat hegemoni yang menakutkan. Dolar mampu



menjadi elemen pengontrol AS terhadap negara lain. Ketergantungan akut kepada Dolar telah menciptakan relasi hegemonik yang kokoh. Dolar menjadi alat untuk melanjutkan tradisi AS yang dalam sejarahnya sangat lekat dengan penguasaan dan hegemoni.

Dolar merupakan aktor utama dalam sistem keuangan dunia. Keuangan internasional merupakan kekuatan utama dalam upaya penyatuan dunia ekonomi modern (Robert Gilpin, 1987: 306). Mata uang internasional, selain digunakan untuk melakukan transaksi internasional, juga berperan dalam membentuk konstelasi power dalam sistem internasional. Semakin sering suatu mata uang digunakan, maka semakin besar peranan yang dimiliki mata uang tersebut. Dan mata uang yang paling sering digunakan dunia adalah Dolar.

Digunakannya Dolar Amerika sebagai pembanding ialah karena mata uang tersebut merupakan yang paling stabil dan banyak digunakan dalam transaksi internasional. Satu-satunya mata uang yang nilainya lebih dari Dolar adalah pondsterling Inggris, namun mata uang ini tidak memiliki pengguna seluas Dolar AS. Dolar telah menggantikan pondsterling yang dahulu juga merupakan mata uang hegemon yang menjadi salah satu simbol kekuatan Inggris Raya.

Kekuatan yang dimiliki oleh suatu mata uang menjadikannya sebagai “senjata” politik suatu negara dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya. Dominannya penggunaan Dolar AS telah membuat negara tersebut “disegani” karena kekuatan mata uangnya memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Kekuatan mata uang pasca perang dingin dapat disamakan dengan kekuatan militer pada masa perang dingin. Dolar dan senjata perang memiliki fungsi yang hampir sama. Dolar sebagai alat hegemoni dan senjata sebagai alat dominasi.

Kekokohan Amerika berikut mata uang Dolarnya, bisa dijelaskan Mundell dengan mengadopsi teori gravitasi Newtonian. Ketika suatu negara menjadi superpower dunia, kedudukannya tak ubahnya matahari dalam tata surya. Dia akan menjadi pusat kekuasaan, sekaligus pusat moneter internasional. Sementara negara-negara lain tak lebih dari sekedar planet-planet yang mengorbit. Namun, bila salah satu planet itu dikemudian hari menjadi bertambah besar oleh suatu hal, bahkan kemudian melebihi matahari, maka beralihlah planet itu menjadi pusat

gravitasi dan pusat kekuasaan baru. Rezim moneter baru pun tercipta. Inilah yang terjadi ketika era Poundsterling berakhir dan bergeser ke Dolar ketika Amerika mengambil alih peran superpower itu dari tangan Inggris.

Dolar mampu bertahan menjadi mata uang hegemon meskipun pada kenyataannya nilai nominalnya jauh berkurang dari tahun ke tahun. Dalam pemikiran logis, uang yang nilainya terus berkurang sepatutnya tidak layak untuk dijadikan sebagai mata uang utama. Namun pada kenyataannya, hingga detik ini Dolar masih bercokol sebagai pemain utama pasar mata uang dunia. Hingga kini, Dolar masih menjadi pilihan utama untuk mengisi cadangan devisa negara-negara di dunia.

Disinilah konsep hegemoni mendapatkan kontekstualisasinya. Definisi hegemoni kepemimpinan moral dan filosofis diterapkan AS dalam rangka menanamkan Dolar sebagai bentuk ideologi kepada masyarakat dunia. Kepemimpinan tersebut dicapai lewat persetujuan aktif negara-negara di dunia dalam perjanjian Bretton Woods yang tak lain merupakan deklarasi Dolar sebagai alat hegemoni AS.

Perjanjian Bretton Woods telah menobatkan posisi Dolar yang sama dengan emas. Seluruh mata uang di dunia harus berkiblat kepada Dolar. Hal ini berarti bahwa Dolar menjadi koefisien penentu bagi mata uang negara lain. Disisi lain, mata uang merupakan aktor utama dalam transaksi ekonomi sebuah negara. Maka pada akhirnya bisa dikatakan pula bahwa Dolar menjadi penentu transaksi ekonomi negara. Dalam bahasa yang paling sederhana, Dolar pada akhirnya menjadi sebuah alat hegemoni bagi penciptanya, yakni AS.

Dalam perpektif Gramsci, hegemoni diartikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*). Inilah yang terjadi dengan Dolar. Ide bahwa Dolar sebagai mata uang ideal menjadikan segala realita yang janggal dalam kaitannya dengan Dolar menjadi sesuatu yang wajar. Di bab sebelumnya sudah penulis kemukakan bahwa Dolar pada kenyatannya digunakan untuk menutupi defisit budjged AS yang terjadi sekian lama.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa AS adalah negara yang selalu berkuat dengan permasalahan defisit. Ironisnya, defisit ini menjadi tidak begitu berarti ketika Dolar memainkan fungsinya sebagai alat hegemoni AS. Dengan kekuasaannya mencipta, mengatur dan merekayasa nilai Dolar, AS tidak begitu kesulitan dalam menghadapi permasalahan defisit yang terus terjadi. Ironisnya, semua negara tampak menerima semua kejanggalan yang dilakukan AS tersebut. Semua negara menerima seperti halnya mereka menerima keputusan Presiden Nixon yang menanggalkan kaitan Dolar dengan emas. Nixon Shock tersebut merupakan bentuk hegemoni lain dimana AS menerima persetujuan aktif negara-negara lain untuk menghapus perjanjian Bretton Woods.

Pengertian hegemoni Gramsci telah menemukan konteksnya dalam penerimaan segala sepak terjang AS dalam kaitannya dengan Dolar. Lebih jauh lagi, Gramsci juga mengatakan bahwa diperlukan upaya untuk tetap mempertahankan hegemoni yang telah ada. Sebagaimana yang dikatakan Gramsci, bahkan suatu kelompok sosial telah menjadi dominan dan mempertahankan dengan gigih kekuasaan yang ada dalam genggamannya dan mereka tetap harus terus “memimpin”. Hegemoni tidak pernah dapat diperoleh begitu saja, tetapi harus diperjuangkan terus menerus. Hal ini menuntut kegigihan untuk mempertahankan dan memperkuat otoritas dari kelas yang berkuasa dan pembuatan kompromi-kompromi yang diperlukan untuk menyesuaikan sistem aliansi yang ada dengan kondisi yang senantiasa berubah serta aktivitas kekuatan oposisi (Roger Simon, 2000: 45-46).

Dalam kaitannya dengan Dolar, upaya mempertahankan hegemoni mata uang tersebut diperlihatkan AS dalam sepak terjangnya menyerang kekuatan oposisi yang berpotensi mengancam keberlangsungan hegemoni tersebut. Contoh yang paling nyata adalah serangan AS ke Irak yang amat kental dengan nuansa politik ekonomi. Tak dapat dipungkiri bahwa penyerangan tersebut tak lain merupakan cara AS “mengamankan” persediaan kebutuhan negerinya akan minyak. Namun yang tak kalah penting, serangan tersebut merupakan reaksi atas tindakan Saddam Husein yang hendak mengkorversi Euro menjadi alat pembayaran minyak menggantikan Dolar.

Seperti yang penulis jelaskan di bab terdahulu bahwasanya salah satu kekuatan Dolar adalah kaitannya dengan fungsi pembayaran minyak. Sepanjang transaksi perdagangan dunia dan minyak menggunakan Dolar, maka sepanjang itu pula Dolar memainkan peran penting sebagai alat hegemoni.

Indeks Dolar AS akan selalu mengikuti indeks harga minyak. Hal itu berarti Dolar memiliki kaitan yang sangat erat dengan Dolar hingga pada akhirnya memunculkan istilah petro Dolar. Maka dari itu, siapapun yang hendak “menggugat” kaitan Dolar dan minyak tersebut, berarti ia tidak mengakui kepemimpinan moral dan intelektual AS sebagai negara “penguasa” Dolar. Lebih jauh lagi, hal itu berarti menjadi sebuah oposisi yang harus “dibungkam” untuk melanggengkan proses hegemoni. Maka terjadilah penyerangan terhadap Irak yang dibungkus oleh propoganda Anti Terorisme kepada dunia.

Dalam pemikiran Gramsci, relasi antarbangsa tidak bisa dilepaskan dari motivasi ideologis, di mana negara kuat selalu berupaya mencangkokkan kekuasaannya ke negara yang lebih lemah. Johann Galtung juga berada dalam paradigma yang sama saat melihat relasi internasional. Secara lebih tegas, Galtung melihat adanya ketergantungan negara-negara periferal kepada negara-negara pusat. AS sebagai negara yang kuat senantiasa menanamkan kekuasaannya ke negara lain dimana salah satunya menggunakan elemen Dolar. Dengan Dolar AS leluasa menjadi pelaku utama perdagangan dunia yang menjadi sumber kehidupan sebuah negara. AS dengan leluasa membeli barang dari negara lain, sementara negara lain harus bersusah payah terlebih dahulu untuk mengumpulkan Dolar.

Dolar pada akhirnya juga turut berubah menjadi kapital yang pada akhirnya menjadi basis utama dari kapitalisme. Relasi hegemonik terjadi tatkala Amerika sebagai pemilik kapital yang besar mampu mempengaruhi negara-negara dengan kapital yang kecil pada proses kapitalisme. Hegemoni yang berawal dari kapitalisme itu sendiri pun pada akhirnya melahirkan pencangkokan ideologi yang memiliki cakupan melebihi semua bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

Dalam konteks inilah, gagasan Gramsci tentang hegemoni budaya memiliki pengaruh yang sangat besar dewasa ini. Problematika yang diidentifikasi Gramsci adalah dominasi mutlak kapitalisme sebagai suatu sistem sosial dalam masyarakat yang gagal mengatasi berbagai permasalahan mendasar dalam hal

ketidakseimbangan politik, ekonomi dan sosial. Hanya saja kita perlu menarik pemikirannya dalam konteks global agar lebih sesuai untuk menjelaskan relasi hegemoni dalam tataran global dimana AS menjadi salah satu pelakunya.

Maka tak mengherankan pula jika hegemoni yang bermula dari sistem ekonomi juga mampu menjadi relasi hegemoni dibidang sosial, budaya dan politik. Uang telah menjadikan elemen utama penggerak perilaku ekonomi. Dalam perilaku ekonomi tersebut muncullah potensi-potensi hegemonik dimana itu akan terjadi jika kekuatan dari pelaku-pelaku perilaku ekonomi tersebut tidak memiliki posisi tawar yang seimbang atau dengan kata lain tidak memiliki kekuatan yang sama.

Dalam konteks kapitalisme finansial global, perilaku ekonomi yang melibatkan uang dalam skala besar juga mampu menghasilkan relasi hegemoni yang berimbang pada berbagai bidang seperti sosial, politik dan budaya. AS sebagai pemegang otoritas penciptaan Dolar yang menjadi alat transaksi utama berperan sebagai hegemon yang memiliki posisi tawar yang lebih baik dari para pengguna mata uangnya.

Sebagai pencipta komoditas atau pihak penjual, Amerika Serikat juga memiliki kekuatan lebih untuk menentukan dinamika pasar dimana barang-barangnya tersebut ditransaksikan. Maka dengan demikian, proses hegemoni mulai bekerja pada tataran transaksi ekonomi tersebut dan menjalar sebagai hegemoni dalam sosial, budaya dan juga politik. Dengan perekonomian kapitalisnya yang besar, Amerika menjadi raksasa dalam pasar internasional

Hegemoni Dolar secara historis dapat dirangkum dalam beberapa fase. Pada fase pertama, dimulai pada tahun 1945-1948 pasca perang dunia II dan awal perang dingin atau yang lebih dikenal dengan sistem standar emas atau Bretton Woods. AS muncul sebagai kekuatan super power setelah perang dunia II dengan kekuatan industri yang kuat dan produktivitas ekonomi yang tinggi dibanding dengan negara lain. Pada masa ini Dolar digunakan untuk membangun eropa yang hancur pasca perang dengan Marshal Plannya dan menciptakan NATO untuk melawan Uni Soviet (F. William Engdahl, 2003: Hal 35). Sistem Bretton Woods merupakan fase pertama *American Century*.

Pada masa ini Dolar mendapatkan persetujuan dari kelompok (negara) lain untuk menjadi hegemoni. Amerika pada fase ini memenangkan persetujuan aktif dari negara lain atas kepemimpinannya. Persetujuan tersebut tak lain merupakan hasil dari dominasi militer AS pada perang dunia II dan kemenangan konsensus atas kekuatan ekonomi AS. Persetujuan tersebut akhirnya membawa AS pada posisi hegemoni yang menjadi superordinat bagi negara-negara lain. Konsekuensinya adalah AS leluasa menanamkan ide-ide dan ideologi kepada negara superordinat.

Hal ini tampak terlihat jelas dari upaya AS yang gencar mengkampanyekan sistem kapitalisme dan liberal kepada dunia sebagai antitesis faham sosialis dan komunis ala Uni Soviet. Penanaman ideologi tersebut kemudian meluas menjadi infiltrasi nilai-nilai budaya, sosial, politik yang kemudian terinternalisasi kepada negara subordinat. Internalisasi nilai-nilai tersebut pada akhirnya membuat negara lain “bungkam” atas sepak terjang AS.

Fase kedua abad Amerika (*american century*) adalah digunakannya Dolar sebagai mata uang transaksi minyak setelah berakhirnya perang Youm Kippur. Dimulai pada pertengahan tahun 1970 abad *american century* dan penguasaan ekonomi global menjalani perubahan yang dramatis. Terjadinya krisis minyak di Inggris dan AS mengakibatkan terjadinya permintaan yang besar terhadap Dolar. Negara-negara pengimpor minyak dari Jerman, Jepang, dan negara lainnya dihadapkan dengan cara bagaimana harus mengekspor Dolar untuk membayar tagihan import minyak mereka dalam Dolar.

Negara-negara OPEC kemudian dibanjiri dengan Dolar minyaknya. Sebagian besar Dolar ini kemudian disimpan di bank-bank London dan New York, Henry Kissinger menyebut proses ini dengan “*recycling petro-Dolar*” yang disimpan di bank-bank AS dan Inggris, kemudian dipinjamkan kembali ke negara-negara ketiga yang akhirnya menimbulkan krisis hutang dunia ketiga pada tahun 1980-an (F. William Engdahl, 2003: 35).

Digunakannya Dolar sebagai mata uang transaksi minyak terjadi setelah melalui persetujuan pada tahun 1974 oleh Henry Kissinger, menteri luar negeri AS yang membentuk *Joint Comission Arabian States for Economic Cooperation*. Departemen keuangan AS dan bank sentral AS (*The Fed*) mengizinkan bank

sentral Arab Saudi untuk membeli surat berharga (*treasury bills*) AS dengan petro-Dolar Arab Saudi. Pada tahun 1975 negara-negara OPEC secara resmi menjual minyaknya dengan pembayaran Dolar AS.

Fase ini menandakan bahwa hegemoni AS dan Dolar mencapai kekuatan puncaknya dengan semakin kuatnya persetujuan aktif negara-negara lain. Hal ini terlihat dari perngkaitan Dolar terhadap Minyak dan dipergunakannya Dolar sebagai cadangan devisa di banyak negara. Artinya, negara-negara pengguna Dolar percaya dengan kekuatan AS dalam mengelola Dolarnya yang berarti pula AS memenangkan kepemimpinan moral dan intelektual terhadap negara-negara tersebut.

Pada masa ini hegemoni AS berjalan relatif mudah. Tak ada gerakan counter hegemoni, bahkan dalam tataran wacana sekalipun. Hal ini dimungkinkan karena negara-negara lain dalam masa pemulihan akibat perang dunia yang memporak-porandakan banyak negara. Selain itu, perbandingan kekuasaan AS dengan negara lain terlalu jauh hingga tidak memungkinkan terjadinya sebuah counter hegemoni.

Satu-satunya kekuatan yang mampu mengimbangi dan menjadi counter hegemoni AS adalah Rusia. Namun dalam skala ekonomi, pengaruh Rusia tak seluas AS. Dolar AS jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan mata uang Rusia. Hal ini disebabkan gerakan Marshal Plan dan Doktrin Trauman yang sukses memperkenalkan Dolar sebagai mata uang populer sekaligus mengantarkanya sebagai mata uang Hegemon.

Fase hegemoni petro-Dolar AS merupakan usaha untuk memperlambat berkurangnya kekuatan geopolitiknya sebagai kekuatan hegemoni global pasca perang dunia II. Fase ketiga *american century* muncul setelah berakhirnya perang dingin dan munculnya EMU dengan mata uang dan pasar tunggalnya pada awal tahun 1990-an. Hal ini kemudian mengancam dan mengganggu supremasi *american century*. Perang Irak merupakan contoh konkrit pertarungan besar (major battle) dalam fase ketiga *american century* guna mengamankan posisi dominan AS, fase ini kemudian sering dikenal dengan nama "*democratic imperialism*", yakni imperialisme AS yang berbungkus demokrasi.

Berbeda dengan fase setelah tahun 1945, dalam fase ini AS tidak memberi konsesi pada negara lainnya dalam G8, minyak merupakan satu-satunya kendaraan AS untuk mempertahankan dominasi jangka panjangnya. Dalam fase ini, AS jarang bekerja sama dengan sekutunya dari Eropa. Sebaliknya AS melihat Euroland sebagai ancaman strategis terbesar terhadap hegemoni Amerika, terutama negara-negara “*old empire*” seperti Jerman dan Prancis. Sama seperti Inggris yang mengalami kemunduran pada tahun 1870 yang kemudian melakukan berbagai perang di Afrika Selatan dan sebagainya, AS juga menggunakan kekuatan militernya untuk menutupi kelemahan di bidang ekonomi yaitu Dolar.

Perang tersembunyi (*hidden war*) antara Dolar dan Euro dalam memperebutkan hegemoni global merupakan inti fase ketiga *american century*. Untuk mengerti pentingnya pertarungan hegemoni mata uang ini, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa sejak AS muncul sebagai kekuatan super power global dunia setelah tahun 1945, hegemoni AS tergantung pada dua pilar yang tak tertandingi, yaitu kekuatan militer yang luar biasa dan Dolar yang perkasa (David E Spiro, 1999: 45).

Pada fase ketiga ini AS kembali menggunakan kekuatan-kekuatan dominasinya untuk mengamankan keberlangsungan hegemoninya. AS menggunakan kekuatan dominasi untuk melawan oposisi yang dinilai mengancam hegemoninya. Maka peperangan menggunakan senjata menjadi alat untuk kembali memenangkan hegemoni yang terancam oleh kekuatan-kekuatan oposisi tersebut.

Gramsci telah tegas menarik perbedaan konsep antara dominasi dan hegemoni. Namun, menurutnya dua hal tersebut bisa dilakukan bersamaan oleh sebuah kelompok (negara) yang dominan (Gramsci, 1971: 80). Dalam konteks kekinian, Amerika Serikat telah menggunakan dua hal tersebut dalam kaitannya dengan ekonomi politik dunia. Amerika menggunakan kekuatan hegemoni dalam bidang ekonomi, politik dan budaya kepada negara-negara yang menerimanya sebagai “pemimpin dunia”. Di sisi lain, AS juga masih menggunakan kekuatan dominasinya untuk “membungkam” oposisi yang tidak sekuat dengan sepak terjangnya.

AS menggunakan kekuatan dominasi dalam bentuk militer untuk meredam negara-negara yang dianggapnya mengancam posisi hegemoninya. Sepak terjang



militer AS sangat terlihat sekali bertujuan untuk mengamankan kepentingannya dan juga posisinya sebagai pemimpin dunia. Perang Korea (1961), Perang Vietnam (1957 - 1975), Perang Soviet-Afganistan (1979 - 1989), hingga perang Irak merupakan bentuk ekspresi dominasi AS kepada masyarakat dunia (negara lain) demi mengamankan kepentingan dan posisinya sebagai negara hegemon.

Stephen Gill (1990) yang meletakkan kerangka Gramscian dalam konteks hubungan internasional juga mengemukakan konsep *Capital Transnasional* dimana kekuatan kapital memiliki kemampuan untuk menjadikan sebuah negara menjadi hegemoni. Menurutnya, dengan kekuatan kapital yang besar sebuah negara mampu menyebarkan ideologinya melalui sistem kerja kapital tersebut. Kapital yang besar mampu melahirkan bentuk-bentuk pembentukan ideologi kepada pihak-pihak yang bergantung pada sistem kerja kapital tersebut. Pada akhirnya akan terbentuk sebuah sistem kesatuan ideologi antara pemilik kapital dan pengguna kapital, antara kelas hegemonik dan yang terhegemoni, atau antara negara penghegemoni dengan negara yang terhegemoni.

Enrico Augelli dan Craig Murphy (1988) yang memusatkan perhatiannya pada ide-ide Gramsci tentang “ideologi” dan “supremasi” untuk memahami hubungan Amerika Serikat dengan dunia ketiga juga sangat membantu untuk memahami hegemoni AS dalam konteks pemikiran Gramsci. Supremasi Amerika Serikat dalam kancah global telah membuatnya relatif mudah dalam menyebarkan ideologi-ideologinya kepada negara-negara lain. Dengan supremasinya, AS memiliki keunggulan psikologis untuk menyakinkan negara-negara lain mau menerima hegemoninya dengan sukarela.

Dalam konteks tulisan ini, saya ingin menempatkan ide Gramsci dalam hubungannya dengan produksi ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah demokrasi, kapitalisme, liberalisme sebagai bagian bentuk ide-ide pembangunan yang diberlakukan oleh negara hegemon melalui berbagai kebijakan ekonomi politiknya ke negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia di dalamnya. Hegemoni sendiri pada prinsipnya merupakan bentuk penanaman ideologi yang dilakukan secara halus demi melanggengkan dan membuat struktur kekuasaan hegemoni yang kokoh.

Gramsci memang tidak sedikit pun menyinggung tentang sekelompok negara yang kemudian hari dikenal dengan sebutan negara-negara berkembang (maupun masyarakat lokal), tetapi Gramsci beberapa kali membicarakan tentang adanya ketimpangan hubungan antar negara. Dalam hal ini pandangannya menyerupai pandangan para pemikir dependensi. Gramsci mencatat bahwa proses pembuatan keputusan di negara-negara kecil sangat dipengaruhi, kalau tidak ditentukan, oleh negara besar.

Hal ini tentunya sangat cocok dengan realita yang terjadi saat ini dalam kancah global. AS masih memiliki kekuatan besar untuk mengatur negara-negara kecil yang ada dalam segala bentuknya. Meskipun terdapat kecenderungan menurunnya tingkat ketergantungan negara-negara tersebut, namun masih saja mereka tidak bisa lepas dan mandiri secara total dari bayang-bayang kekuasaan AS. Negara-negara kecil yang ada akhirnya hanya menjadi “boneka-boneka” perpanjangan tangan atas kepentingan-kepentingan AS.

Negara-negara kecil tersebut juga dipelihara sebagai basis kekuatan yang mendukung hegemoni AS. Sebuah hegemoni mensyaratkan basis pendukung yang kuat dan pendukung tersebut harus dikelola sebaik-baiknya sehingga menciptakan sebuah sistem hegemoni yang kokoh. Hal ini sejalan dengan hegemoni AS yang banyak menggunakan pengaruhnya dan juga kekuatan kapitalnya untuk menciptakan pendukung-pendukung atas hegemoni AS. Para negara pendukung tersebut pada kenyataannya merupakan negara yang juga terhegemoni dan menjadi subordinat dari sistem hegemoni AS.

AS sebagai negara hegemon memiliki lebih banyak kebebasan dalam merumuskan berbagai kebijakannya yang sejalan dengan kepentingan domestik dan hubungan domestiknya. Namun sebaliknya, ruang gerak negara-negara kecil amatlah terbatas. Pengaruh kekuatan-kekuatan besar atas yang kecil ini terlihat jelas dalam lapangan perekonomian (dan berdampak secara politik dan sosial) dimana negara-negara besar menembus jauh ke dalam dan mencaplok perekonomian negara kecil dalam hubungan yang timpang.

Dalam hal ini kemudian hegemoni bisa dikaitkan dengan kapitalisme yang saat ini menjadi sesuatu yang sangat lazim. Dalam kapitalisme mengandung sebuah hegemoni dalam bidang ekonomi. Kapitalisme menciptakan kelompok-

kelompok hegemoni dan yang terhegemoni dalam tataran sistem ekonomi global yang ada. Maka, kapitalisme dapat dijadikan salah satu contoh bentuk hegemoni dalam bidang ekonomi. Dolar sebagai alat utama dalam sistem kapitalisme pun akhirnya menjadi salah satu kunci penting dalam proses hegemoni AS.

Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan dari mayoritas. Gramsci menambah dimensi baru dalam masalah ini dengan memperluas pengertiannya sehingga hegemoni juga mencakup peran kapitalis beserta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh.

Amerika telah melewati konsep hegemoni Lenin ketika negara tersebut berhasil menyebarkan secara luas Dolar kepada negara-negara lain yang mengalami kehancuran ekonomi pasca perang. Dengan bantuan-bantuan ekonominya, Dolar mampu beredar secara luas dan perlahan-lahan menyaingi kualitas dan kuantitas mata uang Poundsterling yang saat itu digjaya. Dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa Dolar menjadi alat AS untuk merebut hegemoni dunia yang saat itu dipegang oleh Inggris Raya.

Dolar menjadi alat “revolusi” ekonomi seperti yang Lenin maksud. Namun, Dolar juga menjadi hegemoni dalam pengertian Gramsci dimana ia bekerja secara penuh untuk memimpin, mengatur dan mempertahankan kekuasaan hegemoni yang ada. Dolar seperti dalam perjalanan sejarahnya telah berperan penting dalam mendukung sepak terjang AS dalam kancah global. Dengan Dolar, AS mampu memimpin, mengatur dan mempertahankan kekuasaannya sedemikian rupa hingga mengantarkan negara tersebut pada posisinya sebagai puncak hegemon dunia.

Gramsci mengkaitkan konsensus dengan spontanitas yang bersifat psikologis mencakup berbagai penerimaan aturan sosio-politis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Hal tersebut dikarenakan hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalitarisme dalam arti ketat. Dalam hal Dolar, AS telah memenangkan persetujuan dan penerimaan psikologis atas penggunaan Dolar sebagai mata uang dunia. Berbekal keamanan ekonomi, dan status pemenang perang, AS berhasil membuat negara lain yang luluh lantas akibat perang

menerimanya sebagai pemimpin sekaligus menerima Dolar sebagai mata uang yang disepakati bersama.

Konsensus yang pada dasarnya bersifat pasif, lebih mewujudkan suatu hipotesis bahwa penciptaannya semata-mata atas dasar persetujuan, terlepas karena alasan takut, telah terbiasa, atau murni kesadaran. Melalui konsensus inilah, hegemoni muncul sebagai komitmen aktif atas kelompok sosial. Hal ini terjadi dengan Dolar dimana proses kemunculannya tidak memerlukan sebuah tindakan koersif. Proses kemunculan hegemoni Dolar murni karena konsensus masyarakat dunia saat itu yang melihat Dolar sebagai mata uang ideal. Penerimaan atas Dolar tersebut pun pada dasarnya dilandasi oleh berbagai alasan. Beberapa negara menerima karena ketakutan akan kekuatan AS, beberapa negara menerima karena memang sudah terbiasa, dan sebagian negara menerima dengan kesadaran penuh.

Dalam pengelolaan hegemoni, konflik yang merupakan pengancam keberlangsungan hegemoni harus dibatasi, baik intensitas maupun ruang lingkungannya. Hal itu disebabkan kemungkinan bentuk keinginan, nilai, dan harapan baru muncul di luar sistem yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa konflik harus diredam sebaik mungkin untuk menghindari terbentuknya sistem hegemoni yang akan hadir menggantikan hegemoni yang sudah ada.

Pembatasan dan peredaman konflik juga harus dihindari untuk mewujudkan sebuah hegemoni total dimana hegemoni ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat pada tingkat hegemoni ini menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Hal itu tampak dalam hubungan organis pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun secara etis. Hal inilah yang dilakukan AS dalam proses pembentukan hegemoni yang kokoh.

AS akan "mati-matian" untuk membungkam oposisi yang ada dan meredakan konflik yang kemunculannya dapat mengancam keberadaannya. AS berusaha menciptakan hegemoni total dimana terdapat sebuah kesatuan antara AS dengan negara-negara lain sehingga tidak terdapat lagi kontradiksi antara AS dan negara-negara lainnya. AS terus berusaha menjadi hegemoni total yang memiliki kesatuan moral dan intelektual kokoh dalam kerjanya.

AS juga berupaya menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat dunia dimana hegemoni harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual. Hal itu menyebabkan kelompok hegemonik harus menyebarkan pandangan dan kepentingannya. AS sebagai kelompok hegemonik tak henti-hentinya menyebarkan ideologi dan pandangannya demi membuat sebuah kesatuan dalam sistem hegemonik. Dan pada akhirnya, salah satu tujuan hegemoni adalah tercapainya pandangan bersama atau penyatuan kokoh atas ideologi-ideologi kelompok hegemon.

Hubungan keterpaduan semua dimensi kehidupan kelompok hegemon dan terhegemon inilah yang akhirnya disebut sebagai blok historis (*historic bloc*). Blok historis akan tercipta atau berhasil diciptakan bila kelompok hegemon berhasil menyeragamkan segala ideologi, ide-ide, dan nilai-nilai dalam sistem hegemoni tersebut. Ideologi tersebut akan melahirkan fondasi hegemoni yang kokoh sehingga mampu menopang keberlangsungan sistem hegemoni yang ada.

Dengan demikian, hegemoni akan dapat berkembang secara penuh dan mencapai tujuan-tujuannya. Selain itu, AS juga bertindak atas nama kepentingan universal dalam kerangka sistem hegemoni. AS dapat mengatasmakan kepentingan negaranya menjadi kepentingan negara lain. Dengan demikian, negara lain tersebut mau tak mau harus mengikuti kehendak dari AS sebagai negara hegemon.

#### **3.3.4 Dolar dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Politik Global**

Dolar merupakan mata uang cadangan devisa bank sentral di seluruh dunia. Semua negara di dunia, kecuali AS harus mengontrol defisit perdagangannya dan menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uangnya. Hal ini disebabkan Dolar berperan sebagai mata uang cadangan devisa dan penyangganya adalah petro-Dolar. Semua negara harus mendapatkan Dolar untuk membayar impor minyak. Karena minyak merupakan komoditas yang sangat penting bagi semua negara, maka sistem yang ada saat ini mengharuskan negara untuk menciptakan surplus perdagangan guna mengakumulasi surplus Dolar. Hal ini berlaku untuk semua negara, kecuali AS yang mengontrol peredaran dan

mencetak Dolar sesuai kepentingannya karena sebagian besar perdagangan internasional didenominasi oleh Dolar.

Hal ini menyebabkan negara lain harus mempunyai cukup Dolar sebagai mata uang dalam transaksinya, mengingat mereka tidak dapat menerbitkan Dolar seperti AS. Sebagai jalan keluar, banyak negara berusaha memaksimalkan surplus perdagangan mereka dari perdagangan ekspor, sehingga AS menjadi “*importer of the last resort*” karena hegemoni moneter global AS tergantung pada “*recycling Dolar*” ini. Bank-bank sentral Jepang, Cina, Rusia, dan lainnya kemudian memberi surat berharga AS (*US Treasury Securities*) dengan Dolarnya. Hal ini memberikan AS keuntungan untuk mempunyai Dolar yang stabil, suku bunga yang rendah dan menciptakan defisit pembayaran sebesar 500 miliar Dolar per tahun dengan negara lainnya. Singkatnya, Federal Reserves mengontrol proses pencetakan uang dan dunia internasional membutuhkan Dolar.

Adanya sistem kurs nilai tukar mata uang yang harus mengambang bebas tentu saja telah sesuai dengan anjuran dan ajaran ekonomi kapitalisme. Sistem kurs yang mengambang bebas akan menyebabkan nilai mata uang di dunia ini tidak ada yang stabil. Nilai mata uang yang hanya disandarkan pada mata uang asing, khususnya Dolar AS, tentu sangat rentan terhadap guncangan, baik dalam skala nasional maupun global, baik berkaitan dengan persoalan ekonomi maupun non ekonomi.

Nilai mata uang yang mudah berubah tersebut akan sangat berpengaruh terhadap segala proses transaksi perdagangan, khususnya ekspor dan impor. Jika volume ekspor suatu negara sedang bagus dan tengah mengalami peningkatan, secara cepat akan mudah anjlok bersamaan dengan merosotnya nilai mata uang Dolar AS, demikian juga sebaliknya. Jika kebutuhan industri dalam negeri sangat tergantung pada komponen impor, maka secara mendadak industri tersebut bisa langsung gulung tikar, apabila secara tiba-tiba nilai mata uangnya mengalami kemerosotan.

Dengan tidak stabilnya nilai mata uang, maka dalam era kompetisi global yang sangat liberal ini, bukan tidak mungkin “permainan” nilai kurs mata uang dapat digunakan sebagai senjata yang kasad mata untuk menghancurkan industri-industri lawan yang dianggap akan menjadi pesaing yang membahayakan.

Terlebih lagi bagi nilai mata uang yang sangat lemah seperti Rupiah, tentu akan sangat rentan terhadap guncangan dibanding mata uang lainnya di dunia ini.

Itulah sedikit contoh kasus betapa Dolar AS memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kondisi arah ekonomi politik global. Ketika dunia tergantung kepada nilai Dolar, maka dunia akan selamanya berada dibawah bayang-bayang stabilitas uang negeri Paman Sam tersebut. Jika nilai Dolar hancur, maka perekonomian negara-negara di dunia ini juga akan ikut terpengaruh secara signifikan. Bahkan bukan tak mungkin jika nasib negara-negara kecil yang memiliki ketergantungan akut pada Dolar, nasibnya sepenuhnya ada di tangan Dolar.

### 3.4 Kesimpulan

Sulit dipungkiri, kenyataan yang bercokol di jagat adalah pertarungan pengaruh. Pertarungan yang menyentuh hal yang paling subtil dalam diri manusia, yaitu kesadaran. Hal ini sangat strategis, sebab seperti yang dikatakan Gramsci “*If you can occupy peoples' heads, their hearts and their hands will follow*”. Proposisi ini ternyata juga berlaku dalam konteks global, dimana AS menjadi negara hegemon yang mampu mempengaruhi nagara-nagara lainnya.

Melalui mata uangnya, AS menjelma menjadi negara superior dalam era kapitalime finansial. Sepak terjang negara adidaya ini berkali-kali telah dirasakan oleh masyarakat global. Hantaman krisis finansial beberapa kali menghantam tatanan ekonomi global, dan semua itu bermula dari negara superpower tersebut. Namun, faktanya AS tetap menjadi mercusuar bagi negara-negara lain, khususnya dalam bidang ekonomi.

Kekuatan mata uang dalam negeri terhadap Dolar kini menjadi elemen yang teramat vital bagi upaya pembangunan negeri-negeri pengguna Dolar. Terpuruknya nilai mata uang domestik bisa menjadikan negara tersebut terjungkal dan sulit bangkit kembali. Mata uang Dolar kini telah menjadi alat hegemoni efektif untuk menguasai negara-negara lain melalui jalur alternatif menggantikan peran militer.

Telah banyak negara yang tersungkur dan terseret oleh arus permainan kapitalisme finansial yang berperilaku semakin "buas". Suatu perekonomian yang

menapaki tahap demi tahap perkembangan, yang telah ditumbuhkan oleh peluh keringat berjuta-juta rakyatnya, tiba-tiba saja bisa diluluh-lantakkan dalam sekejap dengan cara mengguncang nilai mata uangnya hingga tersungkur tanpa kekuatan untuk membela diri (Milton Friedman, 1982: 39).

Dolar menjadi alat hegemoni bagi AS karena semua negara menerimanya sebagai mata uang internasional yang utama. Penerimaan ini merupakan sebuah bentuk pengakuan atas kepemimpinan moral dan intelektual seperti definisi hegemoni dari Gramsci. Ide bahwa Dolar merupakan mata uang ideal telah ditanamkan AS pada negara-negara di dunia dan mereka menerimanya sebagai persetujuan kolektif yang dideklarasikan pada perjanjian Bretton Woods.

Gramsci telah melahirkan sebuah konsep yang masih relevan dalam konteks kekinian. Konsep hegemoni gramscian mendapatkan tempatnya dalam relasi kapitalisme finansial global dimana AS berperan sebagai hegemon dan negara-negara pengguna Dolarnya sebagai yang terhegemon. Relasi tersebut berdiri pada salah satu pijakan kokoh yang bernama Dolar.



## BAB 4

### MASA DEPAN HEGEMONI DOLAR

#### 4.1. Pengantar

Sebuah hegemoni sejatinya merupakan penguasaan atas kelas lain. Maka dari itu diperlukan sebuah counter hegemoni untuk membebaskan kelas terhegemon dari kelas penghegemon. Gramsci menawarkan dua cara untuk melancarkan counter terhadap hegemoni tersebut. Pertama adalah melalui perang posisi dan kedua adalah dengan cara perang manuver.

Perang posisi diartikan sebagai sebuah gerakan untuk mengembalikan kesadaran kelas terhegemon atas realita yang ada. Langkah pertama untuk mengembalikan kesadaran tersebut adalah kembali memasukkan ide-ide dan ideologi tentang perjuangan kelas. Perang posisi adalah upaya untuk menyadarkan kembali kelas terhegemoni dari bius yang dilancarkan oleh kelompok terhegemon.

Perang posisi membutuhkan waktu yang lama, namun cara ini cenderung efektif daripada perang manuver. Perang posisi sangat tepat dilaksanakan pada negara yang kelas terhegemonnya telah meluber menjadi satu dengan kelas terhegemon sehingga sulit untuk membuat sebuah gerakan frontal secara langsung. Jadi, langkah pertama adalah melakukan penyadaran kritis terhadap kelas terhegemon bahwa ia sedang dalam posisi terhegemon, lalu menanamkan kembali kesadaran akan perjuangan kelas. Dengan demikian revolusi akan terjadi dan kelompok hegemon akan tumbang.

Perang posisi merupakan cara yang elegan dalam counter hegemon. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan perang manuver yang langsung membuka peperangan frontal kepada kelompok hegemon. Perang posisi ini sangat cocok dilaksanakan dalam kondisi kelas terhegemon belum terlalu masuk kedalam pengaruh ideologi-ideologi kelas pehegemon. Dengan demikian, perjuangan *frontal face to face* bisa terlaksana karena kelas terhegemon dalam keadaan sadar sedang terhegemon.

Perang posisi akan berhasil ketika kelompok terhegemon memiliki basis kekuatan yang berupa massa dan aktor intelektual organik yang cukup. Inilah yang terjadi pada revolusi Boursevik dimana kaum buruh yang kuat

menumbangkan rezim hegemon saat itu. Baik perang posisi maupun perang manuver merupakan cara counter hegemoni yang menurut Gramsci dapat mengembalikan sejarah perjuangan kelas sebagaimana mestinya.

#### 4.2. Euro Sebagai Counter Hegemoni

Kehadiran Dolar sejak lama merupakan sebuah hegemoni yang bekerja dalam skala global. Sejak Bretton Woods disepakati, belum ada satu pun gerakan counter hegemoni yang berhasil dilakukan. Hingga pada akhirnya muncullah Euro yang dengan gagah berani menjadi penantang kekuasaan Dolar. Euro menjadi sebuah counter hegemoni yang mengancam eksistensi hegemoni Dolar AS.

Sejak dua puluh tahun silam, gagasan untuk membentuk satu kawasan tunggal ekonomi yang menyatukan Uni Eropa (UE) terpantik. Gagasan tersebut kemudian melahirkan ide untuk menciptakan satu mata uang tunggal yang bernama Euro. Mata uang bersama tersebut digagas oleh masyarakat Eropa (*European Community*) yang menjadi cikal bakal sistem moneter Eropa atau lebih dikenal dengan *European Monetary System* (EMS).

EMS diluncurkan pada tanggal 13 Maret 1979 untuk menyatukan beberapa negara berbeda fundamental ekonominya. Pada perjalanannya, pembentukan EMS tersebut tidaklah mudah. EMS memulai tahap pertama dengan membuat standar ukuran umum yang perlu dipenuhi dengan mengambil rata-rata persamaan dari negara-negara Uni Eropa yang mau bergabung. Tahapan ini diselesaikan pada 1 Januari 1994 dengan terciptanya kesepakatan untuk memangkas semua kendala bagi aliran dana diantara negara-negara anggota-anggota UE.

Tahap kedua, EMS menciptakan lembaga yang bakal mengurus dan mengelola kendali moneter. Kemudian terbentuklah *European Monetary Institute* (EMI) di Frankfurt Jerman. EMI menjadi Embrio yang nantinya menjadi Bank Sentral dari seluruh EU (*European Central Bank* atau ECB). ECB berfungsi mengatur kebijakan umum moneter untuk seluruh UE, mengatur operasi nilai tukar mata uang asing, menyimpan cadangan devisa bagi anggota-anggota UE, dan mempromosikan mekanisme pembayaran yang stabil antaranggota. Kerangka sasaran kerja ini dinilai cukup moderat dan berhasil dilalui.

Tahap ketiga adalah penentu penyatuan mata uang yang digelar pada Januari 1999. Saat itulah negara-negara yang setuju bergabung dalam kawasan ekonomi UE (*Euro Zone*) tidak bisa menarik kembali mata uang masing-masing yang ditentukan secara tetap kepada Euro. Setelah tahapan ini terlewati, maka mulailah Euro dipergunakan sebagai alat tukar resmi Uni Eropa.

Penyatuan mata uang di Eropa sudah lama dinantikan. Robert Mundel, profesor ekonomi Universitas Columbia, sejak tahun 1969 sudah meramalkan bahwa hanya melalui penyatuan mata uang di Eropa diharapkan lahir mata uang baru yang bisa menjadi pesaing Dolar (M. Luthfi Hamidi, 2003: 55). Akhirnya terbukti bahwa Euro memang lahir sebagai ancaman serius terhadap hegemoni AS.

Euro lahir sebagai counter atas hegemoni Dolar yang telah berlangsung lama. Kehadiran Euro merupakan sebuah perang posisi sekaligus perang manuver Eropa atas hegemoni Amerika. Euro sebagai wujud perang posisi berlangsung sejak konsep gagasan dan ide pembentukannya muncul dan berkembang dalam proses yang amat tersistem. Hingga pada akhirnya perang posisi tersebut berubah menjadi perang manuver ketika Euro secara resmi diluncurkan sebagai mata uang resmi Uni Eropa.

Kemunculan Euro dalam kancah sistem finansial global tentunya menjadi ancaman atas hegemoni AS. Dalam perspektif Gramscian, sebuah oposisi atau ancaman terhadap hegemoni harus dipadamkan lewat momen persetujuan aktif kembali. Namun bila cara tersebut tidak berhasil, maka hegemoni kembali berubah menjadi dominasi dimana kekuasaan paksaan (*koersif*) muncul kembali.

Inilah yang terjadi dengan Irak. Saat Saddam Hussein menggagas pembayaran minyak menggunakan Euro, AS serta merta bereaksi dengan tegas. Bagi AS, langkah Irak tersebut merupakan ancaman bagi keberlangsungan hegemoninya. Maka dari itu perlu ada sebuah perlawanan terhadap oposisi sebagai bentuk pengelolaan hegemoni.

Irak merupakan negara pertama yang meminta proyek *Oil for Food* dibayar dengan Euro. Irak langsung membuka *esrow account* di New York pada akhir 2000. Belum cukup sampai di sana, gerakan “emoh” Dolar berlanjut dengan mengonversi cadangan devisa kira-kira 10 Milliar Dolar ke Euro. (Lutfi Hamidi,

2003: 79). Sikap ini merupakan ancaman serius bagi hegemoni AS mengingat Irak merupakan termasuk negara penghasil minyak terbesar di dunia. Perlawanan terhadap Dolar ini ditakutkan oleh AS akan menyebar ke negara-negara lain.

Maka kemudian, dominasi militer kembali berbicara. AS menggempur Irak dengan kekuatan besar dan menumbangkan rezim yang menjadi oposisi bagi hegemoninya. Penumbangan rezim tersebut diikuti oleh penciptakan pemerintahan baru yang tentunya mendukung proses hegemoni AS. Disini tampak terlihat jelas bahwa konsep pengelolaan hegemoni Gramsci mendapatkan contoh yang amat gamblang dalam kasus penyerangan Irak.

AS merasa hegemoninya terancam dengan munculnya oposisi-oposisi. Lantas, oposisi tersebut dilawan dan kemudian membentuk pengganti dari oposisi tersebut yang mengakui persetujuan kepada hegemoni AS. Dalam kasus ini Irak merupakan contoh lahirnya oposisi hegemon yang gagal dalam melancarkan serangannya sehingga hegemoni terus berlangsung seperti sediakala.

Tingkal laku Irak tersebut tampaknya kini mulai banyak diikuti oleh banyak negara. Banyak wacana-wacana baru untuk membuat mata uang regional ataupun sekedar berpaling dari Dolar. Iran menjadi penerus gagasan Irak untuk mengonversi Dolar ke Euro dan mengganti pembayaran minyak ke Euro. Negara-negara Amerika Latin yang mulai bangkit pun dengan kuat melontarkan wacana pembentukan mata uang bersama seperti Euro. Begitu pula halnya dengan ASEAN yang kembali memunculkan wacana lama pembentukan mata uang bersama regional setelah sekian lama wacana tersebut hilang.

Brazil, India, Rusia dan Cina tak tertinggal pula. Empat negara tersebut sukses membuat kesepakatan multilateral yang berisi penggunaan empat mata uang mereka dalam transaksi ekonomi yang mereka lakukan. Dan tak kalah pentingnya adalah wacana pembentukan mata uang berbasis emas (dinar dan dirham) oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang nantinya dipergunakan oleh negara-negara muslim di dunia.

Semua gerakan di atas merupakan sebuah counter hegemoni terhadap Dolar AS. Namun, sejauh ini hanya Euro yang terbukti menjadi ancaman serius sekaligus sebagai counter hegemoni potensial yang mampu menggantikan hegemoni DOLAR dalam sistem finansial global. Maka, masa depan hegemoni

AS dengan Dolarnya dalam waktu dekat akan dapat dilihat kelanjutannya. Prospek menurunnya hegemoni Dolar adalah sebuah keniscayaan. Hal ini telah diperkirakan oleh banyak pengamat ekonomi dunia.

Beberapa tahun terakhir harga minyak mencapai level yang sangat tinggi, sebagian tekanan terhadap Dolar tidak bisa dihindari ketika para produsen minyak mulai memikirkan prospek diversifikasi ke dalam berbagai mata uang lain. Berbagai ketidakpastian yang dihasilkan oleh krisis *subprime* menciptakan berbagai kekhawatiran tentang masa depan ekonomi AS, dan juga masa depan Dolar (David M. Smick, 2009: 67).

#### **4.3. Kemunduran Dolar dan berakhirnya Hegemoni AS**

Krisis finansial di Amerika Serikat akibat kredit macet di sektor perumahan murah (*subprime mortgage*) pada akhirnya menjalar sebagai krisis global yang mengancam stabilitas ekonomi dunia. Krisis yang melanda negara yang merupakan “jantung” kapitalisme internasional itu telah meluas ke Eropa dan Asia, tak terkecuali Indonesia.

Salah satu ketakutan terbesar dari negara-negara lemah yang notabnya pengguna Dolar adalah bergerakinya secara liar nilai mata uang mereka terhadap Dolar. Semua negara di Asia Tenggara khususnya berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan nilai mata uang mereka dari pengaruh krisis finansial global yang dilahirkan dari negara adidaya tersebut.

Amerika telah berhasil menebarkan permasalahan serius bagi sistem ekonomi global dengan melahirkan krisis finansial yang sebenarnya sudah dikhawatirkan jauh-jauh hari oleh banyak ahli ekonomi. Namun, dengan bermodal pengaruh sebagai negara adidaya dan dukungan dari IMF, Amerika Serikat seakan-akan menutup telinga terhadap kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.

Disini mungkin benar penilaian Joseph Stiglitz mengenai lembaga keuangan internasional yang selalu memanjakan negara adidaya tersebut. Ia mengkritik keras Bank Dunia sebagai “institusi yang tidak bekerja untuk orang miskin, lingkungan hidup, atau untuk kestabilan ekonomi global.” Masalah-masalah dalam globalisasi, menurut Stiglitz, berada di dalam tiga institusi perekonomian dunia, yakni Bank Dunia, IMF, dan *World Trade Organization*

(WTO). Tiga institusi tersebut banyak bermain untuk kepentingan negara-negara besar, dan banyak melalaikan kepentingan negara berkembang (Joseph E. Stiglitz, 2002: 214).

Fenomena krisis dan permasalahan finansial lain yang merugikan banyak negara mengilhami munculnya berbagai gerakan counter hegemoni. AS sedang dalam posisi menghadapi permasalahan ekonomi yang terus menghantuinya. Di sisi lain, kepercayaan terhadap kekuatan hegemoninya, termasuk Dolar, perlahan-lahan berkurang hingga akhirnya AS dipandang sebagai negara yang rapuh. Begitu pula halnya dengan Dolar yang sejatinya merupakan elemen utama dalam sistem finansial global telah memperlihatkan proses kemunduran dan perlahan-lahan sedang menatap kehancurannya seiring banyaknya penggunanya yang berpaling dari mata uang Paman Sam tersebut.

Uang dan juga Dolar kini memang telah mulai memasuki orbitnya, yakni berputar dari satu bank ke bank lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, seakan-akan diperjualbelikan seperti komoditi-komoditi lainnya. Proses perputaran ini berlangsung dengan kecepatan tinggi, dengan jumlah transaksi yang sangat besar, serta melalui jaringan yang bersifat virtual (Yasraf Amir Pilliang, 2004: 127). Utang luar negeri kini menjadi sekumpulan kapital mengapung yang tak henti-hentinya mengancam ekonomi dan pertumbuhan real.

Sistem finansial global kini bagai awan besar yang bernama Dolar dan tak henti-hentinya mengancam para penggunanya dengan permasalahan-permasalahan finansial global seperti krisis finansial global yang baru saja terjadi. Belum lagi permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan AS yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecendrungan Inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi (Gilarso, 2002: 398). Masalahnya, AS adalah negara yang terbiasa bergelut dengan inflasi sepanjang sejarah perjalanan bangsa tersebut.

Saat ini hampir semua negara-negara di dunia menganut sistem pasar bebas. Semua negara terkait satu sama lainnya dalam ekonomi global yang terintegrasi. Aliran dana bebas keluar masuk dari satu negara ke negara lainnya. Oleh karena itu, semua berisiko terimbas krisis yang terjadi. Akan tetapi, dampak

krisis ekonomi tentu saja berbeda di setiap negara karena adanya perbedaan regulasi moneter dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya.

Negara yang paling rentan adalah negara yang fundamental ekonomi domestiknya tidak kuat. Fundamental ekonomi sebuah negara sangat ditentukan beberapa faktor. Salah satunya adalah kebijakan bank sentral yang pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan moneter guna mengatasi gelembung-gelembung ekonomi seperti gelembung *subprime*.

Kekuatan hegemoni ada karena adanya kepercayaan semua pihak akan kemampuan, prestise, prestasi, dan statusnya dalam hubungan international, sehingga negara hegemoni tersebut memiliki legitimasi yang kuat untuk memikul tanggung jawab sbagai pemimpin (Frohlic, et.al., 1971: 73). Di samping itu, kekuatan hegemoni harus didukung oleh beberapa negara kuat lainnya yang mendukung dan membantu posisi dominannya dalam ekonomi dan politik international (Robert Keohane, 1984: 43-45). Hal ini kini tak terjadi dengan AS. AS kehilangan legitimasinya sebagai negara yang kuat. Ia juga mulai ditinggalkan oleh sekutunya yang selama ini menjadi pendukung hegemoni AS.

Jika negara lain menganggap negara hegemoni terkesan menang sendiri dan berlawanan dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka, maka sistem hegemoni tersebut akan melemah, atau jika masyarakat negara hegemoni tersebut merasa dirugikan oleh tindakan curang negara lain, atau jika biaya kepemimpinan tersebut melebihi keuntungan yang didapat maka kelompok-kelompok yang dominan tidak akan mau mensubordinasikan kepentingannya dalam sistem tersebut (Robert Gilpin, 2001: 73).

Kekuatan hegemoni harus mendorong kegiatan-kegiatan perdagangan yang bersih, sehat dan legal/sah, dan melarang kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak sehat, ilegal dan tindakan curang lainnya dan memastikan terlaksananya aturan main yang sehat dan bersih dalam ekonomi yang liberal, menghindari konflik, menjamin kesamaan dan memfasilitasi perjanjian-perjanjian/persetujuan-persetujuan. Kekuatan hegemoni juga harus mendorong kekuatan lain untuk melaksanakan dan memelihara serta menanggung biaya secara bersama guna terpeliharanya sistem hegemoni yang dipimpinnya tersebut (Robert Koahane, 1982: 354). Pada kenyataannya, justru AS sendiri yang tak

“bermain” secara sehat dalam politik global, membuat konflik, dan tidak menjamin persamaan dalam kesepakatan-kesepakatan global.

Negara hegemoni, harus mempunyai penguasaan yang luas dan besar terhadap sumber daya alam, sumber-sumber modal dan keuangan, pasar dan keunggulan kompetitif dalam produksi (Robert Koahane, 1982: Hal 32). Artinya peran sentral dari negara hegemoni tersebut dalam sistem moneter internasional harus dilengkapi dengan kekuatan finansial dan moneter yang kuat. Inggris dan AS merupakan contoh negara hegemoni yang dimana mata uang mereka menjadi mata uang internasional. Namun kini, kekuatan finansial dan moneter AS patut dipertanyakan kembali.

Peran penting negara hegemoni yang lain adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Kindleberger yaitu “manajemen krisis”. Jika sebuah dunia liberal ingin bertahan hidup, negara hegemon harus bisa dan mau merespon dengan cepat terhadap ancaman yang akan mengganggu sistem tersebut, seperti contoh kemampuan Inggris menjadi “*lender of the last resort*” berhasil mengatasi masalah-masalah krisis finansial tahun 1825, 1836, 1847, 1866, 1907, namun tidak berhasil pada tahun 1929 dan ketidakmampuan AS menjadi *lender of the resort* dalam menghadapi banyaknya kegagalan bank-bank merupakan sebab utama hancurnya ekonomi secara besar-besaran pada waktu itu (Charles Kindleberger, 1986: 8-9). Fakta yang ada kini menunjukkan bahwa AS tak lagi mampu menjadi mengatasi krisis global. Justru sebaliknya, AS malahan sering menciptakan krisis yang berakibat buruk dalam skala global. Lantas apakah masih layak AS disebut sebagai hegemon?

Di awal abad ke-21 ini, proses pergeseran kekuatan global telah terjadi. Hal itu ditandai oleh lima kecenderungan utama, yakni (1) berlanjutnya hegemoni dan keutamaan (*primacy*) AS, (2) fenomena kebangkitan Cina, (3) revitalisasi peran keamanan Jepang, (4) tampilnya India sebagai aktor global potensial, dan (5) kecenderungan berlanjutnya dominasi peradaban Barat. Dari kelima kecenderungan itu, kebangkitan RRC merupakan fenomena yang paling penting sebagai *key driver* bagi proses *power shift* dan itu berarti masalah bagi AS.

Struktur kekuatan dan parameter interaksi yang telah menjadi ciri hubungan internasional di kawasan Asia selama setengah abad lalu, sekarang ini



sedang dipengaruhi secara fundamental, antara lain, oleh meningkatnya kekuatan ekonomi, militer, dan pengaruh politik Cina, serta posisi diplomatik dan keterlibatan negara itu dalam institusi multilateral regional.' Oleh karena itu, karakteristik hubungan antar negara besar dalam dekade mendatang akan diwarnai oleh respon terhadap kebangkitan Cina ini (David Shambaugh, 1995: 1).

Akibatnya, kawasan Asia Timur dihadapkan pada persoalan klasik dalam hubungan internasional, yakni bagaimana merespon dan mengelola kelahiran kekuatan baru. Dan sebagai *superpower* tunggal, AS merupakan negara yang paling terganggu oleh persoalan klasik ini (Evan S. Medeiros, 2005: 146). Dan telah terbukti bahwa Cina kini melampaui AS dalam segi ekonomi. Cina hanya membutuhkan waktu lebih untuk membangun sistem militer yang besar untuk mendapatkan status sebagai negara super power.

Perjalanan dinamika ekonomi politik global kini sedang dalam momen yang sangat penting. Kemunculan Uni Eropa, Jepang, India, Cina, menjadi momok menakutkan bagi kelangsungan hegemoni AS. Hal ini diperparah dengan kembalinya “musuh lama” Rusia yang perlahan tapi pasti kembali menunjukkan kelasnya sebagai pewaris utama kebesaran Uni Soviet pada masa lalu. Kebangkitan-kebangkitan negara Amerika Latin dengan pemimpin Ultra nasionalisnya juga tak bisa dipandang sebelah mata.

Munculnya negara-negara super tersebut memunculkan sebuah prediksi bahwa rezim hegemoni unipolar dimana AS berdiri tegak sendirian dalam puncak hegemoni dunia, akan segera berakhir. Abad ini oleh banyak pengamat dianggap merupakan akhir dari sejarah hegemoni AS dan lahirnya kekuatan multipolar dimana tak ada satu negara pun yang berdiri dalam puncak hegemoni dan dominasi dalam kancah global.

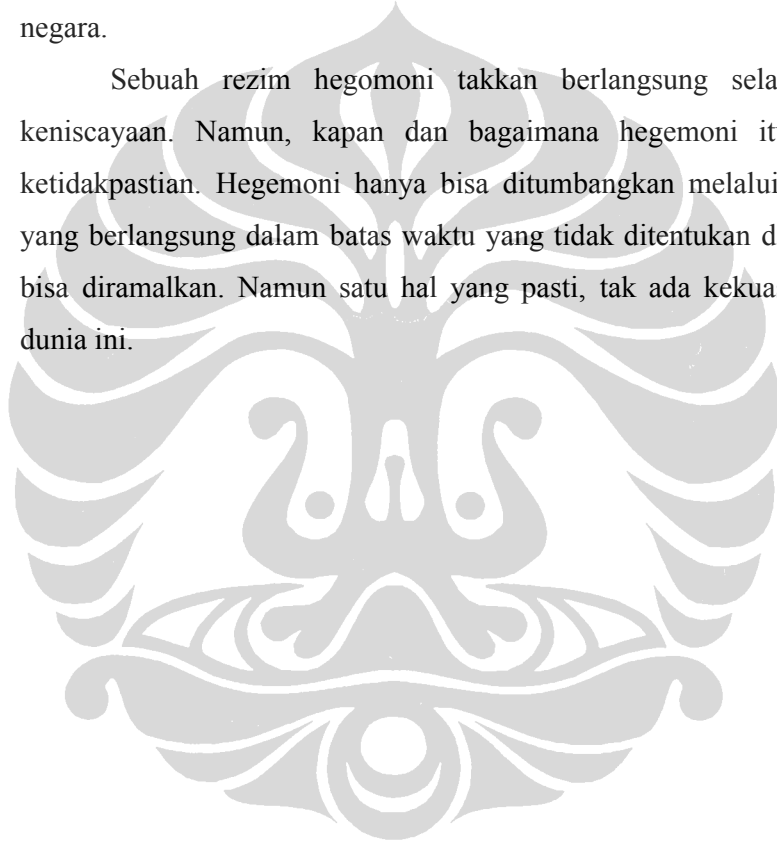
#### **4.4 Kesimpulan**

Kemunculan Euro merupakan sebuah counter hegemoni yang mengancam hegemoni AS. Sebuah counter hegemoni akan berhasil ketika ia di dukung kekuatan besar berupa massa pendukung dan aktor intelektual organik yang kuat. Kemunculan Euro mendapat tanggapan positif dari dunia yang mulai “jenuh” dengan Dolar. Selain itu, pemikir-pemikir cemerlang Eropa yang notabennya

adalah aktor intelektual organik, berada dalam satu barisan dengan Euro dalam posisinya sebagai elemen counter hegemoni.

Terlalu dini untuk mengatakan hegemoni AS telah lenyap. Namun terlalu naif pula jika mengatakan hegemoni AS dengan Dolarnya akan terus berlangsung terus menerus. Pergantian aktor hegemoni merupakan sebuah keniscayaan sejarah sebagai Marx mengatakan Sosialisme adalah sebuah keniscayaan yang lahir dari perjuangan kelas. Maka hegemoni AS dan Dolar pada akhirnya akan lenyap oleh berbagai bentuk counter hegemoni yang kini dilancarkan sporadis oleh banyak negara.

Sebuah rezim hegemoni takkan berlangsung selamanya merupakan keniscayaan. Namun, kapan dan bagaimana hegemoni itu tumbang adalah ketidakpastian. Hegemoni hanya bisa ditumbangkan melalui counter hegemoni yang berlangsung dalam batas waktu yang tidak ditentukan dan akhir yang tidak bisa diramalkan. Namun satu hal yang pasti, tak ada kekuasaan yang abadi di dunia ini.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Era militer telah berganti menjadi era penguasaan ekonomi. Persaingan antara kapitalisme yang dipimpin oleh AS dan Komunisme yang dipimpin Soviet telah usai. Kini AS bertengger sendirian dalam puncak kepemimpinan dunia. Dengan propoganda liberalisme dan kapitalismenya, AS berhasil memimpin dunia dalam menjalankan praktek globalisasi dan kapitalisasi finansial melalui mata uangnya. AS menjadi negara dominan yang hegemon.

Seiring jatuhnya kekuasaan Uni Soviet, maka jatuh pulalah *balance of power* yang selama perang dingin menunjukkan dinamikanya yang luar biasa. Balance of Power kemudian berubah menjadi *Uni Power* dimana AS berdiri sebagai negara hegemon tanpa ada negara yang mampu mengimbangnya. Dalam bidang militer, budaya, ekonomi, politik, negeri Paman Sam tersebut memiliki taring tajam dalam pergaulan internasional.

Perkembangan jaman tampaknya menuntut adanya konfigurasi multipolarisasi kekuasaan. Namun, AS tampaknya tetap hendak mempertahankan model uni-polar. Segala bentuk upaya dilakukan untuk itu, termasuk menyerang negara-negara lain dengan kekuatan militer melalui propoganda anti terornya. Semua tak lain merupakan upaya AS untuk tetap berdiri dalam puncak kepemimpinan dunia.

AS hingga kini belum tergoyahkan posisinya sebagai pemimpin dunia. Hegemoni AS kepada dunia masih tampak begitu kental meskipun dalam kadar yang jauh berkurang dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Salah satu penyebab hegemoni tersebut masih langgeng adalah faktor penopang kekuasaan yang kuat, dimana diantaranya dilancarkan melalui hegemoni Dolar. Dolar menjadi elemen penting dalam upaya mempertahankan status hegemoni AS, terutama sejak diberlakukannya kesepakatan Bretton Woods hingga munculnya Euro pada pembukaan abad millineum ini.

Dolar adalah mata uang yang paling populer di seluruh dunia hingga kini. Dengan posisinya seperti itu, maka bukan sesuatu yang mengejutkan jika mata

uang tersebut membantu "tuannya" untuk turut menghegemon dunia. Penulis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Dolar menjadi hegemoni karena persetujuan terhadap AS melalui sistem kapitalisme yang dibangun berdasarkan kekuatan AS sebagai negara super power.

Kemunculan Euro perlahan mulai menggeser posisi Dolar dalam transaksi dunia. Namun, selama Dolar masih terikat dengan komoditas minyak dan tetap menjadi alat utama perdagangan internasional, maka posisi Dolar sebagai mata uang hegemon takkan berubah. Dan selama fungsi Dolar sebagai alat hegemoni masih melekat, maka hegemoni AS terhadap dunia, terutama negara ketiga, akan tetap berlangsung sampai batas waktu yang tak bisa ditentukan.

## 5.2 Relevansi Penulisan

Mata uang seyogyanya merupakan alat pembayaran yang menjadi perantara dalam transaksi ekonomi. Sebagai alat satuan hitung dan alat tukar, seharusnya uang menjadi alat untuk meraih keuntungan bersama dengan menggunakan prinsip keadilan bagi semua pelakunya. Dengan demikian uang akan menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap menjadi alat ekonomi belaka.

Bertambahnya fungsi uang menjadi alat hegemoni tentunya merupakan sebuah "inovasi" yang menyalahi fungsi asasinya. Ketika uang menjadi alat kekuasaan, maka uang menjadi segalanya. Pada akhirnya uang menjadi sesuatu yang superior dimana ia mampu mengendalikan kehidupan pada titik ekstrimnya. Penambahan fungsi uang menjadi alat hegemoni berpotensi merusak sistem ekonomi yang berkeadilan dimana semua pelaku seharusnya mendapatkan keuntungan yang sama.

Skripsi ini akan terus relevan selama masih ada dominasi tunggal terhadap mata uang. Sebelum Dolar, poundsterling tampil menghegemoni mata uang lainnya. Pada masa yang akan datang, Euro diprediksi akan menggantikan hegemoni Dolar yang saat ini mulai goyah. Setelah Euro mungkin akan ada lagi mata-mata uang lainnya yang akan menghegemoni.

Bertenggangnya sebuah mata uang dalam puncak dominasi tanpa diimbangi mata uang lainnya akan melahirkan lebih dari sekedar hegemoni keuangan, melainkan hegemoni pada segala bidang. Maka dari itu, skripsi ini diharapkan

dapat melakukan fungsi penyadaran kritis terhadap pembacanya bahwasanya mata uang selalu memiliki potensi untuk menjadi hegemon. Jika keadaan tersebut terus dibiarkan tanpa ada sebuah solusi yang tepat, maka akan muncul AS-AS lain di masa yang akan datang. Sudah saatnya kita melancarkan counter hegemony demi menciptakan sistem keuangan yang sejajar dan saling menguntungkan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia dalam konteks kemandirian sebuah bangsa. Indonesia adalah salah satu negara yang sulit melepaskan diri dari cengkeraman hegemoni AS yang telah lama ada di negeri ini. Ketergantungan akut kepada AS dan sikap menghamba kepada negara tersebut telah membawa Indonesia pada kemelut ekonomi politik pada era pra reformasi.

Di tengah banyaknya bangkitnya negara-negara ketika dari lahirnya kemandirian negara-negara kecil, Indonesia selayaknya perlahan-lahan mengikuti jejak negeri-negeri tersebut untuk perlahan-lahan meninggalkan ketergantungan akut terhadap AS. Brazil, India, Cina, Jepang, dan banyak negara lainnya telah membuktikan bahwa mereka mampu “menantang” hegemoni AS yang sekian lama berkuasa dalam kancah ekonomi politik global.

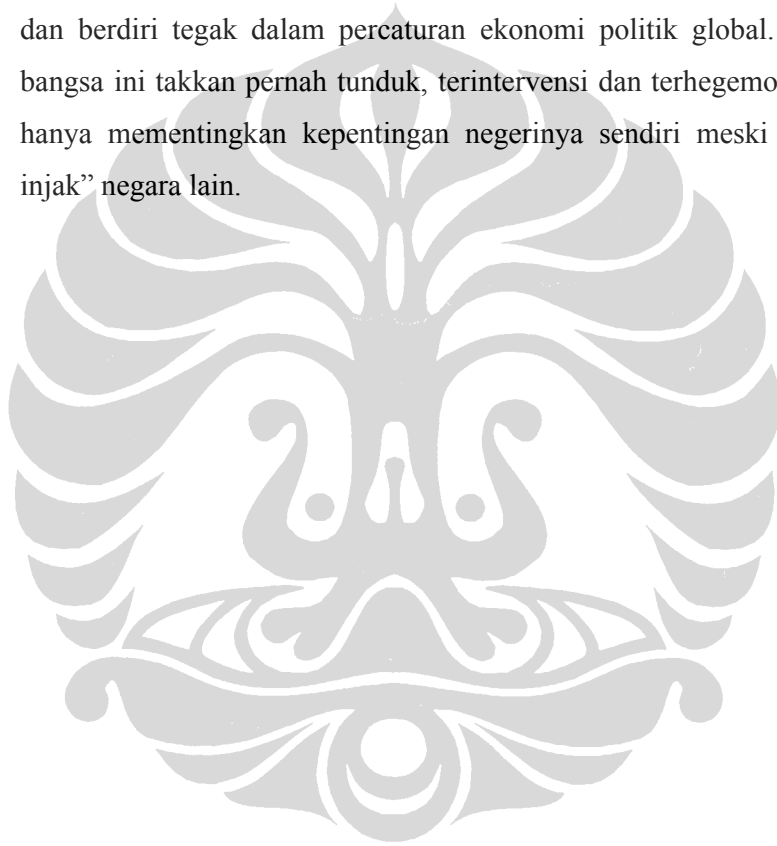
Ketergantungan akut terhadap Dolar juga terbukti mengantarkan negeri ini pada krisis multidimensi yang membuat negeri ini porak poranda. Sudah saatnya kita untuk tidak terlalu mendewakan salah satu mata uang di tengah ketidakpastian nilai-nilai mata tersebut. Pengurangan devisa dalam bentuk Dolar dan mengkonversinya dalam bentuk lain seperti emas, Euro, atau mata uang lainnya merupakan langkah yang perlu diambil di tengah menurunnya kekuatan mata uang Paman Sam tersebut.

Indonesia adalah negara yang besar. Maka dari itu sudah sepatutnya negeri ini mampu berdiri tegak tanpa intervensi atau bayang-bayang negara lain. Kemandirian dan kedaulatan penuh sudah sepatutnya diperjuangkan dalam upaya menciptakan sebuah negara yang kuat dan disegani oleh negara lain. Kedaulatan penuh merupakan kunci sebuah negara mampu berkembang dan maju.

Hubungan antar negara di dunia sepatutnya merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Kekuatan hegemoni dan dominasi yang dimiliki sebuah negara seharusnya dipergunakan untuk tujuan positif. Namun pada kenyataannya

kekuatan tersebut dipergunakan oleh negara dominan untuk mengintervensi dan meletakkan negara lain sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan negerinya sendiri. Maka dari itu perlu sebuah gerakan counter untuk melawan atau mengimbangi kekuatan hegemon tersebut.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya sudah sepatutnya percaya diri untuk maju sebagai potensi kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatan negara hegemon. Sumber daya yang melimpah sepatutnya mampu mengantarkan negeri ini menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain dan berdiri tegak dalam percaturan ekonomi politik global. Dengan demikian, bangsa ini takkan pernah tunduk, terintervensi dan terhegemoni negara lain yang hanya mementingkan kepentingan negerinya sendiri meski harus “menginjak-injak” negara lain.



## Daftar Pustaka

- Agnew, John. 2005. *Hegemony: The New Shape of Global Power*. Temple University: Philadelphia
- Althusser, Louis. 2001. *Ideology and Ideological State Apparatuses: Notes Towards an Investigation*, dalam *Lenin and Philosophy and Other Essays*. Monthly Review Press: New York
- Arsyad, Nurjaman. 1992. *Ekonomi, Keuangan, dan Moneter: Analisa, Peristiwa, Masalah*. Intermedia: Jakarta
- Ball, Donald A dan Mc Culloh H. 2000. *Bisnis internasional* (Terj). Salemba Empat: Jakarta
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London. Sage Publications Ltd: London
- Barrett, Michèlle. 1991. *The Politics of Truth: From Marx to Foucault*. Stanford University Press: California
- Bocock, Robert. 2007. *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni* (terj). Jalasutra: Yogyakarta
- Cesarano, Filippo. 2006. *Monetary Theory and Bretton Woods: The Construction of an International Monetary Order*. Cambridge University: New York
- Chomsky, Noam. 2003. *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*. Henry Holt and Company LLC: New York
- Chossudovsky. 1997. *The Globalisation of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms*. Thirld World Network: Malaysia
- Cohn, Theodore H. 2003. *Global Political Economy: Theory and Practice*. Addison Wesley Longman Inc: NewYork.
- Columbus, Theodore A dan James H Wolfe. 1990. *Pengantar Hubungan Internasional*. CV Abardin: Bandung
- Duncan, Richard. 2005. *The Dollar Crisis. Causes, Consequence, Cures*. John Wiley & Sons Asiai: Singapura

- Engels, Frederick. 1974. *Socialism: Utopian and Scientific dalam Karl Marx and Frederick Engels Selected Works Fifth Edition*. International Publisher: Newyork
- Frohlic, dkk. 1971. *Political Leadership and Collective Goods*. Pricenton University Press: Prisenton.
- Fontana, Benedetto. 1993. *Hegemony and Power: On the Relation between Gramsci and Machiavelli*. University of Minnesota Press: London
- Fakih, Mansour. 2004. *Bebas dari Neoliberalisme*. Insist Press: Yogyakarta
- Friedman, Milton. 1982. *Capitalism and Freedom: The Classic statement of Milton Friedman Economic Philosophy*. The University of Chicago Press: Chicago and London
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*. Pricenton University Press: Pricenton
- \_\_\_\_\_, 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic order*. Princeton University Press: Princeton
- Gilarso. 2002. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro, cet. IX*. Kanisius: Yogyakarta
- Gramsci, Antonio. 1995. *Selection from the Prison Notebook*. International Publisher: New York
- Hadiz, Vedi R. 1990. *Teori Sosial Modern: Perpektif Itali*. LP3ES: Jakarta.
- Hamidi, luthfi. 2007. *Gold dinar, sistem moneter global yang stabil dan berkeadilan*. Senayan Abadi Publishing: Jakarta
- Hamidi, luthfi. 2003. *Dolar VS Euro: Awal Kebangkrutan AS?*. Senayan abadi publishing: Jakarta
- Hoogendjik, Willem. 1996. *Revolusi Ekonomi: Menuju Masa Depan Berkelanjutan dengan Membebaskan Perekonomian dari Pengejaran Uang Semata* (terj). Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Horace. ed. 1994. *Television: the Critical View – Fifth Edition*. Oxford University Press, New York.



- Hovey, Craig dan Gregory Rehmke. 2009. *The Complete Ideal's Guide to Global Economics (terj)*. Prenada Media Group: Jakarta
- Hungtinton, P. Samuel. dkk. 2005. *Amerika dan Dunia: memperdebatkan bentuk baru politik internasional*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Hudson, Michael. 2003. *Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance*. Pluto Press: London
- Ismawan, Indra. 2002. *Di bawah Cenggraman IMF: peran IMF dalam Krisis Ekonomi Indonesia*. Pondok Edukasi: Solo
- Ives, Peter. 2004. *Language and Hegemony in Gramsci*. Pluto Press: London
- Jackson, Robert dan George Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Jones, Steve. 2006. *Antonio Gramsci*. Routledge: London & New York
- Jones, Walter. 1993. *Logika hubungan internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik International dan Tatanan Dunia (terj)*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Joseph, Jonathan. 2002. *Hegemony A Realist Analysis*. Routledge: London
- Kiely, Ray. 2005. *Empire in the Age of Globalisation: US Hegemony and Neoliberal Disorder*. Pluto Press: London
- Keohane, Robert. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the world Political Economy*. Pricenton University Press: Pricenton.
- Kuncoro, Mudrajat. 1996. *Manajemen Keuangan Internasional*. BPFE: Yogyakarta.
- Krugman, Paul R dan M Obstfeld. 1994. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (terj)*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Marling, William H. 2006. *How American Is Globalization*. Johns Hopkins University Press: Maryland
- Marx, Karl. 2004. *Kapital buku I (terj)*. Hasta Mitra: Jakarta
- Mouffe, Chantal (ed). 1979. *Gramsci and Marxist Theory*. Routledge & Kegan Paul Ltd: London
- Nye, Joseph S, Jr. 1992. *Memimpin Dunia: Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes. 2005. *Kamus Lengkap Ekonomi, cet. IX*. Erlangga: Jakarta
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang di Lipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Jalasutra: Yogyakarta
- Polanyi, Karl. 1957. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Rinehart & Company, Inc: New York
- Pozzoloni. 2006. *Pijar-pijar pemikiran Gramsci (terj)*. Resist Book: Yogyakarta
- Rizky, Awalil dan Nasyith Majidi. 2008. *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. E-Publishing. 2008
- Rivera, Fransisco Batis dan Luis Batis Rivera. 1989. *International Finance and Open Macroeconomics*. Macmillan Publishing Company: Newyork.
- Robert. L. Heilbroner (terj). 1991. *Hakikat dan Logika Kapitalisme*. LP3ES: Jakarta
- \_\_\_\_\_, -1994. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Rosenau, James N. dkk. 1980. *World Politics: An Introduction*. The Free Press: New York
- Rothermund, Dietmar. 2008. *Great Depression: Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1939 dan Dampaknya Terhadap Kehancuran Ekonomi Dunia*. Imperium: Yogyakarta
- Rutherford, Donald. 1992. *Routledge Dictionary of Economics*. Routledge: London
- Saccarelli, Emanuele. 2008. *Gramsci and Trotsky in the Shadow of Stalinism: The Political Theory and Practice of Opposition*. Routledge: New York
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. 2005. *Makro Ekonomi (terj), cet. XI*. Erlangga: Jakarta
- Samuelson, Paul A. 1969. *The Gains From Internasional Trade Once Again*. Middlesex: Penguins Books

- Shambaugh, David. 2005. *The Rise of China and Asia's New Dynamics*. Berkeley: University of California Press: Berkeley
- Simai, Mihali. 1990. *Global Power Structure Technology and World Economy in the Late Twentieth Century*. Pinter Publisher: London.
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci* (terj). Insist Press & Pustaka Pelajar: Jakarta
- Sjahrir. 1999. *Masuk krisis keluar krisis: Para Tokoh Menggugat*. Erlangga: Jakarta
- Smick, David. 2009. *Kiamat Ekonomi Global* (terj). Daras Book: Jakarta
- Spero, Joen Edelman. 1985. *The Politics of International Economic Relation*. St Marlin Press Incoorporation: Newyork.
- Spiro, David E. 1999. *The Hidden Hand of American Hegemony: Petro Dollar Recycling and International Market*. Cornel University Press: Cornel
- Strinati, Dominic. 1995. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. Routledge: London
- Stiglitz, Joseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. WW Norton: New York
- Sunarto. 1992. *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tabb, William K. 2003. *Tabir Politik Globalisasi*. Lafadl Pustaka: Yogyakarta
- Tehrani, Majid. 1999. *Global Communication and World Politics: Domination, Development, and discourse*. Lynne Publisher, Inc: Colorado
- Tormey, Simon. 2005. *Anti Kapitalisme* (terj). Teraju: Jakarta
- Toussaint, Eric. 2005. *Your Money or Your Life : The Tyranny of Global Finance*. Haymarket: Chicago
- Velmeyer, Henry dan James. 2002. *Imperialisme Abad 21*. Kreasi Wacana: Yogyakarta
- Worsley, P. 1982. *Marx and Marxism*. Publications Limited: Chichester and London

### **Jurnal dan Majalah**

- Engdahl, F William. 2003. *A new american century: Iraq and the hidden euro-dollar wars*. Current Concern no 4. Juni 2003.
- Esquivel, Gerardo and Larrain B, Felipe. 2002. *The Impact of G-3 Exchange Rate Volatility on Developing Countries*. Harvard University Working Paper No.86
- Samuel P. Huntington, Samuel P. 1967. *Political development and decline of the American system of world order*. Daedalus 96 (3[summer, 1967]).
- Ilyas, Burnadin. 2006. *Pertarungan Euro Dollar: Sebuah Pertarungan Hegemoni Ekonomi Politik Global*. Jurnal Kajian Wilayah Eropa UI, Vol 2
- Kindleberger, Charles P. 1986. *Hierarchy Versus Inertial Cooperation*. Jurnal International Organization
- \_\_\_\_\_, 1986. *International Public Goods Without International Government*. American Economic Review.
- Koahane, Robert. 1982. *The Demans for Internatioanl Regimes*. Jurnal International Organization
- Krasner, Stephan D. 1982. *Structural Causes and Regimes Consequense: Regime as Intervening variable*. International Organization
- Lipschutz, Ronnie D. 2005. *Power, Politics and Global Civil Society*. Millenium: *Journal of International Studies*. Vol.33
- Luce, Henry R. 1941. *The Amerian Century*. Life, 11 Februari 1941
- Mcknown, Timothy J. 1983. *Tariff and hegemonic stability theory*. Jurnal international Organization
- McNeill, William. 1988. *Toynbee Revisited*. Bulletin of the American Academy of Arts and Science 41. April.
- Medeiros, Evan S. 2005. *Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability*. *Washington Quarterly*, Vol 29, No. 1 (Winter 2005-2006)
- Muller, Henric. 1999. *From Dollarization to Euroisation: The Future of The Euro as Internastional Substitution Currency*. Intereconomic. November-Desember

- Mundell, Robert A. 1997. *Could Gold Make a Comeback?* Paper delivered at St. Vincent College, Letrobe, Pennsylvania, March 12, 1997.
- \_\_\_\_\_, - 1997. *Optimum Currency Areas*. Paper Presented at The Conference of Optimum Currency Areas, organized by Tel-Aviv University, December 5, 1997
- Nuroso, Bambang. 1999. *Big Emerging Market*. Jurnal Studi Amerika Serikat Vol. V Agustus-Desember
- Rostow, Eugene V. 1967. *Thinking About the Future of Internasional Society*. Daedalus 96 (3 [summer 1967]).
- Ruggie, John Gerrard. 1982. *International Regimes, Transaction, and Changes. Dalam Liberalisme in the Postwar Economic Order*. Jurnal International Organization
- Santos, Theotoniodos. 2002. *The Structure of Dependence*. American Economic Review. Vol.60 May
- Soesastro, Hadi. 2005. *Tinjauan Politik Ekonomi-Moneter Internasional dalam Kaitannya dengan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional*. Economics Working Paper Series CSIS: Jakarta